

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
( LKIP ) TH. 2018**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA BIMA**

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Kami sampaikan karena atas ijin-Nya jualah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018 selesai disusun. LKIP disusun sebagai langkah Pemerintah dari tatakelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah Kota Bima melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bima melalui Peraturan Walikota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima, dengan melaksanakan Urusan Wajib yaitu Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam kurun waktu tahun 2018.

Segala upaya dan pengerahan sumber daya telah dilakukan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi-misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan LKIP 2018 adalah wujud dari pertanggungjawaban kami tentang semua itu.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya LKIP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 ini, dan tidak lupa pula kami meminta maaf atas berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk mendukung pencapaian kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dalam pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Raba-Bima, 5 Februari 2019  
Kepala DPP – PA  
  
**Drs. M. Saleh**  
Pembina Tk.I/ IV.b  
Nip. 19680119 199403 1 006

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018 sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bima melaksanakan urusan wajib perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima juga mengedepankan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud penerapan tatakelola pemerintahan yang baik tersebut adalah adanya kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima untuk menyusun laporan kinerja. Laporan Kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD. Kemudian setiap SKPD menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2018 ini, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima 2017–2018 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2018, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2018 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Bima.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada Walikota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota selama tahun 2018.

## 1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

### 1.2.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2018 menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Anggaran Dinas ;
2. Penyelenggaraan program pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ;
3. Penyelenggaraan program penguatan dan jaringan Kelembagaan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
4. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah/LSM Swasta dan masyarakat di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
5. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Penguatan kelembagaan
  - Penataan organisasi : Terbentuknya DPP dan PA, dan masih Kurangnya SDM
  - Ada beberapa produk hukum Daerah terkait dengan pemberdayaan perempuan dan hak anak



7. Kualitas dan pemanfaatan data mikro Kekerasan untuk perencanaan di berbagai SKPD
8. Data dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum tersedia
9. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga, pola asuh dan tumbuh kembang anak, serta kualitas lingkungan keluarga dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
10. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan program, termasuk peningkatan kinerja, kualitas SDM dan pengembangan sistem manajemen.
11. Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
12. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima.

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Menyusun program dan anggaran;
- Pengelolaan Keuangan;
- Pengelolaan kelengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah/negara;
- Pengelolaan urusan ASN;
- Penyusunan perencanaan di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi, bidang pemenuhan hak anak serta bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga pemenuhan hak anak serta bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- Pelaksanaan pelayanan PP di bidang ekonomi, sosial politik dan hukum serta kualitas keluarga, data dan informasi;
- Pelaksanaan pelayanan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Pelaksanaan pelayanan hak sipil, informasi dan partisipasi;
- Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Pelaksanaan pelayanan perlindungan khusus anak dan perempuan;

- Pelaksanaan pelayanan kekerasan perempuan dan anak;
- Pelaksanaan kerja sama administrasi PP dan perlindungan anak;
- Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang PP dan PA;
- Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas PP dan PA; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Dinas PP dan PA membantu tugas Kepala Dinas PP dan PA, yaitu Mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program dan pelaporan agar tugas-tugas dan kegiatan pada lingkup Dinas PP dan PA Kota Bima dapat berjalan lancar.

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dinas

- Pengekoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tatalaksana, tata usaha dan rumah tangga dilingkungan Dinas;
- Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- Pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara dilingkungan Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :

a. Kasubag Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara:

- Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan Pegawai;
- Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, Jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- Pelaksanaan urusan Tata usaha, kearsipan, rumah tangga keamanan dan kebersihan;
- Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;

- Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
- b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan membawahi Bendahara rutin, Gaji, Gudang, Pembantu penerima. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program;
  - Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang PP dan PA;
  - Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang PP dan PA;
  - Pemananaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - Penyusunan laporan dibidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengolahan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
  - Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian revisi anggaran; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitas teknis dan laporan yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan pengendalian dalam program dan penyusunan laporan dan melakukan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

### C. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapanp perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang PP dan Gender :

- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang Ekonomi, Sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang Ekonomi, Sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gendre dan PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan , pengolahan, analisis penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan fasilitas dan distribusi, kebijakan pengumplan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengumpulan data dan informmasi gender PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;

- Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :
  1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender di bidang Ekonomi mempunyai tugas :
    - Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi;
    - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang Ekonomi;
    - Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi;
    - Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi;
    - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang ekonomi;
    - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi;
    - Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
    - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
    - Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, data dan informasi gender di bidang ekonomi;

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
  - Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
  - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Gender di bidang ekonomi;
  - Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
  - Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi;
  - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi
2. Saksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender sosial politik dan Hukum mempunyai tugas :
- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang sosial, politik dan hukum;
  - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang sosial, politik dan hukum;
  - Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan Koordinasi dan sinkronisasi. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan adistribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang sosial, politik dan hukum;
  - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan dan PP di bidang sosial politik dan hukum;
  - Pemanantauan analisis, evaluasi dan pelaporan .penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaam gender da PP di bidang sosial politik dan hukum;
  - Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial politik dan hukum;
  - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;

- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi. Penyajian koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- Penyiapan kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum.

3. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga.
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Penyipian fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;

- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga.

E. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyipian koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan dan pendidikan kreativitas dan keluarga budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kabijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan , serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,



pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- Penyiapan analisis, evaluasi dan pelaporan, penerapan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan fasilitas sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak. di bantu oleh :

1. Saksi Hak Pendidikan dan Budaya. mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- Penyiapan Fasilitas, sosialisasi dan distribusi. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan, analisis dan penyajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyedia data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang kegiatan budaya .

2. Saksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi. mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan Fasilitas, sosialisasi dan distribusi. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan, analisis dan penyajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyediaan data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- Penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang kegiatan budaya .

3. Saksi Kesehatan Dasar dan kesejahteraan.mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan koordinaso dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

F. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan terhadap penanganan kekerasan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :
  - a. Saksi Perlindungan Perempuan.mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kajian di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana dan perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi, evaluasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang ketenagakerjaan, dalam kondisi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Pemantauan analisis, sosialisasi, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.



b. Saksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan forum koordinasi Penyusunan Kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak; dan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.

3. Saksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Staf.

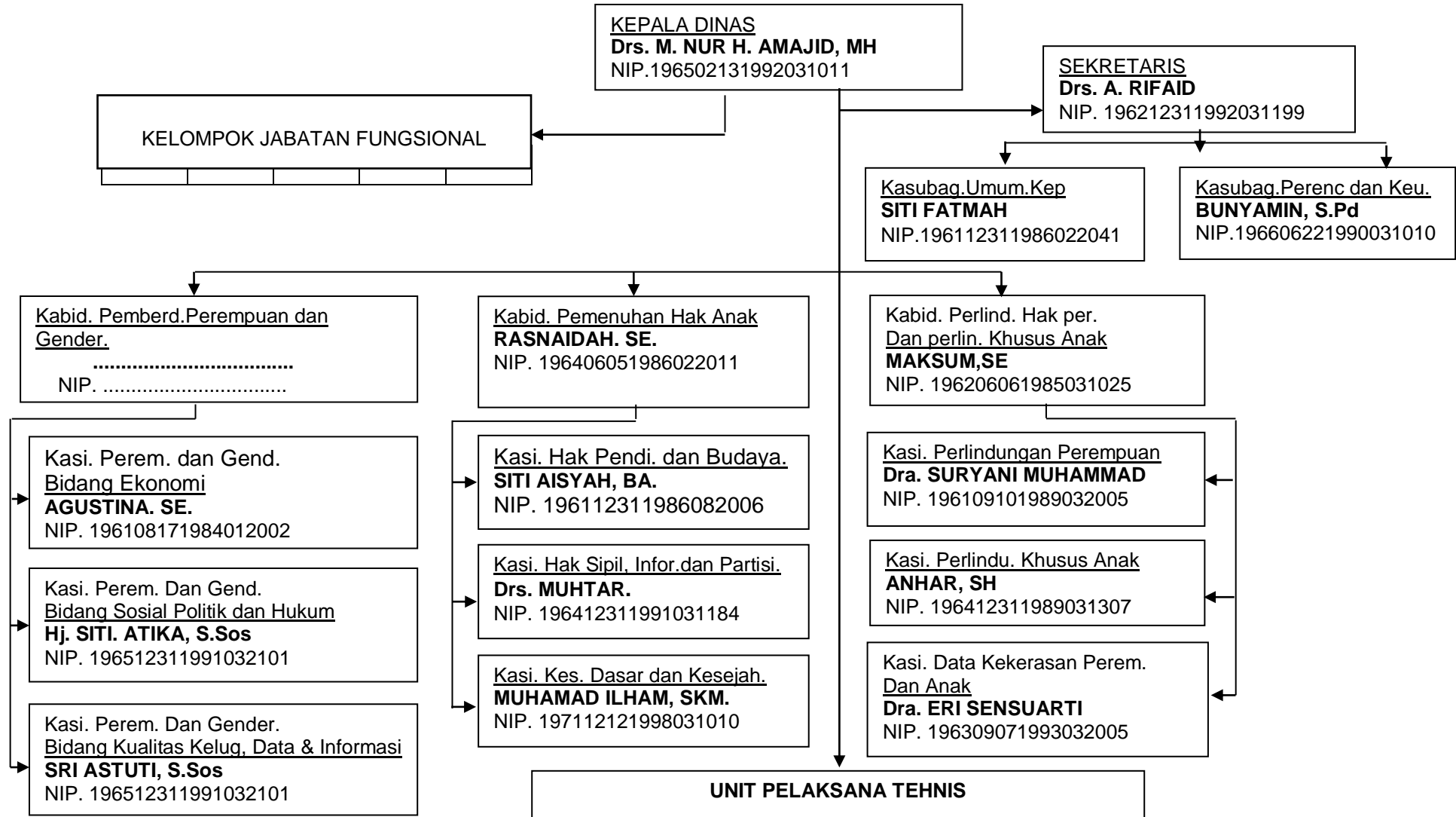
### **1.2.2. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
  - a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender
    - i. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender di bidang Ekonomi
    - ii. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender sosial politik dan Hukum
    - iii. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi
  - b. Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai
    - i) Seksi Hak Pendidikan dan Budaya
    - ii) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
    - iii) Seksi Kesehatan Dasar dan kesejahteraan
  - c. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
    - i. Saksi Perlindungan Perempuan
    - ii. Saksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
    - iii. Saksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Staf

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima



### 1.3. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai SKPD yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dihadapkan beberapa isu strategis yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan;  
Data dan informasi merupakan salah satu elemen vital guna mendukung kegiatan PP dan PA. Kekurangan dan keterbatasan data dan informasi tersebut diharapkan menjadi pertimbangan dan bahan masukan penting demi penyediaan dan penyempurnaan data-data pendukung yang diperlukan dalam perencanaan Dinas PP dan PA..
2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima.
3. Dinas PP dan PA. Kota Bima. harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kota Bima seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Dinas PP dan PA. Kota Bima.
4. Belum optimalnya pelayanan prima dalam Dinas PP dan PA sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang PP dan PA, maka sudah tentu Dinas PP dan PA Kota Bima harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima, terutama masyarakat Kota Bima.
5. Belum optimalnya kapasitas aparatur Dinas PP dan PA Kota Bima.  
Keberadaan aparatur PP dan PA merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang PP dan PA.

# BAB II PERENCANAAN KINERJA

## 2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai Dinas teknis dituntut untuk selalu tanggap dan responsive terhadap dinamika serta perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal wilayah maupun secara eksternal. Disamping itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima juga dituntut untuk mampu menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dalam konteks dan waktu yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan kebutuhan berbagai kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai perangkat daerah di Kota Bima. Berkaitan dengan hal tersebut telah merumuskan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai sebagai bagian dari perwujudan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran sampai tahun 2018 sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima 2017-2018. Adapun visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima adalah:

***“Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak”***

Visi tersebut merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai suatu lembaga Teknis daerah.

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 3 (tiga) uraian misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran strategis.

Rumusan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender;
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi kekerasan berbasis data mikro.

Visi dan misi yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta indikator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.1.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahun	
					2017	2018
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	60,00%	Meningkatnya program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	52,74%	60,00%
				Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	49,63%	40,00%
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	12,00%	12,00 %
Mewujudkan Kota Layak Anak	Prosentase ketersediaan Fasilitas Layak Anak	100,00%	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Peremp.dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayananterpadu	67,74%	100,00%
				Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak	100,00%	100,00%

## 2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2018 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapaisasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2017-2018. Indikator KinerjaUtama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2.  
Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	$\frac{\text{Pekerja peremp. di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan..... Org}} \times 100\% = \dots\%$
	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	$\frac{\text{Pekerja peremp. di lembaga swasta}}{\text{Jumlah pekerja dilembaga swasta .... Orang}} \times 100\% = \dots\%$
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga lagislatif	%	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga legislatif}}{\text{Jumlah pekerja legislatif .....}} \times 100\% = \dots\%$
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Peremp.dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayananterpadu	%	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang diselesaikan oleh unit pelayanan terpadu ...}}{\text{Jumlah pengaduan / laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu .....}} \times 100\% = \dots\%$
Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak	%	$\frac{\text{Jumlah leompok Forum Anak yang aktif}}{\text{Jumlah leompok Forum Anak yang Ada .....}} \times 100\% = \dots\%$

### 2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2017-2018 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2018.



Tabel 2.3.  
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahun 2018
Meningkatnya program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	60,00%
	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	40,00%
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	12.00 %
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu	100.00%
Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak	100,00%

### 2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsional, wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun 2018, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
- d. sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018 pada awal tahun 2017 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja utama dengan anggaran sebesar Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 10 (delapan) program dengan total anggaran sebesar Rp 1.850.000.000,-

Tabel 2.4.  
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahun 2018
Meningkatnya program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	60,00%
	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	40,00%
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	12.00 %
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Peremp.dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu	100.00%
Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak	100,00%

<b>Program :</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket.</b>
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 530.548.500,-	
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 54.210.000,-	
3 Program Peningkatan disiplin Aparatur	Rp. 24.800.000,-	
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Rp. 99.500.000,-	
5 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Rp. 128.557.500,-	
6 Program Keserasian kebijakan peningk. kualitas Anak & Perempuan.	Rp. 130.886.500,-	
7 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 372.241.000,-	
8 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 272.043.500,-	
9 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp. 200.763.000,-	
10 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 36.450.000,-	

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Pengukuran kinerja tersebut membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya. Pembahasan berikut menunjukkan pencapaian sasaran strategis dan indikator-indikator kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja.

Pencapaian kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi organisasi adalah kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai dapat dilihat sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi
1	2	3		4
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	60,00%	60,00%
2		Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	100.00%	100.00%
3	Mewujudkan Kota Layak Anak	Prosentase ketersediaan Fasilitas Layak Anak	100,00%	100,00%

### 3.1. Membandingkan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2018.

Adapun pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini, dengan ringkasannya sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2018
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	60,00%	60,00%
	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	40,00%	40,00%
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	12.00 %	12.00 %
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu	100.00%	100.00%
Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak	100,00%	100,00%

Dari tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa indikator Kinerja sudah mencapai target. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum pencapaian kinerja bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cukup berhasil.

### 3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun Terakhir.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian

kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel Pengukuran Kinerja Sasaran dapat di lihat pada tabel berikut:

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016</b>	<b>CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017</b>	<b>CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018</b>
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0,00%	37,31%	60,00%
	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	0,00%	57,94%	40,00%
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	0,00%	12,00%	12,00%
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Peremp.dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu	0,00%	100,00%	100,00%
Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	% Capaian Kriteria Layak Anak	0,00%	100,00%	100,00 %

Perbandingan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018 dengan cara membandingkan antara capaian tahunan dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dari data di atas, bahwa hampir semua capaian indikator , memenuhi standar sehingga Cakupan pelayanan kasus KDRT di Kota Bima dapat tertanganinya semua.

**3.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis Organisasi.**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian Realisasi Kinerja tahun 2017	Target Kinerja Renstra DPP-PA 2017-2018	%
Meningkatnya program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	37,31%	60,00%	62,18%
	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	57,94%	40,00%	69,04%
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	12,00%	12,00%	12,00%
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu	100,00%	100,00%	100,00%
Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	% Capaian Kriteria Layak Anak	100,00%	100,00 %	100,00 %

Dibandingkan dengan Target Renstra DPP-PA tahun 2013-2018, Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 sudah dapat tercapai.

**3.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target Standar Nasional tidak ada.**

### **3.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Dari hasil analisa beberapa indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima sebagai berikut :

- 3.5.1. Adanya garis komando dan garis koordinasi yang jelas
- 3.5.2. Adanya pembagian tugas yang jelas, dimana jajaran Dinas PP dan PA melakukan Sosialisasi dan Advokasi di masyarakat, dibantu oleh kelompok P2TP2A di 5 Kecamatan serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA Kota Bima)
- 3.5.3. Kemudian jajaran Dinas Kesehatan melakukan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan.
- 3.5.4. Adanya Koordinasi dengan Organisasi Perempuan.

### **3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima sangat di dukung oleh sumber daya yang berkualitas baik dari segi sarana dan prasarana pendukung. dari sisi sumberdaya manusia, masih belum memadai baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas, tetapi dengan memanfaatkan pola tanggungjawab dan jalur koordinasi yang semakin baik, maka dapat mendukung pencapaian kinerja dengan baik pula.

Pemanfaatan sumberdaya yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima, dapat dikatakan efisien, karena dengan penggunaan anggaran yang terbatas, dapat menghasilkan pencapaian kinerja yang sangat baik.

Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan cukup efektif, antara lain : (1) tersedianya sumberdaya pegawai yang cukup; (2) tersedianya sarana dan prasarana pendukung; dan (3) tersedianya anggaran yang cukup.



Secara lebih terperinci, hingga akhir tahun 2018, keadaan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah
1.	S2	1
2.	S1	17
3.	Diploma 3	2
4.	SMA / sederajat	2
5.	SPM	
<b>Total</b>		<b>22</b>

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan belum terpenuhi.

b. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

No.	Pegawai	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	11
4.	Eselonering	-
<b>Total</b>		<b>16</b>

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	0	1
2	Golongan II	0	1	1
3	Golongan III	3	11	14
4	Golongan IV	4	2	6

Berdasarkan profil SDM aparatur diatas diketahui bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar, yaitu 17 orang adalah Sarjana S-1, (77,27%) selanjutnya 1 orang memiliki tingkat pendidikan S-2, (4,45%) dan lainnya berpendidikan D.III dan SMA/sederajat. Selanjutnya, berdasarkan kualifikasi golongan, maka diketahui bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima 14 orang adalah Golongan III, (63,64%) dan 6 orang Golongan IV, (27,27%) dan sisanya 2 orang adalah pegawai golongan II. (9,09%)

Walaupun berdasarkan jenjang pendidikan, golongan dan pangkat, sebagian besar aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima cukup memadai, namun mengingat tugas pokok dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak cenderung kompleks, maka masih dibutuhkan peningkatan keterampilan khusus guna meningkatkan sumber daya aparatur yang semakin handal, disamping mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak yang relevan.

### **3.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Tahun 2018, Dinas PP dan PA Kota Bima menyelenggarakan 10 program dan 48 kegiatan. pada prinsipnya bahwa semua program dan kegiatan yang ada adalah menunjang tercapainya pencapaian kinerja.

Ada beberapa kegiatan yang sangat menunjang dalam pencapaian kinerja tersebut, baik dalam pencapaian kinerja Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak. adalah Sbb. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3. Program Peningkatan disiplin Aparatur, 4. Program Peningkatan Pngkatan Sumberdaya Aparatur. 5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan, 5. Program Keserasian kebijakan peningk. kualitas Anak & Perempuan, 6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, 7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, 8. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. 9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

## **B. Realisasi Anggaran**

### **1. Target dan Realisasi Belanja**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima pada tahun 2018 telah melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah menghasilkan berbagai macam tingkat capaian yang

didasari dari berbagai macam indikator sasaran maupun pada 10 program dan 48 Kegiatan adalah sebesar Rp. **1.850.000.000,00,-** dengan capaian kinerja keuangan sebesar Rp. **3.248.627.683,00,-** dan capaian persentase sebesar 90,16%. maka capaian 2018 dapat dilihat pada Rincian Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Yang Tersedia (Rp)	Realisasi Anggaran Yang digunakan (Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Tidak	Rp.1.753.367.074,13,	Rp. 1.657.335.214,00,-	94,52 %
2.	Langsung Belanja Langsung	Rp1.850.000.000,00,-	Rp. 1.591.292.269,00,-	86,02 %
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.3.603.367.074,13</b>	<b>Rp.3.248.627.483,00,-</b>	<b>90,16 %</b>
1.	Sisa anggaran Kegiatan Belanja Tidak Langsung adalah	Rp. 96.031.860,13,-		
2	Sisa anggaran Kegiatan Belanja Tidak Langsung adalah	Rp. 258.707.731,-		
JUMLAH		Rp, 354.739.591,13,-		9,84%

Sehubungan dengan pengelolaan Anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan dan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan aturan dan prosedur administrasi keuangan yang berlaku, dengan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

## 2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2018, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima melaksanakan 10 (Sepuluh) Program dan 48 (empat puluh delapan) kegiatan. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima pada tahun 2018 juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.2.1  
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin

No	Program	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>530.548.500</b>	<b>482.194.269</b>	<b>90,89%</b>
		Penyediaan jasa surat menyurat	43.440.000	43.440.000	100,00%
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.480.000	5.332.000	82,28%
		Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operationan(Jasa Non pegawai, Jasa STNK dan BPKB)	61.200.000	36.085.500	59,96%
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	33.648.000	33.648.000	100,00%
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.925.000	20.055.000	91,47%
		Penyediaan alat tulis kantor	26.100.500	23.260.000	89,15%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.620.000	26.592.500	86,85%
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.405.000	2.159.000	63,41%
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	16.130.000	16.130.000	100,00%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	34.600.000	27.745.000	80,19%

No	Program	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
		Penyediaan makanan dan minuman	26.150.000	24.650.000	94,26%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	206.850.000	204.8548.269	91,20%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	20.000.000	18.240.000	91,20%
<b>2</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>54.210.000</b>	<b>39.334.000</b>	<b>72,58%</b>
		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	9.500.000	9.500.000	100,00%
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	31.310.000	17.274.000	55,17%
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.750.000	3.750.000	100,00%
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.650.000	8.810.000	91,30%
		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	9.500.000	9.500.000	100,00%
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>		<b>24.800.000</b>	<b>24.800.000</b>	<b>100,00%</b>
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	15.500.000	15.500.000	100%
		Pengadaan Pakaian Olah Raga	9.300.000	9.300.000	100%
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>		<b>99.500.000</b>	<b>99.500.000</b>	<b>100%</b>
		Konsultasi dan Studi Banding	99.500.000	99.500.000	100%

No	Program	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5	<b>Program Peningkatan dan Pengemb. Sistim Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>		<b>128.557.500</b>	<b>117.106.500</b>	91,09%
		Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar realisasi kenarja SKPD	21.515.000	21.515.000	100,00%
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.	9.095.000	9.095.000	100,00%
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8.892.500	8.892.500	100,00%
6	<b>Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan</b>	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan RKA/DPA /DPPA SKPD	59.605.000	48.154.000	80,79%
		Penyusunan LAKIP. LPJ. SPM dan LPPD	20.510.000	20.510.000	100,00%
		Penyusunan Laporan Gaji berkala, Impasing dan KP4	8.940.000	8.940.000	100,00%
			<b>130.886.500</b>	<b>118.459500</b>	<b>94,50%</b>
		Pelaksanaan sosialisasi yang terkaitan dengan kesetaraann gender PP dan perlindungan anak	14.375.500	14.320.500	99,62%
		Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	116.511.000	104.139.000	89,38%

No	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran kegiatan	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>7</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>		<b>372.241.000</b>	<b>265.326.800</b>	<b>71,28%</b>
		Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	21.767.500	21.232.500	197,54%
		Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A	35.708.000	33.998.000	95,21%
		Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	14.688.000	14.687.000	99,99%
		Evaluasi pelaksanaan PUG	25.764.500	25.553.500	99,18%
		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	15.381.000	15.371.000	99,93%
		Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	74.626.000	61.160.000	81,96%
		Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.	32.608.500	32.348.500	99,20%
		Penguatan Kelompok Forum anak	57.961.500	51.851.300	89,46%
		Pemetaan Anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak	53.476.000	3.080.000	5,76%
		Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak anak	40.260.000	6.045.000	15,01%

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi Anggaran kegiatan</b>	<b>(%)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>		<b>272.043.500</b>	<b>226.639.600</b>	<b>83,31%</b>
		Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan anak di Daerah	23.751.000	17.651.000	99,88%
		Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	37.603.500	37.557.400	74,32%
		Panenyusunan sistim perlindungan bagi perempuan	21.849.000	20.890.000	95,61%
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	107.255.000	104.162.600	97,12%
		Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	33.772.000	6.090.000	18,03%
		Kegiatan pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	47.813.000	40.288.600	84,26%



No	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran kegiatan	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>		<b>200.763.000</b>	<b>184.184.600.</b>	<b>91,74%</b>
		Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	120.324.500	117.294.500	97,48%
		Pembentukan keompok dan pelatihan fasilitator pendidikan untuk perempuan	32.858.000	29.758.000	90,57%
		Pelatihan Pendidikan Kebangsaan berspektif Gender	47.580.500	37.132.100	78,04%
<b>10</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>		<b>36.450.000</b>	<b>33.747.000</b>	<b>92,58%</b>
		Sosialisasi Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	36.450.000	33.747.000	92,58%
<b>JUMLAH</b>			<b>1.850.000.000</b>	<b>1.591.292.269</b>	<b>86,02%</b>

Sehubungan dengan pengelolaan Anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan dan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan aturan dan prosedur administrasi keuangan yang berlaku, dengan sistim pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

---

**Pencapaian Sasaran Strategis I :****Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan**

---

Partisipasi Perempuan yang dimaksud tersebut di atas akan mengarahkan kepada tumbuhnya kemampuan-kemampuan Perempuan untuk mandiri. Pemberdayaan Perempuan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengubah Perempuan agar menjadi lebih mampu dalam mengkaji masalah atau kebutuhan sendiri, serta memikirkan jalan keluar untuk memperbaiki keadaannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan partisipatif diindikasikan oleh adanya kemampuan Perempuan dalam pengorganisasian kegiatan bersama untuk memecahkan permasalahan bersama. Pengorganisasian masyarakat diartikan sebagai pengorganisasian kesadaran, potensi, rencana, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi dari kegiatan masyarakat dalam rangka pemecahan masalah tersebut. Adapun tahapan yang dalam proses pemberdayaan Perempuan ini adalah :

- a. Dimulai dengan Perempuan yang apatis, yaitu mereka menyadari adanya masalah akan tetapi merasa tidak mampu mengatasinya,
- b. Menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari pemecahan masalah.
- c. Tahap pembebasan, dimana Perempuan mengaktualisasikan dirinya untuk mengambil peran dalam pemecahan masalah.

diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan Perempuan, akan banyak disadari kesepakatan-kesepakatan yang diambil bersamaan dengan berlangsungnya pelaksanaan pematapan. Dengan demikian, adanya wadah koordinasi, baik dalam kelembagaan penanganan maupun dalam pengambilan keputusan, menjadi sangat vital dan penting perannya dalam menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan bahwa indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan sesuai dengan ketentuan meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya pada tahun 2018 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1.

Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis I Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	60,00%	60,00%	100,00%
	Persentase Partisipasi perempuan dilembaga swasta	40,00%	40,00%	100,00%
	Persentase partisipasi perempuan dilembaga legislatif	12,00 %	12,00 %	100,00%

Sumber : Hasil Analisis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa capaian kinerja dari indikator :

- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2018 adalah 60,00%, dari target sebesar 60,00% atau dengan prosentase capaian kinerja 100.00%, Capaian indikator kinerja tersebut jika di bandingkan dengan realisasi kinerja sebelumnya atau di tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 29,26 % dengan realisasi kinerja sebesar 70,74 %

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja ini dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2019, maka capaian kinerja baru mencapai 53,47%. Hal ini berarti masih diperlukan langkah-langkah tindak lanjut yang lebih strategis pada tahun berikutnya sehingga target renstra dapat dicapai.

- Persentase Partisipasi perempuan dilembaga swasta sampai dengan tahun 2018 sesuai dengan yang di targetkan sebesar 40,00% atau dengan prosentase capaian kinerja 100,00%
- Capaian dari indikator kinerja Persentase partisipasi perempuan dilembaga legislatif sebesar 12,00% atau tercapai 100% dari target yang direncanakan. Capaian kinerja yang demikian yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi pada lembaga pemerintah dan Swasta tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan.

**Pencapaian sasaran strategis I** tersebut telah didukung oleh pelaksanaan sejumlah program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis	Indikator kegiatan	Realisasi capaian	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatkan ya partisipasi perempuan dalam pembangunan	• Pelaksanaan sosialisasi yang berkaitan dengan kesetaraan gender PP dan perlindungan anak	Jumlah data Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	99,62%	14.320.500
	• Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	Jumlah Perda Perlindungan Anak dan Perwali PA	89,38%	104,139.000
	• Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	Porsentase Jumlah Organisasi Perempuan yang memahami PUG	97,54%	21.232.500
	• Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Kelompok kelembagaan pemberdayaan perempuan (Majelis Taklim)	99,99%	14.687.000
	• Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah data terpilah yang responsif gender	99,18%	25.553.500
	• Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah tenaga kerja perempuan serta pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi Keluarga	97,12%	104.162,600
	• Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	laporan pelaksanaan kegiatan Hari IBU dan P2WKSS	97,48%	117.294.500
	• Pembentukan keompok dan pelatihan fasilitator pendidikan untuk perempuan	Jumlah pelatihan peserta organisasi perempuan (perempuan aktivis, Ormas, LSM, Kelompok Pemilih-Pemula disabilitas.	90,57%	29.758.000
	• Pelatihan Pendidikan Kebangsaan berspektif Gender	Jumlah Peserta Kegiatan pembentukan dan Pelatihan kelompok fasilitator	78,04%	37.123.100

## **Pencapaian Sasaran Strategis II :**

### **Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak**

Penanganan Pengaduan/Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan, Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu melaksanakan KTPA dan PPT/PKT di RS. dapat diuraikan bahwa capaian kinerja dari indikator Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Peremp.dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu tahun 2018 adalah Capaian kinerja pada indikator menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah sesuai dengan yang di targetkan sebesar 100,00% atau dengan prosentase capaian kinerja 100,00%, Dan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak ada.

Tabel 3.2.  
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis II Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Peremp.dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu	100.00%	100,00%	100,00%

Pencapaian sasaran strategis II tersebut telah didukung oleh pelaksanaan sejumlah program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.  
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis	Indikator kegiatan	Realisasi capaian	Jumlah Anggaran (Rp)
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	•Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A	Jumlah kelompok P2TP2A pada 5 Kec.	95,21%	33.998.000
	•Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah pelatih Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	99,88%	37,557,400
	•Panenysusunan sistim perlindungan bagi perempuan	Jumlah Data Potensi organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistim perlindungan anak pada 5 Kecamatan	95,61%	20,890,000
	•Sosialisasi sistim pencatatan dan pelaporan KDRT PP dan PA	laporan sistim Catpor kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara Valid..	18,03%	6,090.000
	•Kegiatan pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Adanya Laporan terhadap tindak kekerasan perempuan dan Kegiatan Dialog Warga	84,26%	40,288,600

### **Pencapaian Sasaran Strategis III :**

#### **Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak**

Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas merupakan salah satu upaya memperkuat kemampuan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi, dan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada umumnya. Mengingat anak merupakan masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Penguatan forum advokasi/pendampingan anak memfasilitasi forum anak dan melakukan advokasi pada pemberdayaan forum peduli Kota layak anak untuk mendukung capaian indikator KLA, capaian indikator kinerja Prosentase

Capaian Kriteria Layak Anak sesuai dengan yang di targetkan sebesar 100,00% atau dengan prosentase capaian kinerja 100,00%, Dan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak ada.

Tabel 3.4.  
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis III Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak	100.00%	100,00%	100,00%

Dalam rangka Pencapaian sasaran strategis III tersebut telah didukung oleh pelaksanaan sejumlah program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.  
Program/Kegiatan pokok yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis	Indikator kegiatan	Realisasi capaian	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	• Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Sosialisasi Pembentukan Sekolah Ramah Anak, Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Sosialisasi Pembentukan Forum Anak Tk.Kelurahan	81,96%	61.160.000
	• Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.	Jumlah Data dan Informasi Kelompok Anak di dalam Sekolah	99,20%	32.348.500
	• Penguatan Kelompok Forum anak	Jumlah Kelompok Forum Anak di Kecamatan	89,64%	51,851,300
	• Pemetaan Anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak	Adanya Profil perlindungan anak 5 Kecamatan di Kota Bima	5,76%	3,080,000
	• Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak anak	Adanya capaian 27 Indikator KLA, rincian Pembagian Gugus Tugas KLA	15,01%	6,045,000

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis	Indikator kegiatan	Realisasi capaian	Jumlah Anggaran (Rp)
		Tingkat Kecamatan,dan gugus tuga KLA Tk, Kelurahan,		
	• Sosialisasi Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	Jumlah peserta yang memahai terhadap bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS pada anak usia sekolah	92,58%	33,747,000

Tabel 3.6.

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2018 tidak ada dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	52,74%	37,31%	70.74%	60,00%	100,00%	100,00%
Persentase Partisipasi perempuan dilembaga swasta	49,63%	57,94%	85.66%	40,00%	100,00%	100,00%
Persentase partisipasi perempuan dilembaga legislatif	12,00%	12,00%	100.00%	12.00 %	100.00 %	100,00%
Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu	100.00%	100,00%	100,00%	100.00%	100,00%	100,00%
Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rata-rata			61,45%		100,00%	100,00%

Sumber : Hasil Analisis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja 5 (Lima) indikator sasaran strategis menunjukkan bahwa pada tahun 2017 memiliki rata-rata capaian 61,45% sedangkan di tahun 2018 menunjukkan peningkatan capaian sampai dengan 100,00% atau dengan tingkat peningkatan 38,55%



Adapun perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2017-2018 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.7.  
Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2018)	Realisasi sampai tahun 2017	% Capaian
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	60,00%	70,74%	84,81%
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	40,00%	85.66%	46,70%
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	12.00 %	100,00%	100,00%
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	100.00%	100,00%	100,00%
Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Hasil Analisa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima 2018

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis tersebut, selama tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam 20 (dua puluh) kegiatan pokok seperti diatas pada pencapaian :

1. Pencapaian sasaran strategis I dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) program/kegiatan
2. Pencapaian sasaran strategis II dijabarkan ke dalam 5 (lima) program/kegiatan
3. Pencapaian sasaran strategis III dijabarkan ke dalam 6 (enam) program/kegiatan

Pengukuran kinerja tersebut diatas merupakan bagian dari proses penilaian akuntabilitas jangka menengah maupun tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima. Hal ini tergambar capaian target jangka menengah sampai tahun 2018.

# BAB IV PENUTUP

## 4.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2018 memiliki nilai strategis karena penyelenggaratugas pokok dan fungsi selama tahun 2018 merupakan tahun ketiga RPJMD Kota Bima 2013-2018 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2018.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama tahun 2018.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2018 semuanya telah direalisasikan dengan kategori Berhasil dengan rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebesar 100,00%, sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Keuangan) sebesar 91,16%.

Rata-rata capaian sasaran strategis adalah sebesar 100,00% yang terukur melalui 5 (lima) indikator kinerja. Capaian sasaran strategis I yang terukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja adalah sebesar 100,00% dan capaian sasaran strategis II yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 100,00% Serta capaian sasaran strategis III yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 100,00.

Rata-rata capaian sasaran strategis I, II, dan III terhadap target jangka menengah Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima masing-masing sebesar 100,00%,100,00% dan 100,00%. Sehingga rata-rata capaian kinerja tahun 2018 terhadap target jangka menengah Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak adalah sebesar 100,00%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan pada tahun 2018 telah berjalan dengan baik.

## **4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah**

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal. Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah kekurangan dalam proses perencanaan pembangunan yang masih dihadapi hingga saat ini dan dalam rangka memperkuat peran kelembagaan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima agar dapat menjadi organisasi pelaksana teknis pembangunan daerah dalam melaksanakan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yang lebih baik di masa yang akan datang, maka perlu beberapa langkah tindak lanjut yang dapat diupayakan untuk tahun berikutnya seperti sebagai berikut:

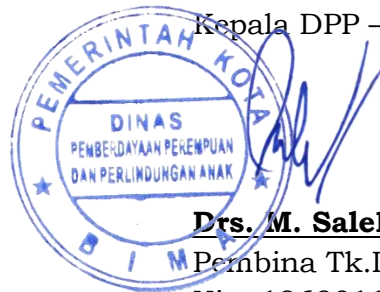
1. Masih terbatasnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan, Data dan informasi merupakan salah satu elemen vital guna mendukung kegiatan PP dan PA. Kekurangan dan keterbatasan data dan informasi tersebut diharapkan menjadi pertimbangan dan bahan masukan penting demi penyediaan dan penyempurnaan data-data pendukung yang diperlukan dalam perencanaan Dinas PP dan PA.
2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima.
3. Dinas PP dan PA. Kota Bima. harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kota Bima seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Dinas PP dan PA. Kota Bima.
4. Belum optimalnya pelayanan prima dalam Dinas PP dan PA.  
Sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang PP dan PA, maka sudah tentu Dinas PP dan PA. Kota Bima harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima, terutama masyarakat Kota Bima.
5. Belum optimalnya kapasitas aparatur Dinas PP dan PA Kota Bima.  
Keberadaan aparatur PP dan PA merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang PP dan PA.

6. Penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (*right man on the right place*).

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan menciptakan *Good Governance* di lingkungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.

Raba-Bima, 5 Februari 2019

Kepala DPP – PA



**Drs. M. Saleh**

Pembina Tk.I/ IV.b

Nip. 19680119 199403 1 006

**PERJANJIAN KINERJA  
ESELON II,III, DAN IV  
TAHUN. 2018**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA BIMA**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. M. Nur H. Amajid. MH.

Jabatan : Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Qurais H. Abidin

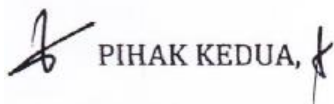

Jabatan : Walikota Bima

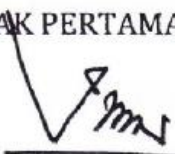
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018

  
PIHAK KEDUA,  
  
M. QURAI S H. ABIDIN.

PIHAK PERTAMA,  
  
Drs. M. Nur H. Amajid. MH.  
NIP. 19650213 199203 1 011




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Partisipas Perempuan dalam pembangunan.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	60,00%
		Persentase Partisipasi perempuan dilembaga swasta	49,00%
		Persentase partisipasi perempuan dilembaga legislatif	40,00%
2	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu	100,00%
3	Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak	100,00%


Program :	Anggaran	Ket.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 539.493.500,-	
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 57.660.000,-	
3 Program Peningkatan disiplin Aparatur	Rp. 24.800.000,-	
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Rp. 99.500.000,-	
5 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Rp. 112.232.500,-	
6 Program Keserasian kebijakan peningk. kualitas Anak & Perempuan.	Rp. 186.946.500,-	
7 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 372.241.000,-	
8 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 269.913.500,-	
9 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp. 200.763.000,-	
10 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 36.7450.000,-	

Kota Bima, Januari 2018

 WALIKOTA BIMA, A

M. QURAIH H. ABIDIN

KEPALA,  
DINAS PP DAN PA KOTA BIMA

  
Drs. M. Nur H. Amajid, MH.  
NIP. 19650213 199203 1 011



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. A. Rifaid.

Jabatan : Sekretaris Dinas PP dan PA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. M. Nur H. Amajid. MH.

Jabatan : Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018

PIHAK PERTAMA,

Drs. A. Rifaid.

NIP. 19621231 199203 1 199



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

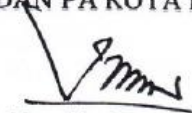
No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	➤ Meningkatnya kelancaran administrasi pelayanan tugas dan fungsi Dinas PP dan PA Kota Bima	➤ Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%
2	➤ Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.	➤ Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100.00%
3	➤ Meningkatnya Disiplin Aparatur	➤ Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin	0 ,00%
4	➤ Meningkatnya Kapasitas sumberdaya Aparatur	➤ Jumlah Orang yang Konsultasi dan Studi Banding di Provinsi DIY Jogjakarta	10 Orang
5	➤ Terpeliharanya gedung kantor dengan kegiatan Pengecatan dinding tembok dan pengecatan kosen pintu	➤ Jumlah Pengecatan dinding tembok dan pengecatan kosen pintu	1 Kali Pengecatan
6	➤ Meningkatnya operasional kendaraan dinas	➤ Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10 Unit Kend. Roda dua dan 1 unit kend. Roda 4
7	➤ Adanya Peningkatnya perlengkapan gedung kantor	➤ Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpeliharanya	5 Unit
8	➤ Meningkatnya dan Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	➤ Jumlah peralatan kantor yang Terpeliharanya	10 Unit
9	➤ Tersedianya seragam pakaian dinas kantor	➤ Persentase pegawai yang memakai seragam dinas lengkap	100%

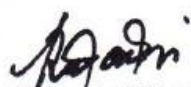
<b>Kegiatan :</b>	<b>Anggaran</b>
1 Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 43.440.000,-
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 6.480.000,-
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Rp. 61.200.000,-
4 Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB	Rp. 33.648.000,-
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 21.925.000,-
6 Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 26.010.500,-
7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 30.620.000,-
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 3.405.000,-
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Rp. 18.965.000,-
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 34.600.000,-
11 Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 27.650.000,-
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Rp. 211.550.000,-
13 Daerah	Rp. 20.000.000,-
14 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Rp. 9.500.000,-
15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 34.760.000,-
16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp. 3.750.000,-
17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp. 9.650.000,-
18 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp. 15.500.000,-
19 Pengadaan Pakaian Olah Raga	Rp. 9.300.000,-
20 Konsultasi dan Studi Banding	Rp. 99.500.000,-

Kota Bima, Januari 2018

Sekretaris Dinas PP dan PA

KEPALA,  
DINAS PP DAN PA KOTA BIMA

  
Drs. M. Nur H. Amajid. MH.  
NIP. 19650213 199203 1 011

  
Drs. A. Rifaid.  
NIP. 19621231 199203 1 199



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maksun, SE.

Jabatan : Kabid. Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan khusus Anak  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. M. Nur H. Amajid. MH.

Jabatan : Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018



PIHAK PERTAMA,  
  
Maksun, SE.  
NIP. 19620606 198503 1 025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	- Jumlah KDRT	100,00%
2	Meningkatnya penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak	- Persentase lembaga perempuan yang dibina	100,00%

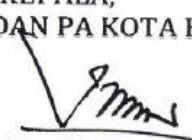
**Kegiatan :**

**Anggaran**

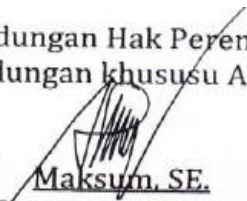
1	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A	Rp.	35.708.000,-
2	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Rp.	15.381.000,-
3	Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Rp.	37.603.500,-
4	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Rp.	21.849.000,-
5	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Rp.	33.772.000,-
6	Kegiatan Pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Rp.	47.813.000,-

Kota Bima, Januari 2018

KEPALA,  
DINAS PP DAN PA KOTA BIMA

  
Drs. M. Nur H. Amajid. MH.  
 NIP. 19650213 199203 1 011

Kabid. Perlindungan Hak Perempuan dan  
Perlindungan Khusus Anak

  
Maksun. SE.  
 NIP. 19620606 198503 1 025



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rasnaidah, SE.

Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. M. Nur H. Amajid. MH.

Jabatan : Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

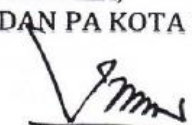
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

.

Kota Bima, Januari 2018

KEPALA,  
DINAS PP DAN PA KOTA BIMA

  
Drs. M. Nur H. Amajid. MH.  
NIP. 19650213 199203 1 011

PIHAK PERTAMA,

  
Rasnaidah, SE.  
NIP. 19640605 198602 2 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningktnya pemberdayaan anak dan remaja	1. Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif	100,00%
2.	Meningkatnya pemahaman perempuan tentang kesetaraan gender	2. Persentase perempuan yang mengikuti sosialisasi perspektif gender	100,00%

**Kegiatan :**


**Anggaran**


- |    |  |     |               |
|----|--|-----|---------------|
| 1. | Penyusunan dan Penerbitan Produk Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak | Rp. | 172.571.000,- |
| 2. | Pengembangan Kota sebagai Kota Layak Anak (KLA)  | Rp. | 74.626.000,-  |
| 3. | Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.                | Rp. | 32.608.500,-  |
| 4. | Penguatan Kelompok Forum anak  | Rp. | 57.961.500,-  |
| 5. | Pemetaan Anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak                                  | Rp. | 53.476.000,-  |
| 6. | Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak anak  | Rp. | 40.260.000,-  |
| 7. | Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan anak di Daerah                    | Rp. | 23.751.000,-  |
| 8. | Sosialisasi Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV / AIDS                           | Rp. | 36.450.000,-  |

Kota Bima, Januari 2018

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

KEPALA,  
DINAS PP DAN PA KOTA BIMA

  
Drs. M. Nur H. Amajid. MH.  
NIP. 19650213 199203 1 011

  
Rasnaidah. SE.  
NIP. 19640605 198602 2 011





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Muhtar.

Jabatan : Kasi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rasnaidah, SE.

Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018

PIHAK KEDUA,

Rasnaidah, SE.

NIP. 19640605 198602 2 011

PIHAK PERTAMA,

Drs. Muhtar.

NIP. 19641231 199103 1 184

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya proses penyusunan Perda Perlindungan Perempuan dan Perwali PA	- Perda Perlindungan Perempuan dan Perwali PA	1 Perda PA dan 1 Perwali PA
2.	Persentase perempuan yang mengikuti sosialisasi perspektif gender	- jumlah forum anak dan remaja	100%
3.	Terlaksananya capaian 27 Indikator KLA, rincian Pembagian Gugus Tugas KLA Tingkat Kecamatan, dan gugus tugas KLA Tk, Kelurahan,	- Jumlah capaian 27 Indikator KLA, rincian Pembagian Gugus Tugas KLA Tingkat Kecamatan, dan gugus tugas KLA Tk, Kelurahan,	100%

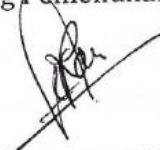
**Kegiatan :**

**Anggaran**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Penyusunan dan Penerbitan Produk Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak | Rp. 172.571.000,- |
| 2. Pengembangan Kota sebagai Kota Layak Anak (KLA)  | Rp. 74.626.000,-  |
| 3. Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak anak  | Rp. 40.260.000,-  |

Kota Bima, Januari 2018

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

  
Rasnaidah, SE.

NIP. 19640605 198602 2 011

Kasi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi

  
 Drs. Muhtar.

NIP. 19641231 199103 1 184



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agustina, SE

Jabatan : Kasi Pemberdayaan.Perempuan dan Gender

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. M. Nur H. Amajid. MH.

Jabatan : Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018

PIHAK PERTAMA,

Agustina, SE

NIP. 19610817 198401 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan dan peringatan hari Ibu	- laporan pelaksanaan kegiatan	30,00%
2	Terlaksananya evaluasi Kelompok Fokal Point PUG Pada SKPD Lingkup Kota Bima	- Jumlah Kelompok Fokal Point PUG Pada SKPD Lingkup Kota Bima	100,00%
3	Menurunnya angka keserasian terhadap Perempuan dan Anak	- Jumlah data Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	100,00%
4.	Meningkatkan pemahaman dan Keterampilan Masyarakat tentang perlindungan tenaga kerja bagi perempuan serta pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi Keluarga	- Jumlah tenaga kerja bagi perempuan serta pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi Keluarga	100,00%
5.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta (Organisasi Perempuan) tentang PUG.	- Porsentase Jumlah Organisasi Perempuan yang memahami PUG	100,00%
6.	Meningkatnya Pemahaman dan kemampuan kelompok Perempuan EX TKI dalam memperluas usaha ekonomi produktif	- Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan EX TKI	100,00%


**Kegiatan :**

**Anggaran**

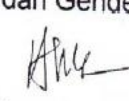
1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Rp. 120.324.500,-
2	Evaluasi Pelaksanaan PUG	Rp. 25.764.500,-
3	Pelaksanaan sosialisasi yang berkaitan dengan kesetaraan gender PP dan perlindungan anak	Rp. 14.375.500,-
4.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Rp. 105.125.000,-
5.	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	Rp. 21.767.500,-
6.	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Rp. 14.688.000,-

Kota Bima, Januari 2018

KEPALA,  
DINAS PP DAN PA KOTA BIMA

  
Drs. M. Nur H. Amajid, MH.  
NIP. 19650213 199203 1 011

Kasi Pemberdayaan, Perempuan  
dan Gender

  
Agustina, SE  
NIP. 19610817 198401 2 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Eri Sensuarti.

Jabatan : Kasi. Data Kekerasan Perempuan dan Anak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Maksum, SE.

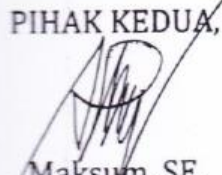
Jabatan : Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan perlindungan Khusus anak


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018

PIHAK KEDUA,  
  
Maksum, SE.  
NIP. 19620606 198503 1 025

PIHAK PERTAMA,  
  
Dra. Eri Sensuarti.  
Nip. 19630907 199303 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta tentang sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan Anak	- Jumlah data kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara Online.	100,00%
2	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	- Jumlah pelatih Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	100,00%

**Kegiatan :**


- 1 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
- 2 Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT

**Anggaran**

Rp. 33.772.000,-  
Rp. 37.603.500,-

Kota Bima, Januari 2018

Kabid. Perlindungan Hak Perempuan dan  
Perlindungan khusus Anak

  
Maksun, SE.  
NIP. 19620606 198503 1 025

Kasi. Data Kekerasan Perempuan  
Dan Anak

  
Dra. Eri Sensuarti.  
Nip. 19630907 199303 2 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Aisyah, BA.

Jabatan : Kasi Hak Pendidikan dan Budaya

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rasnaidah, SE.

Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

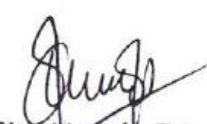
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018

PIHAK KEDUA,  
  
Rasnaidah, SE.  
NIP. 18640605 198602 2 011

PIHAK PERTAMA,  
  
Siti Aisyah, BA.  
NIP. 19611231 198608 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya proses penyusunan Perda Perlindungan Perempuan dan Perwali PA	- Perda Perlindungan Perempuan dan Perwali PA	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Anak serta kecerdasan tumbuh kembang anak	- Adanya Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Hak-Hak Anak	100%
	Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Pembentukan Kelompok Forum Anak Tk.Kecamatan	- Jumlah Pertemuan Pembentukan Kelompok Forum Anak Tk.Kecamatan	100%

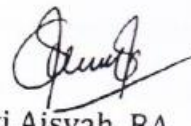
**Kegiatan :**

**Anggaran**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Penyusunan dan Penerbitan Produk Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak | Rp. 172.571.000,- |
| 2. Penguatan Kelompok Forum anak  | Rp. 57.961.500,-  |
| 3. Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan anak di Daerah                    | Rp. 23.751.000,-  |

Kota Bima, Januari 2018

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak  
  
Rasnaidah, SE.  
 NIP. 19640605 198602 2 011

Kasi Hak Pendidikan dan Budaya,  
  
Siti Aisyah, BA.  
 NIP. 19611231 198608 2 006





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bunyamin. S. Pd.

Jabatan : Kasubag Perencana dan Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. A. Rifaid.

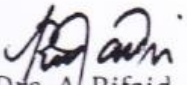
Jabatan : Sekretaris Dinas PP dan PA

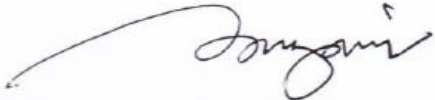
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018

PIHAK KEDUA,  
  
Drs. A. Rifaid.  
NIP. 19621231 199203 1 199

PIHAK PERTAMA,  
  
Bunyamin. S. Pd.  
NIP. 19660622 199003 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
I	➤ Tersusunnya RENSTRA/RENJA/RKA/DPA/DPP A sesuai ketentuan	- Jumlah Dokumen Renstra/Rencana Kerja tahunan/RKA/DPA/DP PA satuan kerj	5 Dokumen
2	➤ Tersedianya laporan keuangan Realisasi Anggaran Triwulan	- Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Realisasi Anggaran Triwulan	4 Dokumen Laporan Triwulan
3	➤ Terlaksananya penyusunan laporan Semester sesuai ketentuan	- Jumlah Dokumen yang harus disediakan.	1 Dokumen Laporan
4	➤ Tersedianya laporan keuangan akhir Tahun	- Jumlah Dokumen yang harus disediakan	1 Dokumen Laporan
5	➤ Tersusunnya Dokumen LKIP, LPJ dan LPPD	- Jumlah Dokumen yang sesuai ketentuan	3 Dokumen

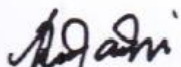
**Kegiatan :**

**Anggaran**

1	Penyusunan Renstra/Rencana Kerja/ RKA/DPA /DPPA SKPD	Rp.	59.605.000,-
2	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	Rp.	9.600.000,-
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	Rp.	5.190.000,-
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp.	8.892.500,-
5	Penyusunan LAKIP. LPJ. dan LPPD	Rp.	20.510.000,-

Kota Bima, Januari 2018

Sekretaris Dinas PP dan PA

  
Drs. A. Rifaid

NIP. 19621231 199203 1 199

Kasubag Perencana dan Keuangan



Bunyamin. S. Pd.

NIP. 19660622 199003 1 010



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Astuti, S. Sos,

Jabatan : Kasi Pemberdayaan.Perempuan dan Gender bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi.

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. M. Nur H. Amajid. MH.

Jabatan : Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018



PIHAK PERTAMA,

Sri Astuti, S. Sos,  
NIP. 19621231 198203 2 300

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya adfokasi peningkatan dan memperluas jaringan kelembagaan Perempuan	- Jumlah Lembaga yang mengikuti adfokasi peningkatan dan memperluas jaringan kelembagaan Perempuan	100,00%

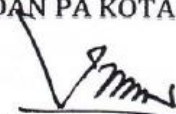
**Kegiatan :**

**Anggaran**

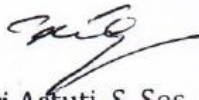
- 1 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Rp. 14.688.000,-

Kota Bima, Januari 2018

KEPALA,  
DINAS PP DAN PA KOTA BIMA

  
Drs. M. Nur H. Amajid, MH.  
NIP. 19650213 199203 1 011

Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Gender  
bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi.

  
Sri Astuti, S. Sos,  
NIP. 19621231 198203 2 300



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Fatmah.

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. A. Rifaid.

Jabatan : Sekretaris Dinas PP dan PA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018

PIHAK KEDUA,

Drs. A. Rifaid.

NIP. 19621231 199203 1 199

PIHAK PERTAMA,

Siti Fatmah

NIP. 19621231 198602 2 041

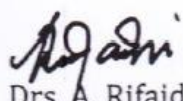
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	➤ Meningkatnya kelancaran administrasi pelayanan tugas dan fungsi Dinas PP dan PA Kota Bima	➤ Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%
2	➤ Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.	➤ Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100.00%
3	➤ Meningkatnya Disiplin Aparatur	➤ Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin	0,00%
4	➤ Adanya kegiatan Konsultasi dan Studi Banding di Provinsi DIY Jogjakarta	➤ Jumlah Orang yang Konsultasi dan Studi Banding di Provinsi DIY Jogjakarta	10 Orang
5	➤ Terpeliharanya gedung kantor dengan kegiatan Pengecatan dinding tembok dan pengecatan kosen pintu	➤ Jumlah Pengecatan dinding tembok dan pengecatan kosen pintu	1 Kali Pengecatan
6	➤ Meningkatnya operasional kendaraan dinas	➤ Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10 Unit Kend. Roda dua dan 1 unit kend. Roda 4
7	➤ Adanya Peningkatnya perlengkapan gedung kantor	➤ Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpeliharanya	5 Unit
8	➤ Meningkatnya dan Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	➤ Jumlah peralatan kantor yang Terpeliharanya	10 Unit
10	➤ Tersedianya seragam pakaian dinas kantor	1. Jumlah pegawai yang memakai seragam dinas lengkap	100%

<b>Kegiatan :</b>	<b>Anggaran</b>
1 Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 43.440.000,-
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 6.480.000,-
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Rp. 61.200.000,-
4 Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB	Rp. 33.648.000,-
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 21.925.000,-
6 Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 26.010.500,-
7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 30.620.000,-
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 3.405.000,-
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Rp. 18.965.000,-
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 34.600.000,-
11 Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 27.650.000,-
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Rp. 211.550.000,-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Rp. 20.000.000,-
13	
14 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Rp. 9.500.000,-
15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 34.760.000,-
16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp. 3.750.000,-
17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp. 9.650.000,-
18 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp. 15.500.000,-
19 Pengadaan Pakaian Olah Raga	Rp. 9.300.000,-
20 Konsultasi dan Studi Banding	Rp. 99.500.000,-

Kota Bima, Januari 2018

Sekretaris Dinas PP dan PA



Drs. A. Rifaid

NIP. 19621231 199203 1 199

Kasubag Umum dan Kepegawaian



Siti Fatmah

NIP. 19621231 198602 2 041



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Suryani Muhammad.

Jabatan : Kasi. Perlindungan Perempuan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Maksum, SE.

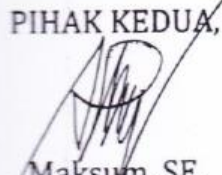
Jabatan : Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan perlindungan Khusus anak


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018

PIHAK KEDUA,  
  
Maksum, SE.  
NIP. 19620606 198503 1 025

PIHAK PERTAMA,  
  
Dra. Suryani Muhammad  
Nip. 19610910 198903 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Fungsi Koordinasi dengan Lintas Sektor dalam sistim perlindungan anak pada 5 Kecamatan	- Jumlah Data Potensi organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistim perlindungan anak pada 5 Kec.	100.00%

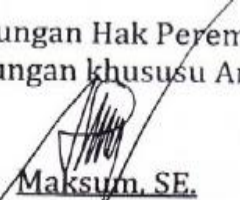
**Kegiatan :**

**Anggaran**


- 1 Panenyusunan sistim perlindungan bagi perempuan Rp. 21.849.000,-

Kota Bima, Januari 2018

Kabid. Perlindungan Hak Perempuan dan  
Perlindungan khusus Anak

  
Maksun, SE.  
NIP. 19620606 198503 1 025

Kasi. Perlindungan Perempuan

  
Dra. Suryani Muhammad  
Nip. 19610910 198903 2 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anhar, SH.

Jabatan : Kasi. Perlindungan Khusus anak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Maksum, SE.

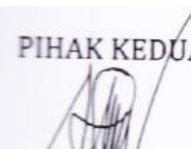
Jabatan : Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan perlindungan Khusus anak


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018

PIHAK KEDUA,  
  
Maksum, SE.  
NIP. 19620606 198503 1 025

PIHAK PERTAMA,  
  
Anhar, SH.  
Nip. 19641231 198903 1 307

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pembinaan terhadap kelembagaan P2TP2A Kota Bima	- Jumlah kelompok P2TP2A pada 5 Kecamatan	100,00%
2.	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan terselesanya Kegiatan Dialog Warga	- Jumlah Laporan Tertanganinya perempuan terhadap tindak kekerasan serta melakukan Dialog Warga	100,00%
3.	Meningkatnya kualitas data KDRT ke dalam kasus kekerasan Anak	- Prosentase Data Kekerasan Anak di 5 kecamatan	100,00%

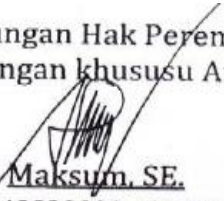
**Kegiatan :**

**Anggaran**

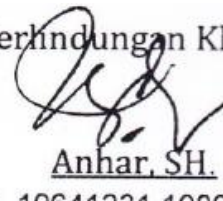
- |   |   |     |              |
|---|---|-----|--------------|
| 1 | Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A | Rp. | 35.708.000,- |
| 2 | Kegiatan pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan    | Rp. | 47.813.000,- |
| 3 | Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak                                 | Rp. | 15.381.000,- |

Kota Bima, Januari 2018

Kabid. Perlindungan Hak Perempuan dan  
Perlindungan khusus Anak

  
Maksun, SE.  
 NIP. 19620606 198503 1 025

Kasi. Perlindungan Khusus anak

  
Anhar, SH.  
 Nip. 19641231 198903 1 307



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ilham, SKM.

Jabatan : Kasi Kesehatan Dasar dan kesejahtraan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rasnaidah, SE.

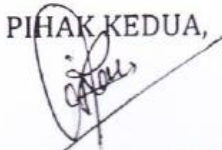
Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

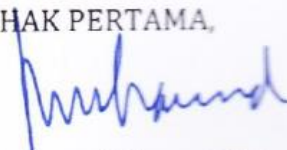
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018

PIHAK KEDUA,  
  
Rasnaidah, SE.  
NIP. 19640605 198602 2 011

PIHAK PERTAMA,  
  
Muhammad Ilham, SKM.  
NIP. 19711212 199803 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya proses penyusunan Perda Perlindungan Perempuan dan Perwali PA	- Perda Perlindungan Perempuan dan Perwali PA	1 Perda PA dan 1 Perwali PA
2.	Terlaksananya Sosialisasi Anak Sekolah terhadap bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS pada anak usia sekolah	- Jumlah Anak Sekolah yang mengikuti sosialisasi bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS pada anak usia sekolah	100%
3.	Adanya Data dan Informasi Kelompok Anak di dalam Sekolah	- Jumlah Data dan Informasi Kelompok Anak di dalam	100%

**Kegiatan :**

**Anggaran**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Penyusunan dan Penerbitan Produk Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak | Rp. 172.571.000,- |
| 2. Sosialisasi Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV / AIDS                           | Rp. 36.450.000,-  |
| 3. Pengembangan Kota sebagai Kota Layak Anak (KLA)  | Rp. 74.626.000,-  |
| 4. Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.                | Rp. 32.608.500,-  |

Kota Bima, Januari 2018

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

Rasnaidah, SE.

NIP. 19640605 198602 2 011

Kasi Kesehatan Dasar dan kesejahteraan

Muhammad Ilham, SKM.

NIP. 19711212 199803 1 010



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Siti Atika, S. Sos.

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Perempuan dan gender Bidang Sosial Politik Dan Hukum.

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. M. Nur H. Amajid. MH.

Jabatan : Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018

PIHAK PERTAMA

Hj. Siti Atika, S. Sos

NIP. 19651231 199103 2 101



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	➤ Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan dan peringatan hari Ibu	- laporan pelaksanaan kegiatan	30,00%
2.	➤ Terlaksananya kegiatan pembentukan dan pelatihan terhadap organisasi perempuan	- laporan pelaksanaan kegiatan	49,00%
3.	➤ Terlaksananya kegiatan pelatihan terhadap organisasi perempuan (perempuan aktivis, Ormas, LSM, Kelompok Pemilih-Pemula disabilitas.	- laporan pelaksanaan kegiatan	40,00%
4.	➤ Sasaran Kegiatan adalah Terlaksananya proses penyusunan Perda Perlindungan Perempuan dan Perwali PP	- Perda Perlindungan Perempuan dan Perwali PP.	1 perda dan 1 perwali


**Kegiatan :**

**Anggaran**

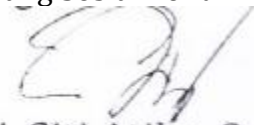
- |   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| 1 | Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan  | Rp. 120.324.500,- |
| 2 | Pembentukan keompok dan pelatihan fasilitator pendidikan untuk perempuan               | Rp. 32.858.000,-  |
| 3 | Pelatihan Pendidikan Kebangsaan berspektif Gender                                      | Rp. 47.580.500,-  |
| 4 | Penyusunan dan Penerbitan Produk Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak | Rp. 172.571.000,- |

Kota Bima, Januari 2018

KEPALA,  
DINAS PP DAN PA KOTA BIMA

  
Drs. M. Nur H. Amajid. MH.  
NIP. 19650213 199203 1 011

Kasi Pemberdayaan Perempuan dan  
gender Bidang Sosial Politik Dan Hukum.

  
Hj. Siti Atika, S. Sos  
NIP. 19651231 199103 2 101



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosita,SE.

Jabatan : Staf Kasi Kesehatan Dasar dan kesejahtraan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Ilham, SKM..

Jabatan : Kasi Kesehatan Dasar dan kesejahtraan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018

PIHAK KEDUA,

Muhammad Ilham, SKM.  
NIP. 19711212 199803 1 010

PIHAK PERTAMA,

Rosita, SE.  
NIP. 19811125 200060 2 019



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyiapkan bahan penyusunan Perda Perlindungan Perempuan dan Perwali PA	- Perda Perlindungan Perempuan dan Perwali PA	1 Perda PA dan 1 Perwali PA
2.	Terlaksananya Sosialisasi Anak Sekolah terhadap bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS pada anak usia sekolah	- Jumlah Anak Sekolah yang mengikuti sosialisasi bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS pada anak usia sekolah	1 Laporan
3.	Adanya Data dan Informasi Kelompok Anak di dalam Sekolah	- Jumlah Data dan Informasi Kelompok Anak di dalam	1 dokumen

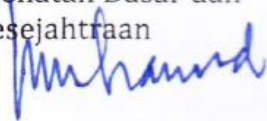
**Kegiatan :**

**Anggaran**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Penyusunan dan Penerbitan Produk Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak | Rp. 172.571.000,- |
| 2. Sosialisasi Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV / AIDS                           | Rp. 36.450.000,-  |
| 3. Pengembangan Kota sebagai Kota Layak Anak (KLA)  | Rp. 74.626.000,-  |
| -   |                   |

Kota Bima, Januari 2018

Kasi Kesehatan Dasar dan  
kesejahteraan



Muhammad Ilham, SKM.  
NIP. 19711212 199803 1 010

Staf Kasi Kesehatan Dasar dan  
kesejahteraan



Rosita, SE.  
NIP. 19811125 200060 2 019



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yenny Nurlinda, SE.

Jabatan : Staf Pemberdayaan Perempuan dan gender Bidang Sosial Politik Dan Hukum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Siti Atika, S. Sos.

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Perempuan dan gender Bidang Sosial Politik dan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018

PIHAK KEDUA,

Hj. Siti Atika, S. Sos

NIP. 19651231 199103 2 101

PIHAK PERTAMA,

Yenny Nurlinda, SE

NIP. 19820708 201001 2 015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	➤ Menyiapkan bahan pembinaan organisasi perempuan dan peringatan hari Ibu	- laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan
2	➤ Menyiapkan kegiatan pembentukan dan pelatihan terhadap organisasi perempuan	- laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan
3.	➤ Menyiapkan bahan untuk kegiatan pelatihan terhadap organisasi perempuan (perempuan aktivis, Ormas, LSM, Kelompok Pemilih-Pemula disabilitas.	- laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan
4.	➤ Menyiapkan bahan penyusunan Perda Perlindungan Perempuan dan Perwali PA	- Perda Perlindungan Perempuan dan Perwali PA.	1 perda dan 1 perwali

**Kegiatan :**

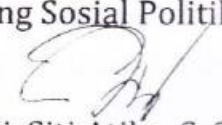
**Anggaran**

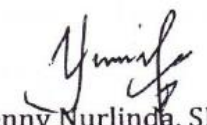
1	Penyusunan dan Penerbitan Produk Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp. 172.571.000,-
2	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Rp. 120.324.500,-
3	Pembentukan keompok dan pelatihan fasilitator pendidikan untuk perempuan	Rp. 32.858.000,-
4	Pelatihan Pendidikan Kebangsaan berspektif Gender	Rp. 47.580.500,-

Kota Bima, Januari 2018

Kasi Pemberdayaan Perempuan dan gender Bidang Sosial Politik Dan Hukum.

Staf Kasi Pemberdayaan Perempuan dan gender Bidang Sosial Politik Dan Hukum

  
Hj. Siti Atika, S. Sos  
NIP. 19651231 199103 2 101

  
Yenny Nurlinda, SE  
NIP. 19820708 201001 2 015



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurrahayu, A. Md.

Jabatan : Bendahara Pembantu Pengeluaran (Gaji)

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bunyamin. S. Pd.

Jabatan : Kasubag Perencana dan Keuangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018

PIHAK KEDUA,

Bunyamin. S. Pd.

NIP. 19660622 199003 1 010

PIHAK PERTAMA,

Nurrahayu, A. Md.

NIP. 19681231 200501 2 069

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
I	➤ Menyiapkan Daftar gaji dan membayarkan Gaji dan Tunjangan Pegawai Dinas PP - PA	➤ Jumlah Gaji dan tunjangan Pegawai Dinas PP-PA Kota Bima	12 Bulan

**Kegiatan :**

**Anggaran**

- 1 Gaji dan Tunjangan Pegawai Dinas PP dan PA Kota Bima Rp. 1.915.315.691,58

Kota Bima, Januari 2018

Kasubag Perencana dan Keuangan

Bendahara Pembantu Pengeluaran (Gaji)



Bunyamin. S. Pd.

Nurrahayu. A. Md.

NIP. 19660622 199003 1 010

NIP. 19681231 200501 2 069



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuyun Trisnawati, SE

Jabatan : Bendahara Pengurus Barang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Siti Fatmah

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018

PIHAK KEDUA,

Siti Fatmah

NIP. 19621231 198602 2 041

PIHAK PERTAMA,

Yuyun Trisnawati, SE

NIP. 19781018 200312 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	➤ Menyiapkan faktur pajak kendaraan dinas dan Tersedianya jasa pemeliharaan Kendaraan dan terbayarnya operasional supir	➤ Jumlah Pajak kendaraan dan STNK	10 Unit Kend. Roda dua dan 1 unit kend. Roda 4
2	➤ Adanya Peningkatnya perlengkapan gedung kantor	➤ Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpeliharanya	5 Unit
3	➤ Menyiapkan faktur bahan bakar minyak dan Meningkatkan operasional kendaraan dinas	➤ Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10 Unit Kend. Roda dua dan 1 unit kend. Roda 4
4	➤ Menyiapkan bahan dan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	➤ Jumlah Peralatan Kantor	10 Unit
5	➤ Menyiapkan bahan-bahan Pengecatan dinding tembok dan pengecatan kosen pintu	➤ Jumlah Pengecatan dinding tembok dan pengecatan kosen pintu	1 Kali Pengecatan
6	➤ Menyiapkan dan Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	➤ Jumlah peralatan kantor yang Terpeliharanya	10 Unit

**Kegiatan :**

**Anggaran**

- |   |  |     |              |
|---|--|-----|--------------|
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB) | Rp. | 61.200.000,- |
| 2 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor   | Rp. | 18.965.000,- |
| 3 | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor   | Rp. | 9.500.000,-  |
| 4 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional   | Rp. | 34.760.000,- |
| 5 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  | Rp. | 3.750.000,-  |
| 6 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor   | Rp. | 9.650.000,-  |

Kota Bima, Januari 2018

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Bendahara Pengurus Barang



Siti Fatmah

NIP. 19621231 198602 2 041



Yuyun Trisnawati, SE

NIP. 19781018 200312 2 008



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yeni Rahmah, S. Sos.

Jabatan : Bendahara pengeluaran

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bunyamin, S. Pd.

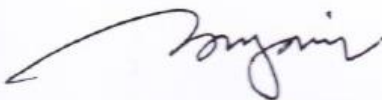
Jabatan : Kasubag Perencana dan Keuangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018

PIHAK KEDUA,  
  
Bunyamin, S. Pd.  
NIP. 19660622 199003 1 010

Kota Bima, Januari 2018  
PIHAK PERTAMA,  
  
Yeni Rahmah, S. Sos.  
NIP. 19820708 201001 2 015



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	➤ Menyiapkan administrasi pelayanan untuk kelancaran Perkantoran	➤ Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%
2	➤ Mempersiapkan data Sarana dan Prasarana Aparatur.	➤ Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100.00%
3	➤ Menyiapkan administrasi keuangan Konsultasi dan Studi Banding	➤ Jumlah Orang yang Konsultasi dan Studi Banding di Provinsi DIY Jogjakarta	10 Orang
4	➤ Terpeliharanya gedung kantor dengan kegiatan Pengecatan dinding tembok dan pengecatan kosen pintu	➤ Jumlah Pengecatan dinding tembok dan pengecatan kosen pintu	1 Kali Pengecatan
5	➤ Menyiapkan faktor bahan bakar minyak dan Meningkatkan operasional	➤ Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10 Unit Kend. Roda dua dan 1 unit kend. Roda 4
6	➤ Menyiapkan perlengkapan gedung kantor	➤ Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpeliharanya	5 Unit
7	➤ Menyiapkan dan menyediakan jasa pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	➤ Jumlah peralatan kantor yang Terpeliharanya	10 Unit
8	➤ Menyiapkan dan menyediakan anggaran seragam pakaian dinas kantor	➤ Persentase pegawai yang memakai seragam dinas lengkap	100%
9	➤ Menyiapkan dan menyediakan anggaran Kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan	1. Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%

<b>Kegiatan :</b>	<b>Anggaran</b>
1 Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 43.440.000,-
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 6.480.000,-
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB	Rp. 61.200.000,-
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp. 33.648.000,-
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 21.925.000,-
6 Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 26.010.500,-
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 30.620.000,-
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 3.405.000,-
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Rp. 18.965.000,-
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 34.600.000,-
11 Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 27.650.000,-
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Rp. 211.550.000,-
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Rp. 20.000.000,-
14 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Rp. 9.500.000,-
15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 34.760.000,-
16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp. 3.750.000,-
17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp. 9.650.000,-
18 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp. 15.500.000,-
19 Pengadaan Pakaian Olah Raga	Rp. 9.300.000,-
20 Konsultasi dan Studi Banding	Rp. 99.500.000,-
21 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	Rp. 5.190.000,-
22 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	Rp. 9.600.000,-
23 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 8.892.500,-
24 Penyusunan Rencana Kerja, RKA/DPA /DPPA SKPD	Rp. 59.605.000,-
25 Penyusunan LAKIP. LPJ. SPM dan LPPD	Rp. 20.510.000,-
26 Penyusunan Laporan Gaji berkala, Impasing dan KP4	Rp. 8.940.000,-

Kota Bima, Januari 2018

Kasubag Perencana dan Keuangan



Bunyamin. S. Pd.

NIP. 19660622 199003 1 010

Bendahara pengeluaran



Yeni Rahmah, S. Sos.

NIP. 19820708 201001 2 015



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rini Ayu Ningsih.

Jabatan : Staf Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Siti Fatmah.

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018

PIHAK KEDUA,

Siti Fatmah.

NIP. 19621231 198602 2 041

PIHAK PERTAMA,

Rini Ayu Ningsih

NIP. 19840816 201406 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	➤ Menyiapkan administrasi pelayanan untuk kelancaran Perkantoran	➤ Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%
2	➤ Mempersiapkan data Sarana dan Prasarana Aparatur.	➤ Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100.00%
3	➤ Terpeliharanya gedung kantor dengan kegiatan Pengecatan dinding tembok dan pengecatan kosen pintu	➤ Jumlah Pengecatan dinding tembok dan pengecatan kosen pintu	1 Kali Pengecatan
4	➤ Menyiaapkan perlengkapan gedung kantor	➤ Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpeliharanya	5 Unit
5	➤ Menyiaapkan dan meyediakan jasa pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	➤ Jumlah peralatan kantor yang Terpeliharanya	10 Unit
6	➤ Menyiaapkan dan meyediakan anggaran seragam pakaian dinas kantor	➤ Jumlah pegawai yang memakai seragam dinas lengkap	100%

1	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 43.440.000,-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 6.480.000,-
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Rp. 61.200.000,-
4	Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB	Rp. 33.648.000,-
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 21.925.000,-
6	Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 26.010.500,-
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 30.620.000,-
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 3.405.000,-
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Rp. 18.965.000,-
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 34.600.000,-
11	Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 27.650.000,-
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Rp. 211.550.000,-
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Rp. 20.000.000,-
14	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Rp. 9.500.000,-
16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp. 3.750.000,-
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp. 9.650.000,-
17	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp. 15.500.000,-
18	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Rp. 9.300.000,-
19	Konsultasi dan Studi Banding	Rp. 99.500.000,-

Kota Bima, Januari 2018

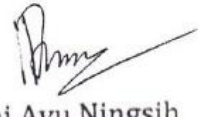
Kasubag Umum dan  
Kepegawaian



Siti Fatmah.

NIP. 19621231 198602 2 041

Staf Kasubag Umum dan  
Kepegawaian



Rini Ayu Ningsih

NIP. 19840816 201406 2 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hairul

Jabatan : Staf Kasi. Data Kekerasan Perempuan dan Anak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Eri Sensuarti.

Jabatan : Kasi. Data Kekerasan Perempuan dan Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2018

PIHAK KEDUA,

Dra. Eri Sensuarti.

Nip. 19630907 199303 2 005

PIHAK PERTAMA,

Hairul.

Nip. 19791231 200801 1 059

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	- Menyiapkan data data perempuan terhadap tindak kekerasan	- Jumlah kekerasan perempuan yang tertangani	1 laporan
	- Menyiapkan bahan Kegiatan Dialog Warga	- Jumlah Orang yang melaksanakan dialog warga	1 laporan
	- Menyiapkan data data KDRT ke dalam kasus kekerasan Anak	- Jumlah Data Kekerasan terhadap perempuan di 5 kecamatan	1 laporan

**Kegiatan :**

**Anggaran**

- |   |   |     |              |
|---|---|-----|--------------|
| 1 | Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT | Rp. | 37.603.500,- |
| 2 | Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan               | Rp. | 47.813.000,- |
| 3 | Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan                                   | Rp. | 21.849.000,- |

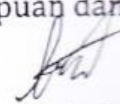
Kota Bima, Januari 2018

Kasi. Data Kekerasan Perempuan  
Dan Anak



Dra. Eri Sensuarti.  
Nip. 19630907 199303 2 005

Staf Kasi. Data Kekerasan  
Perempuan dan Anak



Hairul.  
Nip. 19791231 200801 1 059

**PERJANJIAN KINERJA  
ESELON II,III, DAN IV  
TAHUN. 2019**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA BIMA**





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. M. Saleh.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Muhammad Lutfi, SE

Jabatan : Walikota Bima

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK PERTAMA,

Drs. M. SALEH.

Nip. 19680119 199403 1 006

PIHAK KEDUA,

H. MUHAMMAD LUTFI, SE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Partisipas Perempuan dalam pembangunan.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	60,00%
		Persentase Partisipasi perempuan dilembaga swasta	49,00%
		Persentase partisipasi perempuan dilembaga legislatif	40,00%
2	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu	100,00%
3	Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak	100,00%

**Program :**

	Anggaran	Ket.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 475.806.500,-	
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 62.420.000,-	
3 Program Peningkatan disiplin Aparatur	Rp. 22.760.000,-	
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Rp. 138.245.000,-	
5 Program Keserasian kebijakan peningk. kualitas Anak & Perempuan.	Rp. 101.600.000,-	
6 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 476.295.500,-	
7 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 387.091.000,-	
8 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp. 177.132.000,-	

Kota Bima, Januari 2019

Plt. KEPALA  
DINAS PP dan PA KOTA BIMA,

Drs. M. SALEH.

Nip. 19680119 199403 1 006

WALIKOTA BIMA,

H. MUHAMMAD LUTFI, SE



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. A. Rifaid.

Jabatan : Sekretaris Dinas PP dan PA

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Drs. M. Saleh.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
  
Drs. M. SALEH.  
Nip. 19680119 199403 1 006

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK PERTAMA

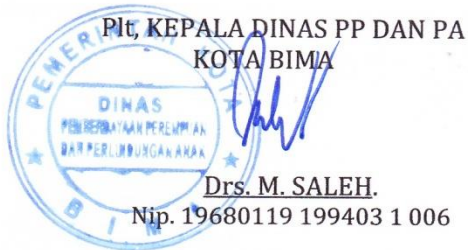
  
Drs. A. RIFAID.  
Nip. 19621231 199203 1 199

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	➤ Meningkatnya kelancaran administrasi pelayanan tugas dan fungsi Dinas PP dan PA Kota Bima	➤ Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan
2	➤ Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.	➤ Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan
3	➤ Tersedianya seragam pakaian dinas kantor	➤ Jumlah pegawai yang memakai seragam dinas lengkap	29 Orang
4	➤ Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	➤ Jumlah Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen dan 5 Laporan
5	➤ Sosialisasi Kesetaraan dan keadilan gender dan Sosialisasi Perwali PA di 5 Wilayah Kecamatan	➤ Adanya Sosialisasi Perwali PA di 5 Wilayah Kecamatan	1 Perwali PP
6	➤ Sosialisasi kegiatan penguatan pengarusutamaan gender dan Anak	➤ Meningkatnya SDM tingkat SKPD dalam PPRG ( perencanaan penganggaran yang responsif gender	28 SKPD
7	➤ Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan	➤ Jumlah data KDRT di lima kecamatan se kota Bima	5 Kecamatan
8	➤ Perang serta perempuan dalam sektor pembangunan	➤ Jumlah Organisasi Perempuan dan	48 Organisasi perempuan

<b>Program :</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 475.806.500,-	
Program peningkatan sarana dan prasarana	Rp. 62.420.000,-	
2 aparatur		
3 Program Peningkatan disiplin Aparatur	Rp. 22.760.000,-	
Program Peningkatan dan Pengembangan	Rp. 138.245.000,-	
4 Sistim Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan		
Program Keserasian kebijakan peningk.	Rp. 101.600.000,-	
5 kualitas Anak & Perempuan.		
Program Penguatan Kelembagaan	Rp. 476.295.500,-	
6 Pengarusutamaan Gender dan Anak		
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan	Rp. 387.091.000,-	
7 Perlindungan Perempuan		
Program Peningkatan Peran Serta dan	Rp. 177.132.000,-	
8 Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		

**Kota Bima, Januari 2019**



Pt, KEPALA DINAS PP DAN PA  
KOTA BIMA

Drs. M. SALEH.

Nip. 19680119 199403 1 006

SEKRETARIS DINAS PP DAN PA

Drs. A. RIFAID.

Nip. 19621231 199203 1 199



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maksum, SE.


Jabatan : Kabid. Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan khusus Anak  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. M. Saleh.

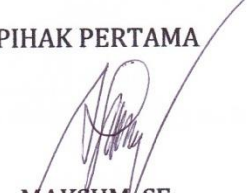
Jabatan : Plt. Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
PIHAK KEDUA  
Drs. M. SALEH.  
Nip. 19680119 199403 1 006

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK PERTAMA  
  
MAKSUM, SE.  
Nip. 19620606 198503 1 025

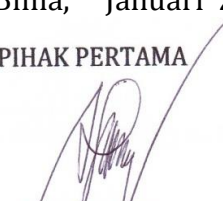
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Sosialisai dan pelatihan Peningkatan SDM bagi Kader P2TP2A	Jumlah peserta P2TP2A yang berkualitas pada 5 Kecamatan	40 Orang
2.	Pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Jumlah Laporan Tertanganinya perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta eksploitasi dan penelantaran lainnya terhadap anak	50 Orang
3.	Pelatihan peningkatan Kualitas dalam pelayanan dan pendampingan KDRT	Jumlah Peserta Pelatihan SDM dalam pelayanan dan pendampingan KDRT	40 Orang
4.	Data dan Pelaporan KDRT yang terkumpul	Jumlah Data KDTR	40 Orang
5.	Peserta pelatihan dalam teknis pengumpulan data kekerasan khusus anak	Jumlah data kekerasan khusus anak	40 Orang
6.	Peserta pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Pencacatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak yang akurat	120 Orang
7.	Pertemuan dialog warga tentang (PUP) pendewasaan Usia Pernikahan dalam upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah peserta dan Adanya kesepakatan peserta dalam membuat aturan kelurahan tentang PUP.	130 Orang

Program :	Anggaran	Keterangan
1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 35.708.000,-	
2 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Rp. 387.091.000,-	

Kota Bima, Januari 2019


  
 PIHAK KEDUA  
  
**Drs. M. SALEH.**  
 Nip. 19680119 199403 1 006

PIHAK PERTAMA  
  
**MAKSUM, SE.**  
 Nip. 19620606 198503 1 025



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rasnaidah, SE.

Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. M. Saleh.


Jabatan : Plt. Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA  
  
Drs. M. SALEH.  
Nip. 19680119 199403 1 006

PIHAK PERTAMA  
  
RASNAIDAH, SE  
Nip. 19640605 198602 2 011



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Capaian Kriteria Kota Layak Anak	1. Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak	24 Indikator KLA
2.	Pendataan Kelompok anak di Luar Sekolah	2. Jumlah Kelompok PATBM	13 Kelompok PATBM
3.	Kelompok Forum anak	3. Jumlah kelompok Forum anak	3 Kelompok Forum Anak
4.	Anak Bermasalah dan potensi partisipasi anak	4. Jumlah Buku Pofil Anak	41 Buku Pofil Anak
5.	Pembinaan Koa Laya Anak	5. Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dibentuk	7 Puskesmas Ramah Anak

**Program :**

**Anggaran**


**Keterangan**

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Rp. **340.594.500**

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA



**Drs. M. SALEH.**  
Nip. 19680119 199403 1 006

PIHAK PERTAMA



**RASNDAH, SE**  
Nip. 19640605 198602 2 011



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Muhtar.

Jabatan : Kasi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rasnaidah, SE.

Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

Rasnaidah, SE.

NIP. 19640605 198602 2 011

PIHAK PERTAMA,

Drs. Muhtar.

NIP. 19641231 199103 1 184


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pembentukan PATBM Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelompok PATBM	13 Kelompok PATBM
2.	Hari Anak Tingkat Kota Bima	Jumlah Duta Forum anak	3 Orang
3.	Desa/kelurahan layak anak	Jumlah Desa/kelurahan layak anak	1 desa /kelurahan

Kegiatan :	Anggaran	Keterangan
1. Pengembangan Sistim Informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam sekolah	46.499.000	
2. Penguatan Kelompok Forum anak	Rp. 113.191.000,-	
3. Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak anak	Rp. 35.718.500,-	

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,  
  
Rasnaidah, SE.  
 NIP. 19640605 198602 2 011

PIHAK PERTAMA,  
  
 Drs. Muhtar.  
 NIP. 19641231 199103 1 184



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agustina, SE

Jabatan : Kasi Pemberdayaan.Perempuan dan Gender

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. M. Saleh.


Jabatan : Plt. Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA  
  
Drs. M. SALEH.  
Nip. 19680119 199403 1 006

PIHAK PERTAMA


  
AGUSTINAH, SE.  
Nip. 19610817 198401 2 202

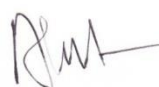
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pembinaan organisasi perempuan dan peringatan hari Ibu	- Jumlah peserta pembinaan Organisasi Perempuan - Jumlah Organisasi di kota Bima	40 Orang 32 Orang
2	Kelompok Kader PUG di kelurahan se Kota Bima	- Jumlah kader PUG di Kota Bima	60 Orang
3	Pelatihan PPRG kasubang Perencanaan di seluruh OPD	- Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	30 OPD
4.	Peserta pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan	- Jumlah serta pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan	40 Orang
5.	Kelompok Fokal Ponit PUG.	- Jumlah data SKPD terpilah yang responsif gender	28 SKPD
6.	Peserta pelatihan kewirausahaan kelompok Usaha Ekonomi	- Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan EX TKI. - Jumlah alat produksi Kue	112 Orang 28 paket

Kegiatan :	Anggaran	Keterangan
1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Rp. 138.423.500,-	
2 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender PP	Rp. 22.888.500,-	
3 Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan	Rp. 26.216.000,-	
4 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Rp. 23.126.500,-	
5 Evaluasi pelaksanaan PUG	Rp. 26.262.000,-	
6 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Rp. 208.537.500,-	

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA  
  
 Drs. M. SALEH.  
 Nip. 19680119 199403 1 006

PIHAK PERTAMA  
  
 AGUSTINAH, SE.  
 Nip. 19610817 198401 2 202



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Eri Sensuarti.

Jabatan : Kasi. Data Kekerasan Perempuan dan Anak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Maksum, SE.

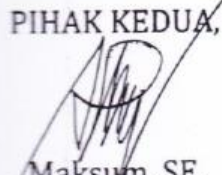
Jabatan : Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan perlindungan Khusus anak


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,  
  
Maksum, SE.  
NIP. 19620606 198503 1 025

PIHAK PERTAMA,  
  
Dra. Eri Sensuarti.  
Nip. 19630907 199303 2 005

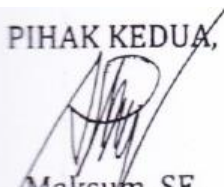
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

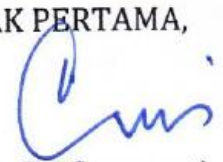
No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	- Jumlah pelatih Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	40 Orang
2.	Terlaksananya Pengumpulan data dan Pelaporan KDRT	- Jumlah data KDRT di lima Kecamatan se Koyta Bima	40 Orang
3.	Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan para peserta pelatihan dalam tehnik pengumpulan data kekerasan khusus anak	- Jumlah Data kekerasan khusus anak di tingkat kecamatan dan kota	40 Orang
4.	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman peserta tentang sistim pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak	- Adanya laporan terhadap sistim Catpor kekerasan perempuan dan anak secara falid	120 Orang

**Kegiatan :**

	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1 Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Rp. 35.928.500,-	
2 Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak perempuan dan Anak di daerah	Rp. 23.931.000,-	
3 Kegiatan Pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Rp. 19.664.500,-	
4 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Rp. 28.384.500,-	

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,  
  
Maksun, SE.  
NIP. 19620606 198503 1 025

PIHAK PERTAMA,  
  
Dra. Eri Sensuarti.  
Nip. 19630907 199303 2 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Aisyah, BA.

Jabatan : Kasi Hak Pendidikan dan Budaya

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rasnaidah, SE.

Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

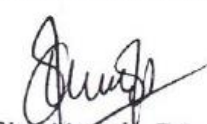
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,  
  
Rasnaidah, SE.  
NIP. 18640605 198602 2 011

PIHAK PERTAMA,  
  
Siti Aisyah, BA.  
NIP. 19611231 198608 2 006



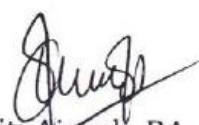
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	- Gugus tugas KLA Tingkat Kecamatan - Gugus tugas KLA Tingkat Kecamatan	- Jumlah Gugus Tugas Tingkat Kecamatan - Jumlah Gugus Tugas Tingkat Kecamatan	2 Kecamatan 3 Kelurahan
2.	Kelompok Forum Anak Tk.Kecamatan	Kelompok Forum Anak Tk.Kecamatan	3 Kelompok Forum Anak
3.	Anak Bermasalah dan potensi partisipasi anak	Jumlah Buku Pofil Anak	41 Buku Pofil Anak

**Kegiatan :**

	Anggaran	Keterangan
1 Pengembangan Kota sebagai Kota Layak Anak (KLA)	100,552.500	
Penguatan Kelompok Forum anak	Rp. 113.191.000,-	
2 Pemetaan Anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak	Rp. 44.633.500,-	

PIHAK KEDUA,  
  
Rasnaidah, SE.  
 NIP. 19640605 198602 2 011

Kota Bima, Januari 2019  
 PIHAK PERTAMA,  
  
 Siti Aisyah, BA.  
 NIP. 19611231 198608 2 006



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bunyamin. S. Pd.

Jabatan : Kasubag Perencana dan Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. A. Rifaid.

Jabatan : Sekretaris Dinas PP dan PA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

Drs. A. Rifaid.

NIP. 19621231 199203 1 199

PIHAK PERTAMA,

Bunyamin. S. Pd.

NIP. 19660622 199003 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

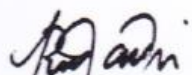
No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
I	➤ Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Jumlah Dokumen PPID yang harus disediakan.	1 Dokumen
2	➤ Terlaksananya penyusunan laporan Semester sesuai ketentuan	- Jumlah Laporan Semester yang harus disediakan.	1 Laporan
3	➤ Tersedianya laporan keuangan akhir Tahun	- Jumlah Dokumen ahir tahun yang harus disediakan	1 Dokumen
4	➤ Tersusunnya RENSTRA/RENJA/RKA/DPA/DPPA sesuai ketentuan	- Jumlah Dokumen Renstra/Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA tahun yang harus disediakan	5 Dokumen
5	➤ Tersusunnya Dokumen LKIP, LPJ dan LPPD	- Jumlah Dokumen LKIP, LPJ dan LPPD yang sesuai ketentuan	2 Dokumen

**Kegiatan :**

	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 31.120.000,-	
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	Rp. 9.082.500,-	
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 8.880.500,-	
4 Penyusunan Renstra/Rencana Kerja/ RKA/DPA /DPPA SKPD	Rp. 69.665.000,-	
5 Penyusunan LAKIP. LPJ. dan LPPD	Rp. 20.497.500,-	

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

  
 Drs. A. Rifaid.

NIP. 19621231 199203 1 199

PIHAK PERTAMA,



Bunyamin. S. Pd.

NIP. 19660622 199003 1 010



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Astuti, S. Sos,

Jabatan : Kasi Pemberdayaan.Perempuan dan Gender bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi.

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. M. Saleh.

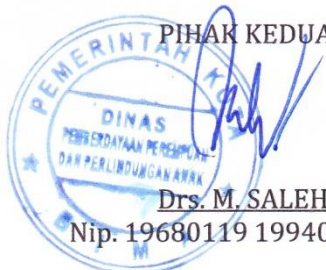
Jabatan : Plt. Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA  
  
Drs. M. SALEH.  
Nip. 19680119 199403 1 006

PIHAK PERTAMA  
  
Sri. ASTUTI, S. Sos.  
Nip. 19621231 198203 2 300

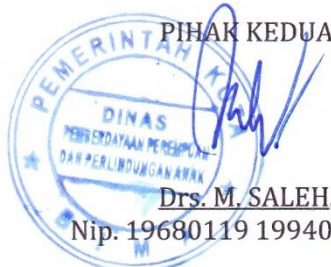
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Adfokasi peningkatan dan memperluas jaringan kelembagaan Perempuan	- Jumlah Lembaga yang mengikuti adfokasi peningkatan dan memperluas jaringan kelembagaan Perempuan	40 Orang
2	➤ pembinaan organisasi perempuan dan peringatan hari Ibu	- Jumlah peserta pembinaan Organisasi Perempuan - Jumlah Organisasi di kota Bima	40 Orang 32 Orang

Kegiatan :	Anggaran	Keterangan
1 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Rp. 23.126.500,-	
3 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Rp. 138.423.500,-	


Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA



Drs. M. SALEH.  
Nip. 19680119 199403 1 006

PIHAK PERTAMA



Sri. ASTUTI, S. Sos.  
Nip. 19621231 198203 2 300



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Fatmah.

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. A. Rifaid.

Jabatan : Sekretaris Dinas PP dan PA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

Drs. A. Rifaid.

NIP. 19621231 199203 1 199

PIHAK PERTAMA,

Siti Fatmah

NIP. 19621231 198602 2 041

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	➤ Meningkatnya kelancaran administrasi pelayanan tugas dan fungsi Dinas PP dan PA Kota Bima	➤ Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%
2	➤ Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.	➤ Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100.00%
3	➤ Meningkatnya Disiplin Aparatur	➤ Jumlah pegawai yang memperoleh pakaian dinas	29 Orang
4	➤ Meningkatnya operasional kendaraan dinas	➤ Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	11 Unit Kend. Roda dua dan 1 unit kend. Roda 4
5	➤ Adanya Peningkatnya perlengkapan gedung kantor	➤ Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpeliharanya	5 Unit
6	➤ Meningkatnya dan Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	➤ Jumlah peralatan kantor yang Terpeliharanya	10 Unit
7	➤ Tersedianya seragam pakaian dinas kantor	1. Jumlah pegawai yang memakai seragam dinas lengkap	100%

Kegiatan :	Anggaran	Keterangan
1 Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 44.940.000,-	
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 6.600.000,-	
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB	Rp. 74.950.000,- Rp. 37.848.000,-	
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 23.490.000,-	
5 Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 44.266.000,-	
6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 33.370.000,-	
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 3.470.000,-	
8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Rp. 6.000.000,-	
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 27.065.000,-	
10 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Rp. 26.100.000,- Rp. 145.207.500,-	
11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 44.520.000,-	
12 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp. 4.250.000,-	
13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp. 13.650.000,-	
14 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp. 22.760.000,-	

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,



Drs. A. Rifaid.

NIP. 19621231 199203 1 199

PIHAK PERTAMA,



Siti Fatmah

NIP. 19621231 198602 2 041





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Suryani Muhammad.

Jabatan : Kasi. Perlindungan Perempuan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Maksum, SE.

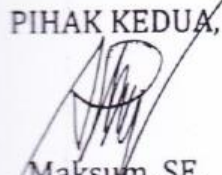
Jabatan : Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan perlindungan Khusus anak


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,  
  
Maksum, SE.  
NIP. 19620606 198503 1 025

PIHAK PERTAMA,  
  
Dra. Suryani Muhammad  
Nip. 19610910 198903 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Fungsi Koordinasi melalui dialog warga PUP( pendewasaan Usia Perkawinan) dalam upaya memfasilitasi perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	- Jumlah Data kesepakatan organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistim perlindungan anak melalui aturan tentang PUP	130 Orang

**Kegiatan :**


1 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan Rp. 70.645.000,-

**Anggaran**

**Keterangan**

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,  
  
 Maksun, SE.  
 NIP. 19620606 198503 1 025

PIHAK PERTAMA,  
  
Dra. Suryani Muhammad  
 Nip. 19610910 198903 2 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anhar, SH.

Jabatan : Kasi. Perlindungan Khusus anak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Maksum, SE.

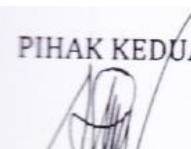
Jabatan : Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan perlindungan Khusus anak


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,  
  
Maksum, SE.  
NIP. 19620606 198503 1 025


PIHAK PERTAMA,  
  
Anhar, SH.  
Nip. 19641231 198903 1 307


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Sosialisai dan pelatihan Peningkatan SDM bagi Kader P2TP2A	Jumlah peserta P2TP2A yang berkualitas pada 5 Kecamatan	40 Orang
2.	Pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Jumlah Laporan Tertanganinya perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta eksploitasi dan penelantaran lainnya terhadap anak	50 Orang

Kegiatan :	Anggaran	Keterangan
1 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A	Rp. 34.140.000,-	
2 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Rp. 25.956.500,-	

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,  
  
 Maksum, SE.  
 NIP. 19620606 198503 1 025

PIHAK PERTAMA,  
  
 Anhar, SH.  
 Nip. 19641231 198903 1 307



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ilham, SKM.

Jabatan : Kasi Kesehatan Dasar dan kesejahtraan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rasnaidah, SE.

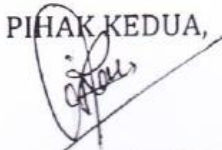
Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

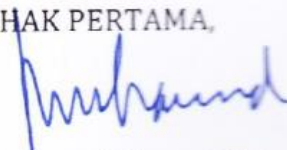
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,  
  
Rasnaidah, SE.  
NIP. 19640605 198602 2 011

PIHAK PERTAMA,  
  
Muhammad Ilham, SKM.  
NIP. 19711212 199803 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	- Terlaksananya Sosialisasi Anak Sekolah terhadap bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS pada anak usia sekolah  - Sosialisasi Kota Layak anak Tingkat Kelurahan	- Jumlah Anak Sekolah yang memahami bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS pada anak usia sekolah  Indikator KLA Tingkat Kelurahan	100 Orang  10 kelurahan
2.	Pembinaan Koa Laya Anak	- Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dibentuk	7 Puskesmas Ramah Anak

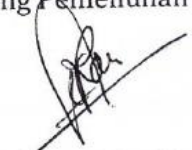
**Kegiatan :**

**Anggaran**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Pengembangan Kota sebagai Kota Layak Anak (KLA)                 | 100,552.500      |
| - Peserta keg. Penyuluhan dan penanggulangan Narkoba,PMS, HIV AIDS | Rp. 20.110.500   |
| 2. Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak anak                       | Rp. 35.718.500,- |

Kota Bima, Januari 2019

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

  
Rasnaidah, SE.

NIP. 19640605 198602 2 011

Kasi Kesehatan Dasar dan  
kesejahteraan

  
Muhammad Ilham, SKM.

NIP. 19711212 199803 1 010



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. St. Atika, S. Sos.

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Perempuan dan gender Bidang Sosial Politik Dan Hukum.

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. M. Saleh.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



Drs. M. SALEH.  
Nip. 19680119 199403 1 006



Kota Bima, Januari 2019

PIHAK PERTAMA



HJ. ST. ATIKA, S. SOS  
NIP. 19651231 199103 2 101


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	➤ pembinaan organisasi perempuan dan peringatan hari Ibu	- Jumlah peserta pembinaan Organisasi Perempuan - Jumlah Organisasi di kota Bima	40 Orang 32 Orang
2.	➤ Pelatihan kesetaraan Gender Kader Partai Politik	- Jumlah Kader Politik	60 Orang
4.	➤ Penyusunan Perwali Perlindungan Perempuan	- Jumlah Perwali Perlindungan Perempuan	1 perwali

Kegiatan :	Anggaran	Keterangan
1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Rp. 138.423.500,-	
2 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender	Rp. 38.708.500,-	
3 Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	Rp. 78.711.500,-	


Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA



**Drs. M. SALEH.**  
Nip. 19680119 199403 1 006

PIHAK PERTAMA



**HJ. ST. ATIKA, S. SOS**  
NIP. 19651231 199103 2 101





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosita,SE.

Jabatan : Staf Kasi Kesehatan Dasar dan kesejahtraan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Ilham, SKM..

Jabatan : Kasi Kesehatan Dasar dan kesejahtraan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

Muhammad Ilham, SKM.  
NIP. 19711212 199803 1 010

PIHAK PERTAMA,

Rosita, SE.  
NIP. 19811125 200060 2 019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

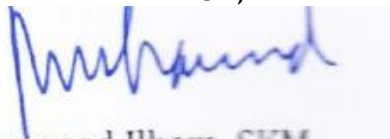
No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	- Terlaksananya Sosialisasi Anak Sekolah terhadap bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS pada anak usia sekolah  - Sosialisasi Kota Layak anak Tingkat Kelurahan	- Jumlah Anak Sekolah yang memahami bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS pada anak usia sekolah  Indikator KLA Tingkat Kelurahan	100 Orang  10 kelurahan
2.	Pembinaan Koa Laya Anak	- Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dibentuk	7 Puskesmas Ramah Anak

**Kegiatan :**

	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Pengembangan Kota sebagai Kota Layak Anak (KLA)	100,552.500	
- Peserta keg. Penyuluhan dan penanggulangan Narkoba, PMS, HIV AIDS	Rp. 20.110.500	
2. Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak anak	Rp. 35.718.500,-	

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,



Muhammad Ilham, SKM.  
NIP. 19711212 199803 1 010

PIHAK PERTAMA,



Rosita, SE.  
NIP. 19811125 200060 2 019



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yenny Nurlinda, SE.

Jabatan : Staf Pemberdayaan Perempuan dan gender Bidang Sosial Politik Dan Hukum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Siti Atika, S. Sos.

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Perempuan dan gender Bidang Sosial Politik dan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

Hj. Siti Atika, S. Sos

NIP. 19651231 199103 2 101

PIHAK PERTAMA,

Yenny Nurlinda, SE

NIP. 19820708 201001 2 015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	➤ pembinaan organisasi perempuan dan peringatan hari Ibu	- Jumlah peserta pembinaan Organisasi Perempuan - Jumlah Organisasi di kota Bima	40 Orang 32 Orang
2.	➤ Pelatihan kesetaraan Gender Kader Partai Politik	- Jumlah Kader Politik	60 Orang
4.	➤ Penyusunan Perwali Perlindungan Perempuan	- Perwali Perlindungan Perempuan	1 perwali

Kegiatan :	Anggaran	Keterangan
1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Rp. 138.423.500,-	
2 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender	Rp. 38.708.500,-	
3 Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	Rp. 78.711.500,-	

Kota Bima, Januari 2019

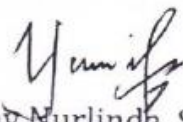
PIHAK KEDUA,



Hj. Siti Atika, S. Sos

NIP. 19651231 199103 2 101

PIHAK PERTAMA,



Yenny Nurlinda, SE

NIP. 19820708 201001 2 015



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurrahayu, A. Md.

Jabatan : Bendahara Pembantu Pengeluaran (Gaji)

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bunyamin. S. Pd.

Jabatan : Kasubag Perencana dan Keuangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

Bunyamin. S. Pd.

NIP. 19660622 199003 1 010

PIHAK PERTAMA,

Nurrahayu, A. Md.

NIP. 19681231 200501 2 069

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
I	➤ Menyiapkan Daftar gaji dan membayarkan Gaji dan Tunjangan Pegawai Dinas PP - PA	➤ Jumlah Gaji dan tunjangan Pegawai Dinas PP-PA Kota Bima	12 Bulan

**Kegiatan :**

**Anggaran**

**Keterangan**

- 1 Gaji dan Tunjangan Pegawai Dinas PP dan PA Kota Bima Rp. 1.855.322.430,21

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,



Bunyamin. S. Pd.

NIP. 19660622 199003 1 010

PIHAK PERTAMA,



Nurrahayu. A. Md.

NIP. 19681231 200501 2 069



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuyun Trisnawati, SE

Jabatan : Bendahara Pengurus Barang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Siti Fatmah

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

Siti Fatmah

NIP. 19621231 198602 2 041

PIHAK PERTAMA,

Yuyun Trisnawati, SE

NIP. 19781018 200312 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	➤ Menyiapkan faktur pajak kendaraan dinas dan Tersedianya jasa pemeliharaan Kendaraan dan terbayarnya operasional supir	➤ Jumlah Pajak kendaraan dan STNK	11 Unit Kend. Roda dua dan 1 unit kend. Roda 4
2	➤ Adanya Peningkatnya perlengkapan gedung kantor	➤ Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpeliharanya	5 Unit
3	➤ Menyiapkan faktur bahan bakar minyak dan Meningkatkan operasional kendaraan dinas	➤ Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	11 Unit Kend. Roda dua dan 1 unit kend. Roda 4
4	➤ Menyiapkan bahan dan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	➤ Jumlah Peralatan Kantor	10 Unit
5	➤ Menyiapkan dan Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	➤ Jumlah peralatan kantor yang Terpeliharanya	10 Unit

**Kegiatan :**

	Anggaran	Keterangan
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB	Rp. 74.950.000,-	
2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Rp. 6.000.000,-	
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 44.520.000,-	
4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp. 4.250.000,-	
5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp. 13.650.000,-	

Kota Bima, Januari 2019

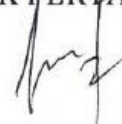
PIHAK KEDUA,



Siti Fatmah

NIP. 19621231 198602 2 041

PIHAK PERTAMA,



Yuyun Trisnawati, SE

NIP. 19781018 200312 2 008





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yeni Rahmah, S. Sos.

Jabatan : Bendahara pengeluaran

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bunyamin, S. Pd.

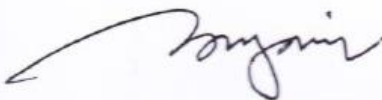
Jabatan : Kasubag Perencana dan Keuangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,  
  
Bunyamin, S. Pd.  
NIP. 19660622 199003 1 010


Kota Bima, Januari 2018  
PIHAK PERTAMA,  
  
Yeni Rahmah, S. Sos.  
NIP. 19820708 201001 2 015


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	➤ Menyiapkan administrasi pelayanan untuk kelancaran Perkantoran	➤ Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%
2	➤ Mempersiapkan data Sarana dan Prasarana Aparatur.	➤ Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100.00%
3	➤ Menyiapkan faktur bahan bakar minyak dan Meningkatnya operasional	➤ Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10 Unit Kend. Roda dua dan 1 unit kend. Roda 4
4	➤ Menyiapkan perlengkapan gedung kantor	➤ Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpeliharanya	5 Unit
5	➤ Menyiapkan dan meyediakan jasa pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	➤ Jumlah peralatan kantor yang Terpeliharanya	10 Unit
6	➤ Menyiapkan dan meyediakan anggaran seragam pakaian dinas kantor	➤ Persentase pegawai yang memakai seragam dinas lengkap	100%
7	➤ Menyiapkan dan meyediakan anggaran Kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan	1. Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%

Kegiatan :	Anggaran	Keterangan
1 Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 44.940.000,-	
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 6.600.000,-	
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Rp. 74.950.000,-	
4 Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB	Rp. 37.848.000,-	
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 23.490.000,-	
6 Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 44.266.000,-	
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 33.370.000,-	
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 3.470.000,-	
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Rp. 6.000.000,-	
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 27.065.000,-	
11 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Rp. 26.100.000,- Rp. 145.207.500,-	
12 Daerah		
13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 44.520.000,-	
14 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp. 4.250.000,-	
15 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp. 13.650.000,-	
16 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp. 22.760.000,-	

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,  
  
Bunyamin. S. Pd.  
 NIP. 19660622 199003 1 010

Kota Bima, Januari 2018  
 PIHAK PERTAMA,  
  
Yeni Rahmah, S. Sos.  
 NIP. 19820708 201001 2 015



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rini Ayu Ningsih.

Jabatan : Staf Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Siti Fatmah.

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

Siti Fatmah.

NIP. 19621231 198602 2 041

PIHAK PERTAMA,

Rini Ayu Ningsih

NIP. 19840816 201406 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	➤ Meningkatnya kelancaran administrasi pelayanan tugas dan fungsi Dinas PP dan PA Kota Bima	➤ Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%
2	➤ Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.	➤ Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100.00%
3	➤ Meningkatnya Disiplin Aparatur	➤ Jumlah pegawai yang memperoleh pakaian dinas	29 Orang
4	➤ Meningkatnya operasional kendaraan dinas	➤ Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	11 Unit Kend. Roda dua dan 1 unit kend. Roda 4
5	➤ Adanya Peningkatnya perlengkapan gedung kantor	➤ Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpeliharanya	5 Unit
6	➤ Meningkatnya dan Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	➤ Jumlah peralatan kantor yang Terpeliharanya	10 Unit
7	➤ Tersedianya seragam pakaian dinas kantor	1. Jumlah pegawai yang memakai seragam dinas lengkap	100%

<b>Kegiatan :</b>	<b>Anggaran</b>
1 Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 44.940.000,-
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 6.600.000,-
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Rp. 74.950.000,-
4 Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB	Rp. 37.848.000,-
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 23.490.000,-
6 Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 44.266.000,-
7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 33.370.000,-
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 3.470.000,-
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Rp. 6.000.000,-
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 27.065.000,-
11 Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 26.100.000,-
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Rp. 145.207.500,-
15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 44.520.000,-
16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp. 4.250.000,-
17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp. 13.650.000,-
18 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp. 22.760.000,-

Kota Bima, Januari 2019

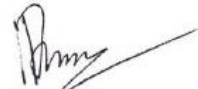
Kasubag Umum dan  
Kepegawaian



Siti Fatmah.

NIP. 19621231 198602 2 041

Staf Kasubag Umum dan  
Kepegawaian



Rini Ayu Ningsih

NIP. 19840816 201406 2 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hairul

Jabatan : Staf Kasi. Data Kekerasan Perempuan dan Anak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Eri Sensuarti.

Jabatan : Kasi. Data Kekerasan Perempuan dan Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

Dra. Eri Sensuarti.

Nip. 19630907 199303 2 005

PIHAK PERTAMA,

Hairul.

Nip. 19791231 200801 1 059

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**


No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	- Jumlah pelatih Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	40 Orang
2.	Terlaksananya Pengumpulan data dan Pelaporan KDRT	- Jumlah data KDRT di lima Kecamatan se Koyta Bima	40 Orang
3.	Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan para peserta pelatihan dalam tehnik pengumpulan data kekerasan khusus anak	- Jumlah Data kekerasan khusus anak di tngkat kecamatan dan kota	40 Orang
4.	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman peserta tentang sistim pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak	- Adanya laporan terhadap sistim Catpor kekerasan perempuan dan anak secara falid	120 Orang

**Kegiatan :**

	Anggaran	Keterangan
1 Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Rp. 35.928.500,-	
2 Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak perempuan dan Anak di daerah	Rp. 23.931.000,-	
3 Kegiatan Pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Rp. 19.664.500,-	
4 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Rp. 28.384.500,-	

Kota Bima, Januari 2019

PIHAK PERTAMA,

  
**Dra. Eri Sensuarti.**  
 Nip. 19630907 199303 2 005

  
**Hairul.**  
 Nip. 19791231 200801 1 059




**CASCADING SASARAN STRATEGIS DINAS PP DAN PA KOTA BIMA TAHUN 2018**

NO	OPD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2018	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatkan partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Prosentase Perempuan dalam Pembangunan	60,00%	<b>Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan</b>	persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	60,00%	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>	Meningkatnya pembinaan organisasi perempuan dan kesetaraan gender	Persentase organisasi perempuan yang dibina	Pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan dan peringatan hari Ibu	Jumlah Organisasi Perempuan yang di bina	120.324.500	Bidang PP dan Gender
											<b>Pembentukan keompok dan pelatihan fasilitator pendidikan untuk perempuan</b>	Terlaksananya kegiatan pembentukan dan pelatihan terhadap organisasi perempuan	Jumlah kader Gender yang dibina	32.858.000	Bidang PP dan Gender
											<b>Pelatihan Pendidikan Kebangsaan berspektif Gender</b>	Terlaksananya kegiatan pelatihan terhadap organisasi perempuan (perempuan aktivis,Ormas,LSM,Kelompok Pemilih-Pemula disabilitas.	Jumlah Organisasi Perempuan	47.580.500	Bidang PP dan Gender
											<b>Sosialisasi Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS</b>	Terlaksananya Sosialisasi Anak Sekolah terhadap bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS pada anak usia sekolah	Jumlah Anak Sekolah yang mengikuti sosialisasi bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS pada anak usia sekolah	36.450.000,00	Bidang Pemenuhan Anak
				40,00%		persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	40,00%	<b>Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan</b>	Meningkatnya pemahaman perempuan tentang kesetaraan gender	Persentase perempuan yang berperspektif gender	<b>Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak</b>	Terlaksananya adfokasi peningkatan dan memperluas jaringan kelembagaan Perempuan	Jumlah Lembaga yang mengikuti adfokasi peningkatan dan memperluas jaringan kelembagaan Perempuan	14.688.000	Bidang PP dan Gender
											<b>Evaluasi pelaksanaan PUG</b>	Terlaksananya evaluasi Kelompok Fokal Point PUG Pada SKPD Lingkup Kota Bima	Jumlah Kelompok Fokal Point PUG Pada SKPD Lingkup Kota Bima	25.764.500	Bidang PP dan Gender
				12,00%		persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	12,00%	<b>Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan</b>	Meningkatnya pemahaman perempuan tentang kesetaraan gender	Persentase perempuan yang berperspektif gender	<b>Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan</b>	Terlaksananya proses penyusunan Perda Perlindungan Perempuan dan Perwali PA	Jumlah Perda Perlindungan Perempuan dan Perwali PA	116.511.000	Bidang PP dan Gender
											<b>Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender PP</b>	Menurunnya angka keserasian terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah data Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	14.375.500,00	Bidang PP dan Gender
				100,00%	<b>Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan</b>	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	100,00%	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio KDRT	<b>Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan hak Anak di daerah</b>	Meningkatnya Kualitas Anak serta kecerdasan tumbuh kembang anak	Adanya Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Hak-Hak Anak	23.751.000	Bidang Pemenuhan Anak

											<b>Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan</b>	Meningkatnya Fungsi Koordinasi dengan Lintas Sektor dalam sistim perlindungan anak pada 5 Kecamatan	Jumlah Data Potensi organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistim perlindungan anak pada 5 Kec.	21.849.000	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak		
											<b>Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT</b>	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta tentang sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan Anak	Jumlah data kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara Oneline.	33.772.000	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak		
											<b>Kegiatan Pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan</b>	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan terselesanya Kegiatan Dialog Warga	Adanya Laporan Tertanganinya perempuan terhadap tindak kekerasannya melakukan Dialog Warga	47.813.000	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak		
											<b>Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT</b>	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Adanya pemahaman pelatih Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	37.603.500	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak		
											<b>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan</b>	Meningkatkan pemahaman dan Keterampilan Masyarakat tentang perlindungan ketenaga kerja bagi perempuan serta pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi Keluarga	Jumlah ketenaga kerja bagi perempuan serta pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi Keluarga	107.225.000	Bidang PP dan Gender		
										<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	Meningkatnya penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak	Persentase lembaga perempuan yang dibina	<b>Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan</b>	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta (Organisasi Perempuan) tentang PUG.	Porsentase Jumlah Organisasi Perempuan yang memahami PUG	21.767.500	Bidang PP dan Gender
											<b>Fasilitasi pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2A</b>	Meningkatnya pembinaan terhadap kelembagaan P2TP2A Kota Bima	Jumlah kelompok P2TP2A pada 5 Kecamatan	35.708.000	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak		
											<b>Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan</b>	Meningkatnya Pemahaman dan kemampuan kelompok Perempuan EX TKI dalam memperluas usaha ekonomi produktif	Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan EX TKI	14.688.000	Bidang PP dan Gender		

											Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak	Meningkatnya kualitas data KDRT ke dalam kasus kekerasan Anak	Data Kekerasan Anak di 5 kecamatan	32.608.500	Bidang PP dan Gender
		Mewujudkan Kota layak anak	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Layak Anak	100%	Meningkatnya capaian kriteria Kota Layak Anak	Persentase capaian kriteria Kota Layak Anak	100%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya pemberdayaan anak dan remaja	Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif	Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	Persentase perempuan yang mengikuti sosialisasi perspektif gender	jumlah forum anak dan remaja	74.626.000	Bidang Pemenuhan Anak
													dokumen profil perlindungan anak		Bidang Pemenuhan Anak
											Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.	Adanya Data dan Informasi Kelompok Anak di dalam Sekolah	Jumlah Data dan Informasi Kelompok Anak di dalam Sekolah	32.608.500	Bidang Pemenuhan Anak
											Penguatan Kelompok Forum Anak	Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Pembentukan Kelompok Forum Anak Tk.Kecamatan	Jumlah Pertemuan Pembentukan Kelompok Forum Anak Tk.Kecamatan	57.961.500	Bidang Pemenuhan Anak
											Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak	Terlaksananya pembuatan Profil perlindungan anak 5 Kecamatan di Kota Bima	Jumlah Profil perlindungan anak 5 Kecamatan di Kota Bima	53.476.000	Bidang Pemenuhan Anak
											Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak	Terlaksananya capaian 27 Indikator KLA, rincian Pembagian Gugus Tugas KLA Tingkat Kecamatan,dan gugus tuga KLA Tk, Kelurahan,	Jumlah capaian 27 Indikator KLA, rincian Pembagian Gugus Tugas KLA Tingkat Kecamatan,dan gugus tuga KLA Tk, Kelurahan,	40.260.000	Bidang Pemenuhan Anak

KEPALA,  
DINAS PP DAN PA KOTA BIMA

  
Drs. M. Nur H. Amajid, M.P.  
NIP. 19650213 199203 1 011

**PENETAPAN IKU ESELON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA TAHUN 2018**

NO	KEPALA DINAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULA INDIKATOR	ESELON III	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	ESELON IV	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR	KET
1	Eselon II	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100 = \dots\%$	Kepala Bidang PP dan Gender	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya pembinaan organisasi perempuan dan kesetaraan gender	persentase organisasi perempuan yang dibina	$\frac{\text{jumlah organisasi perempuan yang dibina}}{\text{jumlah organisasi perempuan seluruhnya}} \times 100 = \dots\%$	Kepala Seksi PP dan Gender Bidang Ekonomi	Pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan dan peringatan hari Ibu	laporan pelaksanaan kegiatan	kumulatif organisasi yang dibina	
										Kepala Seksi PP dan Gender bidang sosial Politik dan Hukum	Pembentukan keompok dan pelatihan fasilitator pendidikan untuk perempuan	Terlaksananya kegiatan pembentukan dan pelatihan terhadap organisasi perempuan	laporan pelaksanaan kegiatan	kumulatif organisasi yang dibina	
										Kepala Seksi PP dan Gender bidang sosial Politik dan Hukum	Pelatihan Pendidikan Kebangsaan berspektif Gender	Terlaksananya kegiatan pelatihan terhadap organisasi perempuan (perempuan aktivis, Ormas, LSM, Kelompok Pemilih-Pemula disabilitas.	laporan pelaksanaan kegiatan	kumulatif organisasi yang dibina	
										Kepala Seksi Kesehatan dasar dan kesejahteraan	Sosialisasi Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	Terlaksananya Sosialisasi Anak Sekolah terhadap bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS pada anak usia sekolah	Jumlah Anak Sekolah yang mengikuti sosialisasi bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS pada anak usia sekolah	Kumulatif Anak Sekolah yang mengikuti sosialisasi bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS pada anak usia sekolah	
			persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga Swasta}}{\text{Jumlah pekerja perempuan Swasta}} \times 100 = \dots\%$	Kepala Bidang PP dan Gender	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya program kegiatan penguatan pengarusutamaan agender dan Anak	Persentase perempuan yang mengikuti sosialisasi perspektif gender	$\frac{\text{jumlah peserta sosialisasi}}{\text{jumlah perempuan usia 20 tahun keatas}} \times 100 = \dots\%$	Kepala Seksi PP dan Gender Bidang Kualitas Keluarga data dan Informasi	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya adfokasi peningkatan dan memperluas jaringan kelembagaan Perempuan	Jumlah Lembaga yang mengikuti adfokasi peningkatan dan memperluas jaringan kelembagaan Perempuan	Kumulatif Lembaga yang mengikuti adfokasi peningkatan dan memperluas jaringan kelembagaan Perempuan	
										Kepala Seksi PP dan Gender Bidang Ekonomi	Evaluasi pelaksanaan PUG	Terlaksananya evaluasi Kelompok Fokal Point PUG Pada SKPD Lingkup Kota Bima	Jumlah Kelompok Fokal Point PUG Pada SKPD Lingkup Kota Bima	Kumulatif Kelompok Fokal Point PUG Pada SKPD Lingkup Kota Bima	

			persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	Pekerja perempuan di lembaga Legislatif ...x100%=...% Jumlah pekerja perempuan Legislatif..... Org	Kepala Bidang PP dan Gender	<b>Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan</b>	Meningkatnya pemahaman perempuan tentang kesetaraan gender	Persentase perempuan yang mengikuti sosialisasi perspektif gender		Kepala Seksi PP dan Gender bidang sosial Politik dan Hukum	<b>Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan</b>	Terlaksananya proses penyusunan Perda Perlindungan Perempuan dan Perwali PA	Jumlah Perda Perlindungan Perempuan dan Perwali PA	Jumlah Perda Perlindungan Perempuan dan Perwali PA	
										Kepala Seksi PP dan Gender Bidang Ekonomi	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender PP	Menurunnya angka keserasian terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah data Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Kumulatif Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	
2		<b>Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan</b>	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	<u>Pekerja pengaduan/laporan yang di selesaikan oleh unit pelayanan terpadu</u> ...x100%=...% Jumlah pengaduan/laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu..... Org	Kepala Bidang PP dan Gender Serta (Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak)	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio KDRT	Kumulatif	Kepala Seksi Hak Pendidikan dan Budaya	<b>Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan hak Anak di daerah</b>	Meningkatnya Kualitas Anak serta kecerdasan tumbuh kembang anak	Adanya Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Hak-Hak Anak	kumulatif tumbuh kembang anak (TKA) yang sosialisasi	
										Kepala Seksi Perlindungan Perempuan	<b>Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan</b>	Meningkatnya Fungsi Koordinasi dengan Lintas Sektor dalam sistim perlindungan anak pada 5 Kecamatan	Jumlah Data Potensi organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistim perlindungan anak pada 5 Kec.	kumulatif Data Potensi organisasi dan Lembaga masyarakat	
										Kepala Seksi Data kekerasan Perempuan dan anak	<b>Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT</b>	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta tentang sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan Anak	Jumlah data kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara Oneline.	kumulatif data kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara Oneline.	
										Kepala Seksi Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak	<b>Kegiatan Pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan</b>	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan terselesanya Kegiatan Dialog Warga	Adanya Laporan Tertanganinya perempuan terhadap tindak kekerasannya melakukan Dialog Warga	kumulatif Laporan tindak kekerasan perempuan dan anak serta melakukan Dialog Warga	
										Kepala Seksi Data kekerasan Perempuan dan anak	<b>Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT</b>	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Adanya pemahaman pelatih Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Kumulatif pelatih Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	

										Kepala Seksi PP dan Gender bidang Ekonomi	<b>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan</b>	Meningkatkan pemahaman dan Keterampilan Masyarakat tentang perlindungan ketenaga kerja bagi perempuan serta pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi Keluarga	Jumlah ketenaga kerja bagi perempuan serta pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi Keluarga	Kumulatif ketenaga kerja bagi perempuan serta pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi Keluarga	
					<b>Kepala Bidang PP dan Gender</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	Meningkatnya penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak	Persentase Imbaga perempuan yang dibina	Kumulatif	Kepala Seksi PP dan Gender bidang Ekonomi	<b>Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan</b>	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta (Organisasi Perempuan) tentang PUG.	Porsentase Jumlah Organisasi Perempuan yang memahami PUG	Kumulatif Jumlah Organisasi Perempuan	
										Kepala Seksi Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak	<b>Fasilitasi pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2A</b>	Meningkatnya pembinaan terhadap kelembagaan P2TP2A Kota Bima	Jumlah kelompok P2TP2A pada 5 Kecamatan	Kumulatif Jumlah kelompok P2TP2A	
										Kasi. Perem. Dan Gend. Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	<b>Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan</b>	Meningkatnya Pemahaman dan kemampuan kelompok Perempuan EX TKI dalam memperluas usaha ekonomi produktif	Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan EX TKI	Kumulatif Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan EX TKI	
										Kepala Seksi Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak	<b>Pengembangan Sestim Informasi Gender dan Anak</b>	Meningkatnya kualitas data KDRT ke dalam kasus kekerasan Anak	Data Kekerasan Anak di 5 kecamatan	Kumulatif Jumlah Kasus kekerasan	
		<b>Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak</b>	<b>Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak</b>	<b>Jumlah indikator kota layak anak yang terpenuhi ....x 100 % = ...% total indikator kota layak anak (31 indikator).....</b>	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	Meningkatnya pemberdayaan anak dan remaja	Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif	<b>Jumlah leompok Forum Anak yang aktif ....x 100 % = ...% Jumlah leompok Forum Anak yang Ada.....</b>	Kepala Seksi Hak Sipil, Infor. dan Partisipasi.	<b>Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)</b>	Persentase perempuan yang mengikuti sosialisasi perspektif gender	jumlah forum anak dan remaja	Kumulatif kelompok jumlah forum anak dan remaja	
													dokumen profil perlindungan		
										Kepala Seksi Kesehatan dasar dan kesejahteraan	<b>Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.</b>	Adanya Data dan Informasi Kelompok Anak di dalam Sekolah	Jumlah Data dan Informasi Kelompok Anak di dalam Sekolah	Kumulatif Data dan Informasi Kelompok Anak di dalam Sekolah	
										Kepala Seksi Hak Pendidikan dan Budaya	<b>Penguatan Kelompok Forum Anak</b>	Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Pembentukan Kelompok Forum Anak Tk. Kecamatan	Jumlah Pertemuan Pembentukan Kelompok Forum Anak Tk. Kecamatan	Kumulatif Pertemuan Pembentukan Kelompok Forum Anak Tk. Kecamatan	

											Kepala seksi Data kekerasan Perempuan dan anak	<b>Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak</b>	Terlaksananya pembuatan Profil perlindungan anak 5 Kecamatan di Kota Bima	Jumlah Profil perlindungan anak 5 Kecamatan di Kota Bima	Kumulatif pembuatan Profil perlindungan anak 5 Kecamatan di Kota Bima	
											Kepala Seksi Hak Sipil, Infor. dan Partisipasi.	<b>Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak</b>	Terlaksananya capaian 27 Indikator KLA, rincian Pembagian Gugus Tugas KLA Tingkat Kecamatan, dan gugus tuga KLA Tk, Kelurahan,	Jumlah capaian 27 Indikator KLA, rincian Pembagian Gugus Tugas KLA Tingkat Kecamatan, dan gugus tuga KLA Tk, Kelurahan,	Kumulatif capaian 27 Indikator KLA, rincian Pembagian Gugus Tugas KLA Tingkat Kecamatan, dan gugus tuga KLA Tk, Kelurahan,	

KEPALA,  
 DINAS PP DAN PA KOTA BIMA  
  
**Drs. M. Nur H. Amaid, M.P.**  
 NIP. 19650213 199203 1 011


**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA TAHUN 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2018	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penganggung jawab	Pelaksana	Lokasi	Ket
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	60,00%	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	persentase organisasi perempuan yang dibina	Pembinaan organisasi perempuan	laporan pelaksanaan kegiatan	Triwulan II, IV	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender Bidang Ekonomi	Kota Bima	
						Pembentukan keompok dan pelatihan fasilitator pendidikan untuk perempuan	laporan pelaksanaan kegiatan	Triwulan III	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender bidang sosial Politik dan Hukum	Kota Bima	
						Pelatihan Pendidikan Kebangsaan berspektif Gender	laporan pelaksanaan kegiatan	Triwulan II	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender bidang sosial Politik dan Hukum	Kota Bima	
						Sosialisasi Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	Jumlah Anak Sekolah yang mengikuti sosialisasi bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS pada anak usia sekolah	Triwulan III	Kep. Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kepala Seksi Kesehatan dasar dan kesejahteraan	Kota Bima	
	persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	40,00%	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan	Persentase perempuan yang berspektif gender	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Lembaga yang mengikuti adfokasi peningkatan dan memperluas jaringan kelembagaan Perempuan	Triwulan I	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender Bidang Kualitas Keluarga data dan Informasi	Kota Bima		
					Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Kelompok Fokal Point PUG Pada SKPD Lingkup Kota Bima	Triwulan I	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender Bidang Ekonomi	Kota Bima		
					Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	Jumlah Perda Perlindungan Perempuan dan Perwali PA	Triwulan I	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender bidang sosial Politik dan Hukum	Kota Bima		
2	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan	Rasio KDRT	100,00%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan hak Anak di daerah	Adanya Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Hak-Hak Anak	Triwulan II	Kep. Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kepala Seksi Hak Pendidikan dan Budaya	Kota Bima	
						Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Jumlah Data Potensi organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistim perlindungan anak pada 5 Kec.	Triwulan II	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan	Kota Bima	
						Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah data kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara Online.	Triwulan II	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi Data kekerasan Perempuan dan anak	Kota Bima	
						Kegiatan Pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Adanya Laporan Tertanganinya perempuan terhadap tindak kekerasanserta melakukan Dialog Warga	Triwulan II	Kep. Bidang Perindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak	Kota Bima	
						Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Adanya pemahaman pelatih Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Triwulan I	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala seksi Data kekerasan Perempuan dan anak	Kota Bima	
						Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah ketenaga kerja bagi perempuan serta pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi Keluarga	Triwulan II	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender bidang Ekonomi	Kota Bima	

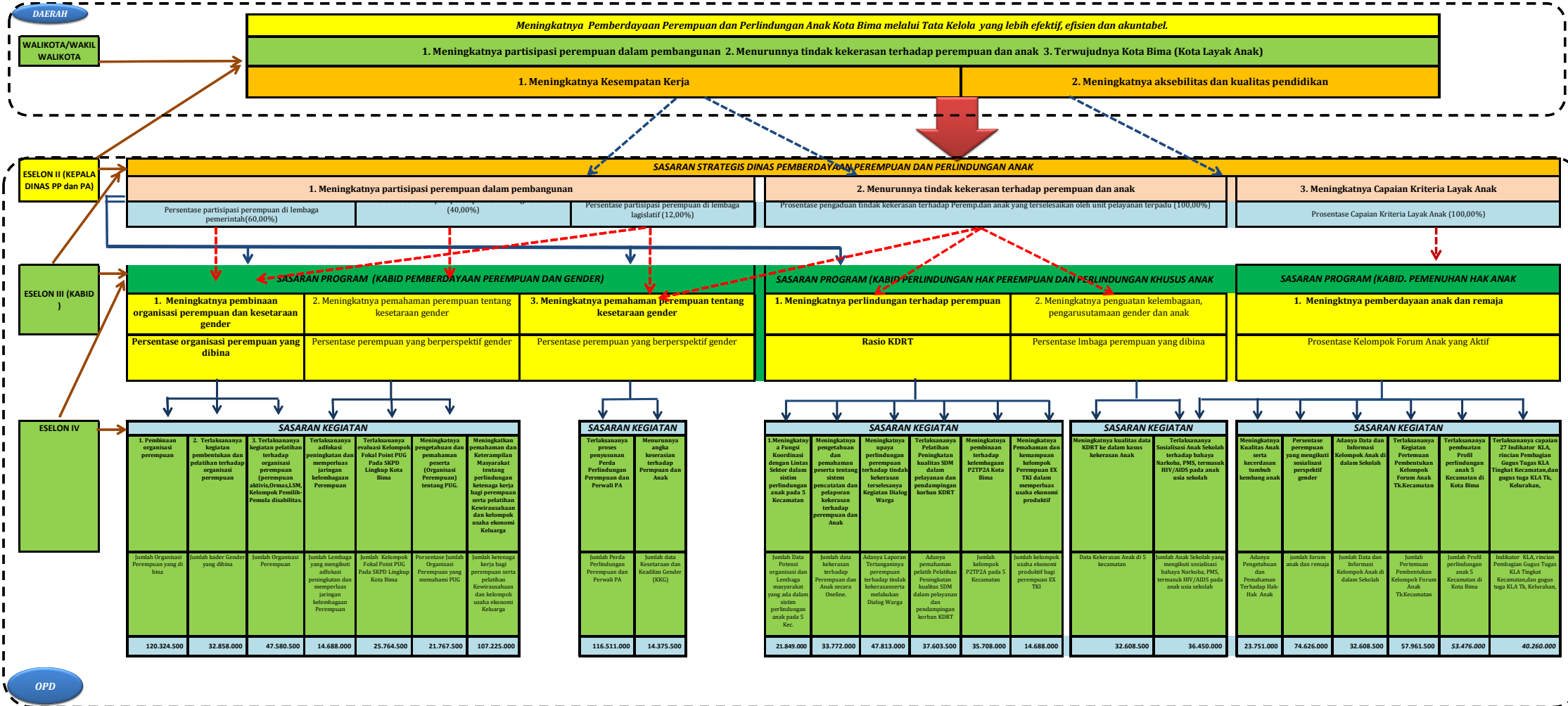


3				<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	Persentase lembaga perempuan yang dibina	<b>Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan</b>	Persentase Jumlah Organisasi Perempuan yang memahami PUG	Triwulan I	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender bidang Ekonomi	Kota Bima
						<b>Fasilitasi pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2A</b>	Jumlah kelompok P2TP2A pada 5 Kecamatan	Triwulan I,	Kep. Bidang Perindungan Hak Perempuan dan Perind. Hak Anak	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak	Kota Bima
						<b>Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan</b>	Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan EX TKI	Triwulan I	Kep. Bidang PP dan Gender	Kasi. Perem. Dan Gend. Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Kota Bima
						<b>Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak</b>	Data Kekerasan Anak di 5 kecamatan	Triwulan II	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala seksi PP dan gender bidang kualitas keluarga data dan Informasi	Kota Bima
3	<b>Meningkatnya capaian kriteria Kota Layak Anak</b>	<b>Persentase capaian kriteria Kota Layak Anak</b>	100%	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif	<b>Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)</b>	jumlah forum anak dan remaja	Triwulan II, III,	Kep. Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kepala Seksi Hak Sipil, Infor.dan Partisipasi.	Kota Bima
							dokumen profil perlindungan anak				Kota Bima
						<b>Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.</b>	Jumlah Data dan Informasi Kelompok Anak di dalam Sekolah	Triwulan III,	Kep. Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kepala Seksi Kesehatan dasar dan kesejahteraan	Kota Bima
						<b>Penguatan Kelompok Forum Anak</b>	Jumlah Pertemuan Pembentukan Kelompok Forum Anak Tk.Kecamatan	Triwulan III,	Kep. Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kepala Seksi Hak Pendidikan dan Budaya	Kota Bima
						<b>Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak</b>	Jumlah Profil perlindungan anak 5 Kecamatan di Kota Bima	Triwulan VI,	Kep. Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kepala seksi Data kekerasan Perempuan dan anak	Kota Bima
						<b>Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak</b>	Jumlah capaian 27 Indikator KLA, rincian Pembagian Gugus Tugas KLA Tingkat Kecamatan,dan gugus tuga KLA Tk, Kelurahan,	Triwulan II,	Kep. Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kepala Seksi Hak Sipil, Infor.dan Partisipasi.	Kota Bima

KEPALA,  
DINAS PP DAN PA KOTA BIMA

  
Drs. M. Nur H. Amajid, MH.  
NIP. 19650213 199203 1 01 1

**PROSES BISNIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA  
TAHUN 2018**



Kota Bima, 2019  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima,


**Drs. M. Saleh**  
Pembina Tk.I/ IV.b  
Nip. 19680119 199403 1 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA TAHUN 2018**


SKPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Dinas PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN Anak	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah } 21.75 \text{ Org}}{\text{Jumlah pekerja perempuan } 4.185 \text{ Org}} \times 100\% = 51,97\%$	Dinas Tenaga Kerja dan BKD	Kep. DPP dan PA
		Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga swasta } 2.585 \text{ Orang}}{\text{Jumlah pekerja dilembaga swasta } 4.984 \text{ Orang}} \times 100\% = 51,87\%$	Dinas Tenaga Kerja	Kep. DPP dan PA
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	%	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga legislatif } 4 \text{ Orang}}{\text{Jumlah pekerja legislatif } 25 \text{ Orang}} \times 100\% = 16,00\%$	Dinas Tenaga Kerja	Kep. DPP dan PA

SKPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	%	$\frac{\text{Jumlah pengaduan / laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang diselesaikan oleh unit pelayanan terpadu}} \times 100 \% = 67.74\%$ <p>21 x 100 % = 67.74%</p> <p>31</p>	Unit PPA Sat Reskrim Polres Bima Kota	Kep. DPP dan PA
	Terwujudnya Bima Kota Layak Anak	% Kelompok Forum anak yang aktif	%	$\frac{\text{Jumlah leompok Forum Anak yang aktif}}{\text{Jumlah leompok Forum Anak yang Ada}} \times 100 \% = 100\%$ <p>5 x 100 % = 100%</p> <p>5</p>	Kecamatan	Kep. DPP dan PA

Raba-Bima, 5 Februari 2018  
Kepala DPP - PA



**Drs. M. Nur. H. Amajid, MH.**  
Nip. 19650213 199203 1 011



**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA TAHUN 2018**

No	SASARAN SKPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET				KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	ANGGARAN	
			TRIWULN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV		TRIWULN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				52,74%	Pembinaan organisasi perempuan				2 Organis.	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender bidang Ekonomi	42.783.000,00	
				49,63%			Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender PP	40 Orang				Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender bidang Ekonomi	5.851.000	
					12,00%		Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan		1 Perda PP dan 1 perda PA			Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi Bidang Sosial Politik dan Hukum	152.231.000	
2	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan				100.00%	Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan hak Anak di daerah				25 Orang	Kepala Bidang PP dan Gender Serta (Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak)	Kepala Seksi Hak Pendidikan dan Budaya	20.353.000	
							Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan				34 Orang Pelatih TOT	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan	17.607.500	
							Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT PP dan PA		2 Laporan	1 Laporan		Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi Data kekerasan Perempuan dan anak	31.470.000	
							Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan			40 Orang			Kep. Bidang Perindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak	10.110.000
							Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan				40 Organisasi Perempuan		Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender bidang Ekonomi	5.730.000
							Fasilitasi pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2A		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kep. Bidang Perindungan Hak Perempuan dan Perlind. Hak Anak	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak	24.107.500
							Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan		1 Laporan			1 Paket	Kep. Bidang PP dan Gender	Kasi. Perem. Dan Gend. Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	108.628.000
							Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak				1 Laporan		Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala seksi PP dan gender bidang kualitas keluarga data dan Informasi	18.030.500
				Evaluasi pelaksanaan PUG		18 SKPD				Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender Bidang Ekonomi	26.966.000			
3	Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak				100.00%	Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Kep. Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kepala Seksi Hak Sipil, Infor. dan Partisipasi.	73.912.500	

**FORM MONITORING RENCANA AKSI  
PENCAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA TAHUN 2018**

WAKTU PELAKSANAAN MONEV :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN		TARGET OUTPUT				REALISASI								Penjelas Atas Capaian Realisasi				
						I		II		III		IV		TRIWULAN I		TRIWULAN II			TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
												NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%		NILAI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1.	<b>Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan</b>	persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	60,00%	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pembinaan organisasi perempuan	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	100%	100%				
		persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	40,00%	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender PP	-	30	-	-	-	-	30	100%	-	-	-	-	100%				
		persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	12,00%	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan	Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	-	1	-	1	-	-	1	100%	-	-	1	100%	100%				
2	<b>Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan</b>	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	100,00%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan hak Anak di daerah	-	5	-	-	-	-	5	100%	-	-	-	-	100%				
					Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	-	5	-	-			5	100%	-	-	-	-	100%				
					Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT PP dan PA	-	2	3	-	-	-	2	100%	3	100%	-	-	100%				



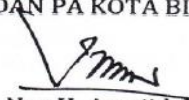
				Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak															
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Petunjuk pengisian:

Kolom 2, kolom 3, kolom 4 diisi sesuai dgn sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang ada dalam Rencana Aksi (ambil di file rencana aksi 2018 DPP dan PA (new))

Untuk kolom 6 target output diisi sesuai dengan target atau volume indikator kegiatan yang ada pada setiap kegiatan dalam RKA/PK

KEPALA,  
DINAS PP DAN PA KOTA BIMA

  
Drs. M. Nur H. Amajid, MH.  
NIP. 19650213 199203 1 011



**CASCADING SASARAN STRATEGIS DINAS PP DAN PA KOTA BIMA TAHUN 2019**

NO	OPD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2019	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatkan partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Prosentase Perempuan dalam Pembangunan	60,00%	<b>Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan</b>	persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	60,00%	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>	Meningkatnya pembinaan organisasi perempuan dan kesetaraan gender	persentase organisasi perempuan yang dibina		<b>Pembinaan organisasi perempuan</b>	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	- Jumlah Organisasi Perempuan yang di bina - Jumlah Organisasi di kota Bima	138.423.500	Bidang PP dan Gender
												<b>Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender</b>	Terlaksananya Pelatihan kesetaraan Gender Kader Partai Politik	Jumlah kader Gender yang dibina	38.708.500	Bidang PP dan Gender
				40,00%		persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	40,00%	<b>Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan</b>	Meningkatnya pemahaman perempuan tentang kesetaraan gender	Persentase perempuan yang berperspektif gender		<b>Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak</b>	Terlaksananya pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan	Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan	23.126.500	Bidang PP dan Gender
												<b>Evaluasi pelaksanaan PUG</b>	Terlaksananya evaluasi Kelompok Fokal Ponit PUG.	Jumlah Data SKPD terpilah yang responsif gender	26.262.000	Bidang PP dan Gender
				12,00%		persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	12,00%	<b>Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan</b>	Meningkatnya pemahaman perempuan tentang kesetaraan gender	Persentase perempuan yang berperspektif gender		<b>Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan</b>	Terlaksananya penyusunan Draf dan Sosialisasi Perwali PP	Jumlah Perwali Perlindungan Perempuan	78.711.500	Bidang PP dan Gender
												<b>Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan</b>	Kelompok Kader PUG di kelurahan se Kota Bima	Jumlah kader PUG di kota Bima	22.888.500	Bidang PP dan Gender
				100%	<b>Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan</b>	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Jumlah KDRT		<b>Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan hak Anak di daerah</b>	Terlaksananya Pengumpulan data dan Pelaporan KDRT	Jumlah data KDRT di lima Kecamatan se Koyta Bima	23.931.000	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak
												<b>Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan</b>	Meningkatnya Fungsi Koordinasi melalui dialog warga PUP( pendewasaan Usia Perkawinan) dalam upaya memfasilitasi perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Data kesepakatan organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistim perlindungan anak melalui aturan tentang PUP	70.645.000	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak

													Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman peserta tentang sistim pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya laporan terhadap sistim Catpor kekerasan perempuan dan anak secara falid	28.384.500	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak			
													Kegiatan Pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan para peserta pelatihan dalam tehnik pengumpulan data kekerasan khusus anak	Jumlah Data kekerasan khusus anak di tingkat kecamatan dan kota	19.664.500	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak			
													Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah pelatih Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	35.928.500	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak			
													Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Peserta pelatihan kewirausahaan kelompok Usaha Ekonomi	- Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan EX TKI. - Jumlah alat produksi Kue	208.537.500	Bidang PP dan Gender			
													Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak	Persentase lmbaga perempuan yang dibina	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Pelatihan PPRG kasubang Perencanaan di seluruh OPD	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	26.216.000	Bidang PP dan Gender
													Fasilitasi pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2A	Sosialisai dan pelatihan Peningkatan SDM bagi Kader P2TP2A	Jumlah peserta P2TP2A yang berkualitas pada 5 Kecamatan	34.140.000	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak			
													Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak	Pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Jumlah perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta eksploitasi dan penelantaran lainnya terhadap anak	25.956.500	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak			

		Mewujudkan Kota layak anak	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Layak Anak	100%	Meningkatnya capaian kriteria Kota Layak Anak	Persentase capaian kriteria Kota Layak Anak	100%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya pemberdayaan anak dan remaja	Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif		Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	- Gugus tugas KLA Tingkat Kecamatan	- Jumlah Gugus Tugas Tingkat Kecamatan	74.626.000	Bidang Pemenuhan Anak
													- Gugus tugas KLA Tingkat Kecamatan	- Jumlah Gugus Tugas Tingkat Kecamatan		Bidang Pemenuhan Anak
												Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.	Pembentukan PATBM Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelompok PATBM	46.499.000	Bidang Pemenuhan Anak
												Penguatan Kelompok Forum Anak	Terlaksananya Kegiatan Hari Anak Tingkat Kota Bima	Jumlah Duta Forum anak yang terpilih	113.191.000	Bidang Pemenuhan Anak
												Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak	Adanya Anak Bermasalah dan potensi partisipasi anak	Jumlah Buku Profil Anak	44.633.500	Bidang Pemenuhan Anak
												Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak	Terlaksananya Pembinaan Kota Layak Anak	Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dibentuk	35.718.500	Bidang Pemenuhan Anak


 Kepala Dinas/PP dan PA  
 Drs. M. Saleh.  
 Pembina Tk.I / IV/b  
 Nip. 19680119 199403 1 006


**PENETAPAN IKU ESELON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA TAHUN 2019**

NO	KEPALA DINAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULA INDIKATOR	ESELON III	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	ESELON IV	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR	KET
1	Eselon II	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$Pekerja\ perempuan\ di\ lembaga\ pemerintah \dots \times 100 = \dots \%$ Jumlah pekerja perempuan..... Org	Kepala Bidang PP dan Gender	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya pembinaan organisasi perempuan dan kesetaraan gender	persentase organisasi perempuan yang dibina	$jumlah\ organisasi\ perempuan\ yang\ dibina \dots \times 100 = \dots \%$ jumlah organisasi perempuan seluruhnya	Kepala Seksi PP dan Gender Bidang Ekonomi	Pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan dan peringatan hari Ibu	- Jumlah peserta pembinaan Organisasi Perempuan - Jumlah Organisasi di kota Bima	kumulatif Jumlah peserta pembinaan Organisasi Perempuan - Jumlah Organisasi di kota Bima	
										Kepala Seksi PP dan Gender bidang sosial Politik dan Hukum	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender	Terlaksananya Pelatihan kesetaraan Gender Kader Partai Politik	Jumlah kader Politik	kumulatif Jumlah kader Politik	
			persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	$Pekerja\ perempuan\ di\ lembaga\ Swasta \dots \times 100 = \dots \%$ Jumlah pekerja perempuan Swasta..... Org	Kepala Bidang PP dan Gender	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya program kegiatan penguatan pengarusutamaan agender dan Anak	Persentase perempuan yang mengikuti sosialisasi perspektif gender	$jumlah\ peserta\ sosialisasi \dots \times 100 = \dots \%$ jumlah perempuan usia 20 tahun keatas	Kepala Seksi PP dan Gender Bidang Kualitas Keluarga data dan Informasi	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan	Jumlah serta Pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi ekonomi produktif bagi perempuan	Kumulatif serta Pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi ekonomi produktif bagi perempuan	
										Kepala Seksi PP dan Gender Bidang Ekonomi	Evaluasi pelaksanaan PUG	Terlaksananya evaluasi Kelompok Fokal Ponit PUG.	Jumlah Data SKPD terpilah yang responsif gender	Kumulatif Data SKPD terpilah yang responsif gender	
			persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	$Pekerja\ perempuan\ di\ lembaga\ Legislatif \dots \times 100 = \dots \%$ Jumlah pekerja perempuan Legislatif..... Org	Kepala Bidang PP dan Gender	Program Keresasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan	Meningkatnya pemahaman perempuan tentang kesetaraan gender	Persentase perempuan yang mengikuti sosialisasi perspektif gender		Kepala Seksi PP dan Gender bidang sosial Politik dan Hukum	Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	Terlaksananya penyusunan Draf dan Sosialisasi Perwali PP	Jumlah Perwali Perlindungan Perempuan	Jumlah Perwali Perlindungan Perempuan	
										Kepala Seksi PP dan Gender Bidang Ekonomi	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan	Kelompok Kader PUG di kelurahan se Kota Bima	Jumlah kader PUG di kota Bima	Kumulatif Jumlah kader PUG di kota Bima	

2		<b>Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan</b>	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	<u>Pekerja pengaduan/laporan yang di selesaikan oleh unit pelayanan terpadu</u> ...x100%=...% Jumlah pengaduan/laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu..... Org	Kepala Bidang PP dan Gender Serta (Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak)	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Jumlah KDRT	Kumulatif	Kepala Seksi Data kekerasan Perempuan dan anak	<b>Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan hak Anak di daerah</b>	Terlaksananya Pengumpulan data dan Pelaporan KDRT	Jumlah data KDRT di lima Kecamatan se Koyta Bima	kumulatif data KDRT di lima Kecamatan se Koyta Bima	
										Kepala Seksi Perlindungan Perempuan	<b>Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan</b>	Meningkatnya Fungsi Koordinasi melalui dialog warga PUP( pendewasaan Usia Perkawinan) dalam upaya memfasilitasi perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Data kesepakatan organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistim perlindungan anak melalui aturan tentang PUP	kumulatif Jumlah Data kesepakatan organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistim perlindungan anak melalui aturan tentang PUP	
										Kepala Seksi Data kekerasan Perempuan dan anak	<b>Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT</b>	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman peserta tentang sistim pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya laporan terhadap sistim Catpor kekerasan perempuan dan anak secara falid	kumulatif laporan terhadap sistim Catpor kekerasan perempuan dan anak secara falid	
										Kepala Seksi Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak	<b>Kegiatan Pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan</b>	Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan para peserta pelatihan dalam tehnik pengumpulan data kekerasan khusus anak	Jumlah Data kekerasan khusus anak di tingkat kecamatan dan kota	kumulatif Data kekerasan khusus anak di tingkat kecamatan dan kota	
										Kepala Seksi Data kekerasan Perempuan dan anak	<b>Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT</b>	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah pelatih Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Kumulatif pelatih Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	
										Kepala Seksi PP dan Gender bidang Ekonomi	<b>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan</b>	Peserta pelatihan kewirausahaan kelompok Usaha Ekonomi	- Jumlah kelompok produktif bagi perempuan EX TKL. - Jumlah alat produksi Kue	Kumulatif - Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan EX TKL. - Jumlah alat produksi Kue	

					Kepala Bidang PP dan Gender	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak	Persentase Imbaga perempuan yang dibina	Kumulatif	Kepala Seksi PP dan Gender bidang Ekonomi	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Pelatihan PPRG kasubang Perencanaan di seluruh OPD	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	Kumulatif Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	
										Kepala Seksi Perlindungan Khusus Perempuandan Anak	Fasilitasi pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2A	Sosialisai dan pelatihan Peningkatan SDM bagi Kader P2TP2A	Jumlah peserta P2TP2A yang berkualitas pada 5 Kecamatan	Kumulatif Jumlah peserta P2TP2A yang berkualitas pada 5 Kecamatan	
										Kepala Seksi Perlindungan Khusus Perempuandan Anak Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak	Pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Jumlah perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta eksploitasi dan penelantaran lainnya terhadap anak	Kumulatif Jumlah perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta eksploitasi dan penelantaran lainnya terhadap anak	
		Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak	Jumlah indikator kota layak anak yang terpenuhi ...x 100 % = ...% total indikator kota layak anak (31 indikator).....	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya pemberdayaan anak dan remaja	Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif	Jumlah leompok Forum Anak yang aktif ....x 100 % = ...% Jumlah leompok Forum Anak yang Ada.....	Kepala seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	- Gugus tugas KLA Tingkat Kecamatan	- Jumlah Gugus Tugas Tingkat Kecamatan	Kumulatif Jumlah Gugus Tugas Tingkat Kecamatan	
												- Gugus tugas KLA Tingkat Kecamatan	- Jumlah Gugus Tugas Tingkat Kecamatan	Kumulatif Jumlah Gugus Tugas Tingkat Kecamatan	
										Kepala Seksi Hak Sipil, Infor. dan Partisipasi	Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.	Pembentukan PATBM Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelompok PATBM	Kumulatif Jumlah Kelompok PATBM	
										Kepala Seksi Hak Pendidikan dan Budaya	Penguatan Kelompok Forum Anak	Terlaksananya Kegiatan Hari Anak Tingkat Kota Bima	Jumlah Duta Forum anak yang terpilih	Kumulatif Jumlah Duta Forum anak yang terpilih	

												Kepala Seksi Hak Pendidikan dan Budaya	<b>Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak</b>	Adanya Anak Bermasalah dan potensi partisipasi anak	Jumlah Buku Pofil Anak	Kumulatif Jumlah Buku Pofil Anak	
												Kepala seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	<b>Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak</b>	Terlaksananya Pembinaan Kota Layak Anak	Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dibentuk	Kumulatif Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dibentuk	


 Kepala Dinas PPK dan PA  
 Drs. M. Saleh.  
 Pembina Tk.I / IV/b  
 Nip. 19680119 199403 1 006

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA  
TAHUN 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2019	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Pelaksana	Lokasi	Ket					
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	60,00%	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	persentase organisasi perempuan yang dibina	Pembinaan organisasi perempuan	- Jumlah peserta pembinaan Organisasi Perempuan - Jumlah Organisasi di kota Bima	Triwulan II, IV	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender Bidang Ekonomi	Kota Bima						
						Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender	Jumlah kader Politik	Triwulan II	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender bidang sosial Politik dan Hukum							
						Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan	Persentase perempuan yang berperspektif gender	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah serta Pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi ekonomi produktif bagi perempuan	Triwulan I			Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender Bidang Kualitas Keluarga data dan Informasi			
								Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Data SKPD terpilih yang responsif gender	Triwulan I			Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender Bidang Ekonomi			
							persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	12,00%					Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	Jumlah Perwali Perlindungan Perempuan	Triwulan I	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender bidang sosial Politik dan Hukum
													Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan	Jumlah kader PUG di kota Bima	Triwulan I	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender Bidang Ekonomi
2	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan	Rasio KDRT	100%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan hak Anak di daerah	Jumlah data KDRT 5 Kecamatan se Koyta Bima	Triwulan II	Kep. Bidang Perindungan Hak Perempuan dan Perlind. Hak Anak	Kepala Seksi Data kekerasan Perempuan dan anak	Kota Bima						
						Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Jumlah Data kesepakatan organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistim perlindungan anak melalui aturan tentang PUP	Triwulan II	Kep. Bidang Perindungan Hak Perempuan dan Perlind. Hak Anak	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan							



						<b>Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT</b>	Adanya laporan terhadap sistim Catpor kekerasan perempuan dan anak secara falid	Triwulan III	Kep. Bidang Perindungan Hak Perempuan dan Perlind. Hak Anak	Kepala Seksi Data kekerasan Perempuan dan anak	Kota Bima	
						<b>Kegiatan Pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan</b>	Jumlah Data kekerasan khusus anak di tingkat kecamatan dan kota	Triwulan II	Kep. Bidang Perindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak	Kepala seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak	Kota Bima	
						<b>Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT</b>	Jumlah pelatih Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Triwulan I	Kep. Bidang Perindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak	Kepala seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak	Kota Bima	
						<b>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan</b>	- Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan EX TKI. - Jumlah alat produksi Kue	Triwulan II	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender bidang Ekonomi	Kota Bima	
3					<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	Persentase Imbaga perempuan yang dibina	<b>Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan</b>	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	Triwulan I	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender bidang Ekonomi	Kota Bima
						<b>Fasilitasi pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2A</b>	Jumlah peserta P2TP2A yang berkualitas pada 5 Kecamatan	Triwulan I,	Kep. Bidang Perindungan Hak Perempuan dan Perlind. Hak Anak	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak	Kota Bima	
						<b>Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak</b>	Jumlah perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta eksploitasi dan penelantaran lainnya terhadap anak	Triwulan I	Kep. Bidang Perindungan Hak Perempuan dan Perlind. Hak Anak	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak	Kota Bima	

3	Meningkatnya capaian kriteria Kota Layak Anak	Persentase capaian kriteria Kota Layak Anak	100%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif	Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	- Jumlah Gugus Tugas Tingkat Kecamatan	Triwulan II, III,	Kep. Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kepala seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Kota Bima
							- Jumlah Gugus Tugas Tingkat Kecamatan				
						Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.	Jumlah Kelompok PATBM	Triwulan II	Kep. Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kepala Seksi Hak Sipil, Infor. dan Partisipasi	Kota Bima
						Penguatan Kelompok Forum Anak	Jumlah Duta Forum anak yang terpilih	Triwulan II	Kep. Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kepala Seksi Hak Pendidikan dan Budaya	Kota Bima
						Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak	Jumlah Buku Pofil Anak	Triwulan III	Kep. Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kepala Seksi Hak Pendidikan dan Budaya	Kota Bima
						Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak	Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dibentuk	Triwulan II,	Kep. Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kepala seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Kota Bima



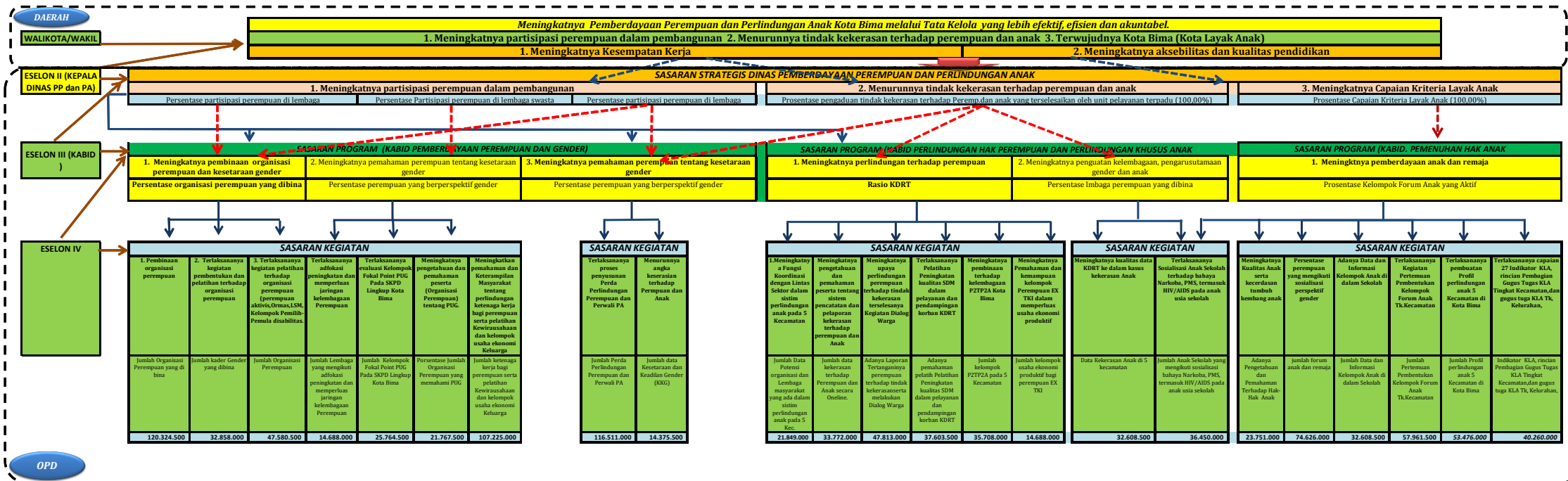
Pt. Kepala Dinas PP dan PA

Drs. M. Saleh.

Pembina Tk.I / IV/b

Nip. 19680119 199403 1 006

**PROSES BISNIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA  
TAHUN 2019**



Kota Bima, 2019  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima,



Drs. M. Saleh  
Pembina Tk.I/IV.b  
Nip. 19680119 199403 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA BIMA TAHUN 2019

SKPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Dinas PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN Anak	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah} \dots \times 100\%}{\text{Jumlah pekerja perempuan} \dots \text{ Org}} = \dots \%$	Dinas Tenaga Kerja dan BKD	Kep. DPP dan PA
		Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga swasta} \dots \times 100\%}{\text{Jumlah pekerja dilembaga swasta} \dots \text{ Orang}} = \dots \%$	Dinas Tenaga Kerja	Kep. DPP dan PA
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga lagislatif	%	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga legislatif} \dots \times 100\%}{\text{Jumlah pekerja legislatif} \dots} = \dots \%$	Dinas Tenaga Kerja	Kep. DPP dan PA

SKPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	%	<p>Jumlah pengaduan/laporan yang diselesaikan oleh unit pelayanan terpadu ..... x 100 % = .....%</p> <p>Jumlah pengaduan / laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu .....</p>	Unit PPA Sat Reskrim Polres Bima Kota	Kep. DPP dan PA
	Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak	%	<p>Jumlah kelompok Forum Anak yang aktif ..... x 100 % = .....%</p> <p>Jumlah kelompok Forum Anak yang Ada .....</p>	Kecamatan	Kep. DPP dan PA



Raba-Bima, 5 Februari 2019  
Plt. Kepala DPP – PA

**Drs. M. Saleh**  
Pembina Tk.I/ IV.b  
Nip. 19680119 199403 1 006

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA TAHUN 2019**

No	SASARAN SKPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET				KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	ANGGARAN	
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV				
1	2	6					8	11					13	14	15
1	<b>Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan</b>	persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				60,00%	Pembinaan organisasi perempuan				32 Organisasi Perempuan	Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender bidang Ekonomi	138.423.500,00	
							Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender		60 Orang%			Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi Bidang Sosial Politik dan Hukum	38.708.500,00	
		persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	40,00%				Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	40 Orang				Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender bidang Ekonomi	23.126.500	
							Evaluasi pelaksanaan PUG	28 SKPD					Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender bidang Ekonomi	26.262.000
		persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif		12,00%			Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	1 Perwali PP					Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi Bidang Sosial Politik dan Hukum	78.711.500
							Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan	60 Orang					Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender bidang Ekonomi	22.888.500
2	<b>Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan</b>	Jumlah KDRT				100.00%	Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan hak Anak di daerah		40 Orang			Kep. Bidang Perindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak	Kepala Seksi Data kekerasan Perempuan dan anak	23.931.000	
							Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan		130 Orang			Kep. Bidang Perindungan Hak Perempuan dan	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan	70.645.000	
							Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT			120 Orang		Kep. Bidang Perindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak	Kepala Seksi Data kekerasan Perempuan dan anak	28.384.500	
							Kegiatan Pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan		40 Orang			Kep. Bidang Perindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak	Kepala Seksi Data kekerasan Perempuan dan anak	19.664.500	

							Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	30 OPD					Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender bidang Ekonomi	26.216.000
							Fasilitasi pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2A	40 Orang					Kep. Bidang Perindungan Hak Perempuan dan Perlind. Hak Anak	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak	34.140.000
							Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan	40 Orang					Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender bidang Ekonomi	23.126.500
							Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak	50 orang					Kep. Bidang Perindungan Hak Perempuan dan	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak	25.956.500
							Evaluasi pelaksanaan PUG	18 SKPD					Kep. Bidang PP dan Gender	Kepala Seksi PP dan Gender Bidang Ekonomi	26.262.000
3	<b>Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak</b>	Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak				100.00%	Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	2 Kec.	3 kelur.				Kep. Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kepala Seksi Hak Sipil, Infor. dan Partisipasi.	<b>74.626.000</b>
							<b>Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.</b>		3 Kelompok PATBM				Kep. Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kepala Seksi Hak Sipil, Infor. dan Partisipasi.	46.499.000
							<b>Penguatan Kelompok Forum Anak</b>		3 Kelpok				Kep. Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kepala Seksi Hak Pendidikan dan Budaya	113.191.000
							<b>Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak</b>			41 Buku Profil Anak			Kep. Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kepala Seksi Hak Pendidikan dan Budaya	44.633.500
							<b>Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak</b>		1 Dekela				Kep. Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kepala Seksi Kesehatan dasar dan Kesejahteraan	35.718.500


 Plt. Kepala Dinas PP dan PA  
 Drs. M. Saleh.  
 Pembina Tk.I / IV/b  
 Nip. 19680119 199403 1 006

**FORM MONITORING RENCANA AKSI  
PENCAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA TAHUN 2019**

WAKTU PELAKSANAAN MONEV :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN		TARGET OUTPUT				REALISASI								Penjelas Atas Capaian Realisasi				
						I		II		III		IV		TRIWULAN I		TRIWULAN II			TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
						NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%		NILAI	%		
1	2	3	4	5		6				7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	<b>Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan</b>	persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	60,00%	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pembinaan organisasi perempuan	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	100%	100%				
					Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender																	
		persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	40,00%	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	-	30	-	-	-	-	30	100%	-	-	-	-	100%				
					Evaluasi pelaksanaan PUG																	
		persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	12,00%	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan	Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	-	1	-	1	-	-	1	100%	-	-	1	100%	100%				



				Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan														
2	<b>Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan</b>	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	100,00%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan hak Anak di daerah	-	5	-	-	-	-	5	100%	-	-	-	-	100%
					Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	-	5	-	-			5	100%	-	-	-	-	100%
					Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT PP dan PA	-	2	3	-	-	-	2	100%	3	100%	-	-	100%
					Kegiatan Pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	-	25	-	-	-	-	25	100%	-	-	-	-	100%
					Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT													
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan													
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	-	-	40	-	-	-	-	-	40	100%	-	-	100%

					Fasilitasi pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2A	-	37	30		-	-	37	100%	30	100%	-	-	100%
					Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak	-	-	-	450	-	-	-	-	-	-	450	100%	100%
					Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak	-	40	40	-	-	-	40	100%	40	100%	-	-	100%
3.	Terwujudnya Kota Bima Kota Layak Anak	Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif	100%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	-	10	27	-	-	-	10	100%	27	100%	-	-	100%
					Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.													
					Penguatan Kelompok Forum Anak													
					Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak													
					Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak													

Petunjuk pengisian:

Kolom 2, kolom 3, kolom 4 diisi sesuai dgn sasaran strategis, idikator kinerja dan target kinerja yang ada dalam Rencana Aksi (ambil di file rencana aksi 2019 DPP dan PA (new)

Untuk kolom 6 target output diisi sesuai dengan target atau volume indikator kegiatan yang ada pada setiap kegiatan dalam RKA/PK


  
 Plt. Kepala Dinas PP dan PA  
 Drs. M. Saleh.  
 Pembina Tk.I / IV/b  
 Nip. 19680119 199403 1 006

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2013 - 2018



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLIDUNGAN ANAK  
KOTA BIMA


## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima periode 2013-2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima untuk 2 (dua) tahun kedepan sehingga pencapaiannya bias terukur. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima. Analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik nasional maupun global; dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, dan visi, misi Kota Bima sebagaimana diamanatkan didalam RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2013-2018, yaitu " Terwujudnya Kesetaraan Gender, Kesejahteraan Perlindungan Anak" maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Akhirnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima sebagai dokumen perencanaan memerlukan penjabaran konkrit dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra tergantung pada komitmen segenap karyawan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Kota Bima yang lebih baik lagi.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga Renstra ini dapat tersusun.

Raba-Bima, Pebruari 2017  
Kepala DPP dan PA  
  
**Drs M. Nur.H. Amajid. MH.**  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
Nip. 19650213 199203 1 011

## DAFTAR ISI

Halaman judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....</b>	<b>6</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....	7
2.2. Sumber Daya SKPD.....	28
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	35
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....</b>	<b>36</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	36
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	40
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....	44
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	47
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	51
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....</b>	<b>53</b>
4.1. Visi dan Misi SKPD.....	53
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	56
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD.....	56
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....</b>	<b>58</b>
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....</b>	<b>66</b>
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>69</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan proses penyusunan kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan semua komponen manajerial secara berjenjang, dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien, efektif, akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pencapaian Visi Walikota Bima melalui misi- misi yang ditetapkan yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas, percepatan dan pemenuhan pelayanan oleh pemerintah semakin meningkat, terutama kebutuhan akan penyediaan program dan kegiatan pembangunan yang menyentuh kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupannya seiring dengan perkembangan lingkungan, baik lingkungan regional maupun lingkungan global, dan dalam kaitannya dengan itu maka perencanaan yang integral dan komprehensif mutlak diperlukan.

Oleh karena itu penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima ini sanga diperlukan, sehingga dengan dokumen RENSTRA yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan ini, akan memberikan tuntunan bagi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Penyusunan Renstra DPP dan PA TAHUN 2013- 2018 berpedoman pada RPJMD Kota Bima tahun 2013- 2018 dan bersifat indikatif.

## 1.2 Landasan Hukum.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013;
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018.
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 184);
- Peraturan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 322).

## 1.2. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan RENSTRA DPP dan PA Kota Bima Tahun 2013-2018 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen DPP dan PA Kota Bima di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 2 (dua) tahun DPP dan PA Kota Bima tahun 2013-2018.

Penyusunannya RENSTRA DPP dan PA Kota Bima dimaksudkan sebagai landasan dan arah Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bima, selama 5 tahun ke depan di Kota Bima.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PP dan PA Kota Bima dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PP dan PA Kota Bima untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas PP dan PA Kota Bima.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas PP dan PA Kota Bima dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas PP dan PA Kota Bima yang merupakan dokumen perencanaan Dinas PP dan PA Kota Bima tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

**Tujuan Umum** : Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima melalui Tata Kelola yang lebih efektif, efisien dan akuntabel pada tahun 2013-2018.



**Tujuan Khusus :**

1. Tersusunnya dokumen Rencana Strategis Kota Bima di bidang, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2013- 2018 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui mekanisme perencanaan yang lebih berkualitas melalui analisis yang lebih dalam, cermat dan menyeluruh terhadap berbagai aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kota Bima.
2. Tertuangnya kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja serta target indikator Rencana Strategis DPP dan PA di dalam dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kota Bima tahun 2013- 2018
3. Terlaksananya kebijakan, program dan kegiatan pemerintah Kota Bima melalui DPP dan PA secara lebih terarah , transparan, terukur dan maju.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

### **BAB VII PENUTUP.**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PP dan PA KOTA BIMA PADA TAHUN 2017 - 2018**

Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kota Bima selama ini telah diletakkan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan manusia sebagai subyek pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia.

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak , merupakan program lintas sektor, menjadi perhatian bersama sehingga capaian melalui Renstra Dinas PP dan PA telah dilaksanakan dengan baik, dengan hasil sebagai berikut :

1. Perencanaan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
2. Peningkatan Kualitas pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
3. Peningkatan Kemitraan Dengan Lintas Sektor dan Pemerintah Daerah
4. Peningkatan Advokasi, KIE pengarusutamaan gender dan perlindungan anak meskipun belum optimal
5. Pengembangan P2TP2A.
6. Pengintegrasian pengarusutamaan gender ke dalam program penanggulangan bencana.

## **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima.**

### **2.1. 1. URAIAN TUGAS**

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima tertuang pada Peraturan Walikota Bima Nomor 46 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 46 Tahun 2016, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Kantor dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta tugas pembantuan dan tugas dekosentrasi.

### **2.1.2. FUNGSI**

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 46 tahun 2016 Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam rangka pengelolaan program PP dan PA
2. Penyusunan Anggaran Dinas ;
3. Pelaksanaan Evaluasi Penilaian dan penyusunan laporan dibidang Perempuan dan Perlindungan anak ;
4. Penyelenggaraan program pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ;
5. Penyelenggaraan program penguatan dan jaringan Kelembagaan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
6. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah/LSM Swasta dan masyarakat di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
7. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.1.3. SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD.**

Susunan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima terdiri dari :

**Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima terdiri dari :**

1. Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima.

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Menyusun program dan anggaran;
- Pengelolaan Keuangan;
- Pengelolaan kelengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah/negara;
- Pengelolaan urusan ASN;
- Penyusunan perencanaan di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi, bidang pemenuhan hak anak serta bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga pemenuhan hak anak serta bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- Pelaksanaan pelayanan PP di bidang ekonomi, sosial politik dan hukum serta kualitas keluarga, data dan informasi;
- Pelaksanaan pelayanan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Pelaksanaan pelayanan hak sipil, informasi dan partisipasi;
- Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Pelaksanaan pelayanan perlindungan khusus anak dan perempuan;
- Pelaksanaan pelayanan kekerasan perempuan dan anak;
- Pelaksanaan kerja sama administrasi PP dan perlindungan anak;
- Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang PP dan PA;
- Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas PP dan PA; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

-

2. Sekretaris Dinas PP dan PA membantu tugas Kepala Dinas PP dan PA, yaitu Mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program dan pelaporan agar tugas-tugas dan kegiatan pada lingkup Dinas PP dan PA Kota Bima dapat berjalan lancar.

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dinas

- Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
  - Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tatalaksana, tata usaha dan rumah tangga dilingkungan Dinas;
  - Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
  - Pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara dilingkungan Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :
- a. Kasubag Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara:
    - Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan Pegawai;
    - Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, Jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
    - Pelaksanaan urusan Tata usaha, kearsipan, rumah tangga keamanan dan kebersihan;
    - Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
    - Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
    - Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian; dan
    - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan membawahi Bendahara rutin, Gaji, Gudang, Pembantu penerima. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang PP dan PA;
- Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang PP dan PA;
- Pemanantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Penyusunan laporan dibidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengolahan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian revisi anggaran; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitas teknis dan laporan yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan pengendalian dalam program dan penyusunan laporan dan melakukan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

### 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang PP dan Gender :

- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang Ekonomi, Sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang Ekonomi, Sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gendre dan PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan , pengolahan, analisis penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan fasilitas dan distribusi, kebijakan pengumplan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;



- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengumpulan data dan informasi gender PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan pelebagaan pengarusutamaan gender;
- Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :
  - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender di bidang Ekonomi
 

Mempunyai tugas :

    - Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi;
    - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang Ekonomi;
    - Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi;
    - Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi;
    - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang ekonomi;
    - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi;

- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
  - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
  - Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, data dan informasi gender di bidang ekonomi;
  - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
  - Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
  - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Gender di bidang ekonomi;
  - Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
  - Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi;
  - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang e. konomi
- b. Saksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender sosial politik dan Hukum.
- Mempunyai tugas :
- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang sosial, politik dan hukum;
  - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gendre dan PP di bidang sosial, politik dan hukum;
  - Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan Koordinasi dan sinkronisasi. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan adistribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang sosial, politik dan hukum;

- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan dan PP di bidang sosial politik dan hukum;
  - Pemanatauan analisis, evaluasi dan pelaporan .penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaam gender da PP di bidang sosial politik dan hukum;
  - Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial politik dan hukum;
  - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
  - Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi. Penyajian koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan,pengolahan, analisis data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
  - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervis gender di bidang sosial, politik dan hukum;
  - Penyiapan kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
  - Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi; dan
  - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum.
- c. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi
- Mempunyai tugas :
- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga.
  - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;

- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Penyipian fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga.

#### 4. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

##### Mempunyai tugas

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyipian koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan dan pendidikan kreativitas dan keluarga budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kabijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan , serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan analisis, evaluasi dan pelaporan, penerapan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan,pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

- Penyiapan fasilitas sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak. di bantu oleh :

a. Saksi Hak Pendidikan dan Budaya.

Mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan Fasilitas, sosialisasi dan distribusi. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan, analisis dan penyajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang kegiatan budaya .

b. Saksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.

Mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan Fasilitas, sosialisasi dan distribusi. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan, analisis dan penyajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyedia data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;



- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang kegiatan budaya .

c. Saksi Kesehatan Dasar dan kesejahteraan.

Mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

5. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak,

Mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan terhadap penanganan kekerasan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :

a. Saksi Perlindungan Perempuan.

Mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kajian di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana dan perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi, evaluasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan konsisi khusus serat dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penagnanan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan konsisi khsusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang ketenagakerjaan, dalam kondisi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Pemantauan analisis, sosialisasi, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

b. Saksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan forum koordinasi Penyusunan Kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakandi bidang perlindungan khusus anak;

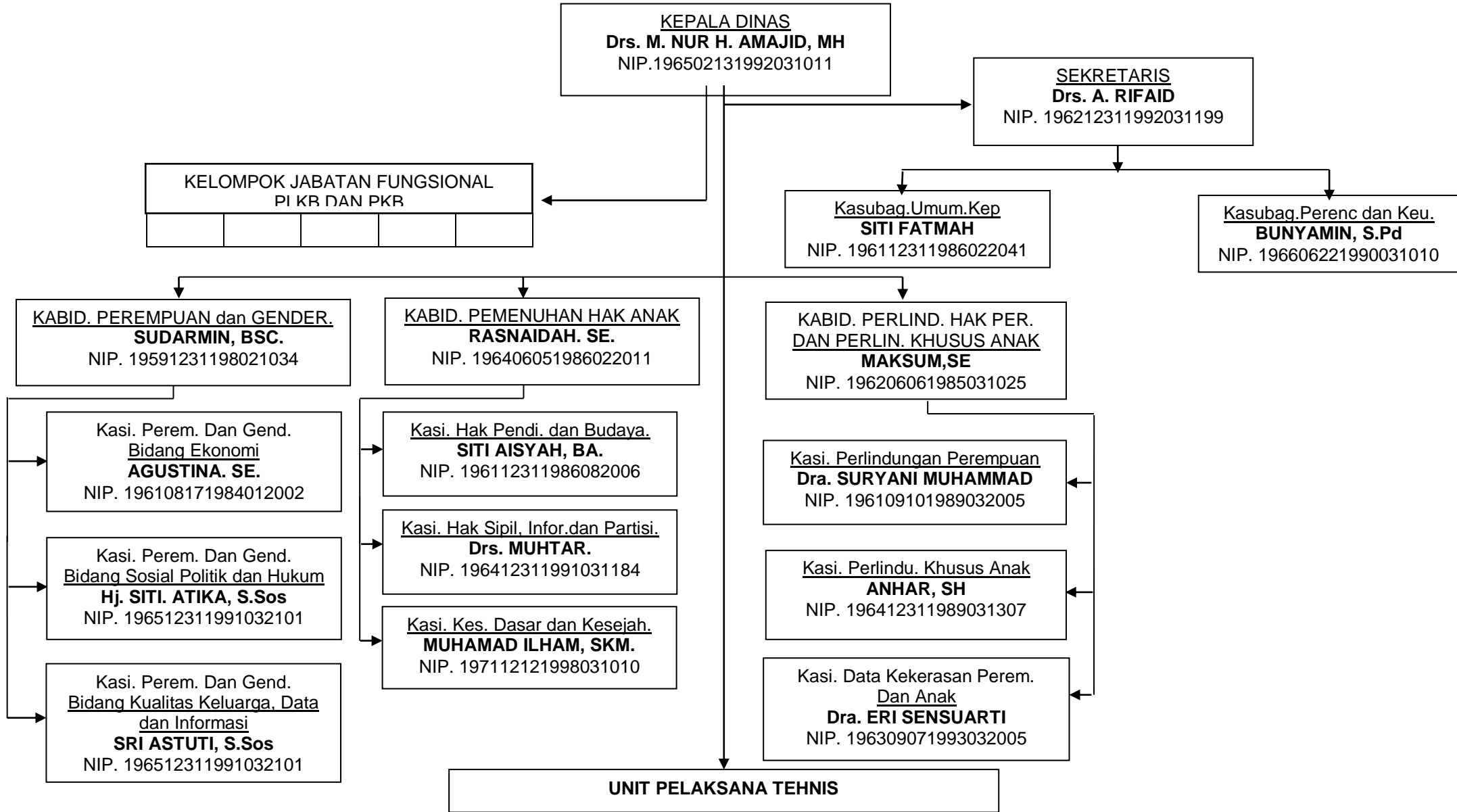
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak; dan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- c. Saksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.
- Mempunyai tugas :
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## 6. Kelompok Jabatan Fungsional

## 7. Staf.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima terlampir. (**Lampiran I. I.**).

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA**





## 2.2. Sumberdaya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Secara keseluruhan, Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 25 (dua puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian :

- A. Berdasarkan Golongan terdiri dari :
1. Golongan IV : 8 (delapan) orang
  2. Golongan III : 16 (enam belas) orang
  3. Golongan I : 1 (satu) orang
- B. Berdasarkan Jabatan Struktural terdiri dari 16 (enam belas) orang dengan rincian sebagai berikut :
1. Eselon II b : 1 (satu) orang, yaitu Kepala DPP dan PA
  2. Eselon III a : 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris DPP dan PA
  3. Eselon III b : 3 (tiga) orang, terdiri dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak,
  4. Eselon IV a : 11 (sebelas) orang, terdiri atas 2 (dua) orang kasubbag dan 9 (sembilan) orang kasubbid
  5. Staf terdiri atas 9 (sembilan) orang.
- C. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri atas :
1. Strata 2 (S2) : 1 (satu) orang
  2. Strata 1 (S1) : 6 (enam) orang
  3. Sarjana Muda/DIII : 1 (satu) orang
  4. SLTA/SMP : 1 (satu) orang

Secara lebih terperinci, hingga akhir tahun 2017, keadaan pegawai pada DPP dan PA Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut :

- a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah
1.	S2	2
2.	S1	19
3.	Diploma 3	2
4.	SMA / sederajat	1
5.	SPM	1
<b>Total</b>		<b>25</b>

- b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

No.	Pegawai	Jumlah
1.	Golongan IV	8
2.	Golongan III	16
3.	Golongan II	1
<b>Total</b>		<b>25</b>

- c. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

No.	Pegawai	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	11
4.	Eselonering	-
<b>Total</b>		<b>16</b>

#### **D. Sumberdaya Aset/Modal**

Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima terletak di Jalan Soekarno-Hatta No.2 Raba, Kota Bima. Kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional tugas Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima pun belum tersedia.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Mebelair, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
- b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet, dan mesin faksimili;
- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis, dilengkapi dengan ketersediaan printer, dan server Internet;
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, mesintik, dan LCD proyektor;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti Kulkas, *air conditioner* (AC), kipas angin, dan televisi;
- f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

#### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk urusan wajib serta Indikator Kinerja Pelayanan. Kinerja Pelayanan digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat sosialisasi, dapat melaksanakan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui :

1. Pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam rangka pengelolaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Penyusunan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Pelaksanaan evaluasi penilaian penyusunan laporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Penyelenggaraan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Penyelenggaraan program penguatan kelembagaan dan jaringan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
7. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan instansi Pemerintah/LSM Swasta dan masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Dapat dilihat pada tabel dengan format 2.1. dan format 2.2. sebagai berikut **terlampir** :

**TABEL 2.1**

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA 2013- 2018**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NASIONAL (%)	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4
<b>II</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																		
	Rasio kekerasan terhadap anak dan perempuan		61,11%	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan			100 %	100 %	100 %			64.28%	62.5 %	98,3 %			64.3 %	62.5 %	93.8 %
	Cakupan pembinaan terhadap organisasi perempuan		86.11%	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih			100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	98,5 %			100,0 %	100 %	98.5 %
	Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah		21,40%	Cakupan layanan Rehabilitasi Sosial oleh petugas Rehsos terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu			75 %	75 %	75 %			26.01 %	31.27 %	37,3 %			34.7 %	41.6 %	49.7 %
				Cakupan layanan bimbingan rohani bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu			75 %	75 %	75 %			60.0 %	62.0 %	98,3 %			80.0%	82.7 %	131.1 %
				Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			75 %	75 %	75 %			50.0 %	56.0 %	75,5 %			66.7 %	74.7 %	100.0 %

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum			50 %	50 %	50 %			40.0 %	41,01 %	43,1 %			40.0 %	82,0 %	86,2 %
				Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan			50 %	50 %	50 %			100.0 %	100,0 %	43,13			150.0 %	150,0 %	86,2 %
				Cakupan layanan terintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan			100 %	100 %	100 %			26.0 %	31,3 %	37,93 %			26.0 %	31,3 %	37,93 %

No	Indikator	Tahun				
		2004	2005	2016	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah			11,61%	<b>11,87%</b>	<b>11,43%</b>
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta			43,04%	<b>44,18%</b>	<b>46,86%</b>
3	Jumlah pekerja perempuan			20.239%	<b>20.576%</b>	<b>20.943%</b>
4	Rasio KDRT	-	-	-	<b>0,6%</b>	<b>0,6%</b>

**TABEL 2.2**

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA**

URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2004	2015	2016	2017	2018	2004	2015	2016	2017	2018	2004	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																	
1. Program keserasian kebijakan pening. kualitas anak dan perempuan				4.951.000	9.337.500				4.951.000	9.337.500				100,00%	100,00%	28,91 %	190,17 %
2. Program penguatan kelembagaan PUG dan anak				29.600.500	51.810.500				29.471.000	49.650.500				99,56%	95,83%	..... %	..... %
3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan				-	-				-	-				-	-	-	-
4. Program peningkatan peran serta & kesetaraan gender dlm pemb.				389.569.000	30.743.500				297.583.000	24.793.500				76,39%	80,65%	..... %	..... %

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya DPPdan PA Kota Bima memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

### **2.4.1. Tantangan**

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Keterbukaan yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.
- b. Masih adanya sikap arogansi dan apriori pelaku birokrasi terhadap partisipasi publik.
- c. Masih adanya pemahaman yang kurang terhadap makna desentralisasi maupun demokratisasi
- d. Ber agamnya tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri.
- e. Masih adanya tekanan-tekanan kebajikan dalam pengambilan keputusan bidang PP dan Perlindungan dan Anak sehingga mengganggu tahapan dan proses perencanaan pembangunan.

### **2.4.2. Peluang**

Adapun beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program PP dan PA.
- b. Makin meningkatnya peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/ maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunandi bidang PP dan PA. .
- c. Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya.



### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPP dan PA Kota Bima

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Rencana Straregis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan tanggung jawabnya terhadap kompleksitas pembangunan PP dan PA yang semakin beragam, pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima didalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan; Data dan informasi merupakan salah satu elemen vital guna mendukung kegiatan PP dan PA. Kekurangan dan keterbatasan data dan informasi tersebut diharapkan menjadi pertimbangan dan bahan masukan penting demi penyediaan dan penyempurnaan data-data pendukung yang diperlukan dalam perencanaan Dinas PP dan PA..
2. Belum optimalnya pastisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima.
3. Dinas PP dan PA. Kota Bima. harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kota Bima seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Dinas PP dan PA. Kota Bima.
4. Belum optimalnya pelayanan prima dalam Dinas PP dan PA. Sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang PP dan PA,

maka sudah tentu Dinas PP dan PA. Kota Bima harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima, terutama masyarakat Kota Bima.

5. Belum optimalnya kapasitas aparatur Dinas PP dan PA Kota Bima.  
Keberadaan aparatur PP dan PA merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang PP dan PA.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima**

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini Angka yg bermasalah	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan DPP & PA
			(Internal) dalam Kewenangan DPP & PA	(Eksternal) diluar Kewenangan DPP & PA	
1	2	3	4	5	6
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan	98,3 %	100 %	Kompetensi perencanaan program di DPP & PA masih sangat kurang  SDM dalam DPP & PA kurang  Aktifitas pendataan dan pemantauan masih kurang	Dukungan Fasilitas dari BP3AKB sangat kurang  Koordinasi dengan sector lain masih kurang  Dukungan anggaran operasional bagi program PP-PA masih kurang	Pemahaman seluruh stakeholder tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat kurang. -
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih	98,5 %	100 %	Kompetensi petugas dalam manajemen perempuan dan anak korban kekerasan  Kurangnya KIE tentang manajemen perempuan dan anak korban kekerasan	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	Pelaporan kejadian oleh masyarakat kerab terlambat
Cakupan layanan Rehab. Sosial oleh petugas Rehsos terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu	16,3 %	79 %	idem	Intensitas koordinasi DPP & PA dengan Dinas social dalam penerapan SPM	1. Kurangnya koordinasi dengan Dinsos 2. Kurangnya sosialisasi oleh Dinsos tentang jenis pelayanan social bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini Angka yg bermasalah	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan DPP & PA
			(Internal) dalam Kewenangan DPP & PA	(Eksternal) diluar Kewenangan DPP & PA	
1	2	3	4	5	6
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	75,5 %	80 %	Pemahaman dan kompetensi petugas dalam penerapan SPM  Kurangnya KIE tentang manajemen perempuan dan anak korban kekerasan	Intensitas koordinasi DPP & PA dengan POLRI, Pengadilan dalam penerapan SPM  Kurangnya laporan masyarakat	Keterlambatan upaya penegakan hukum
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	43,1 %	50 %	idem	Intensitas koordinasi DPP & PA dengan POLRI, Pengadilan dalam penerapan SPM	1. Pelaporan kejadian yang tidak dilakukan karena kerahasiaan, kekhawatiran tentang biaya pelayanan, kekhawatiran tentang memburuknya hubungan korban/ keluarga dengan pihak lain 2. Kurangnya dana pendukung
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	43,13 %	50 %	Advokasi dengan Walikota Bima dalam penerapan SPM	Kemampuan korban kekerasan dan keluarga  Dukungan pemerintah daerah	Kurangnya koordinasi dalam pemahaman dan pelaksanaan SPM pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Cakupan layanan terintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	37,93 %	100 %	idem	Intensitas koordinasi DPP & PA dengan seluruh Sektor terkait	Kurangnya koordinasi dalam pemahaman dan pelaksanaan SPM pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah :

**Visi :**

Terwujudnya Kota Bima sebagai Kota perdagangan dan jasa yang beriman, maju, adil dan sejahtera.

**Misi :** Mewujudkan manusia yang maju melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual.

Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Adapun sebagai Kota Jasa, Kota Bima akan lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang yang menunjang sebagai pusat transaksi dan distribusi.

Dari visi dan misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut berdasarkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, faktor yang mempengaruhi penghambat dan pendorong pelayanan adalah Sebagai berikut :

1. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam Program PP dan PA. Perlu dilakukan sosialisasi, advokasi terus menerus.
2. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Kesehatan Dasar
3. Pembiayaan Program PP dan PA melalui APBD masih kurang.

Yang menjadi isu sasaran strategi pelayanan Dinas PP-PA diperlukan tujuan yang harus dicapai dalam 5 (Lima) tahun ke depan :

1. Pengembangan program PP dan PA diarahkan untuk meningkatkan kinerja program untuk mempercepat terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

2. Memaksimalkan akses dan kualitas kesetaraan dan keadilan Gender. Meningkatkan jangkauan dan kualitas informasi.
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga, pola asuh dan tumbuh kembang anak, serta kualitas lingkungan keluarga dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan program, termasuk peningkatan kinerja, kualitas SDM dan pengembangan sistem manajemen.
5. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dan lembaga-lembaga yang berbasis masyarakat dalam bidang PP dan PA.

**Dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini.**

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPP dan PA Kota Bima terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013- 2018**

Visi : Terwujudnya Kota Bima sebagai kota perdagangan dan jasa yang beriman, maju, adil dan sejahtera.				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas PP-PA Kota Bima	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p><b>Misi Pertama :</b>                      “Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal”.</p>	Cakupan pelayanan bagi Perempuan dan anak korban kekerasan telah mendekati target namun diperkirakan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan oleh masyarakat	Masyarakat kurang proaktif	Peran aktif Lurah dan berbagai lembaga di tingkat kelurahan  Pesan- pesan agama , nilai – nilai adat melalui kurikulum pendidikan formal dan non formal
2	<p><b>Misi Kedua :</b>                      “Mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelegualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual”.</p>	31 indikator Kota Layak Anak belum terpantau secara terpadu	Kurangnya anggota masyarakat yang mau berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pemberdayaan Perempuan dan anak  Kurangnya partisipasi dan kemampuan lurah untuk melakukan sosialisasi dan advokasi kekerasan di tingkat masyarakat.  Kurangnya dukungan anggaran untuk penyiapan pengelola	Anggaran yang cukup dan berkesinambungan  Sikap proaktif seluruh stakeholder  Terbentuknya Gugus Tugas Kota Bima Layak anak

**Visi : Terwujudnya Kota Bima sebagai kota perdagangan dan jasa yang beriman, maju, adil dan sejahtera.**

No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas PP-PA Kota Bima	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	<p><b>Misi Ketiga :</b>                      “Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima”.</p>	<p>Belum dibentuknya beberapa kelembagaan seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum anak Kota Bima</li> <li>- Kota Layak Anak dengan 31 indikatornya</li> </ul> <p>Belum terlaksananya SPM bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara menyeluruh.</p>	<p>Kurangnya advokasi Kurangnya anggaran</p> <p>Kurangnya media sosialisasi / advokasi / promosi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dukungan Walikota Bima</b> melalui peraturan.</li> <li>- <b>Dukungan legislative</b> melalui peraturan daerah</li> <li>- Perencanaan tepat waktu dan sinkron di semua tingkat pemerintahan, dengan memperhatikan skala prioritas sesuai dengan kemampuan sumberdaya</li> <li>- <b>Sosialisasi</b> kepada semua stakeholder</li> <li>- Tersedianya <b>media sosialisasi/ advokasi / promosi</b> yang memadai</li> </ul>
4	<p><b>Misi Keempat :</b>                      “Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan”.</p>	<p>Cakupan layanan Rehab. Sosial oleh petugas Rehsos terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu</p>	<p>Kurangnya keterpaduan antar SKPD terkait dalam menetapkan sasaran dan prioritas sasaran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya <b>data dasar yang akurat dan digunakan secara bersama oleh instansi terkait</b> dalam menetapkan sasaran individu atau keluarga agar tercipta pemerataan antara lain Data Mikro kekerasan</li> <li>- Adanya <b>mekanisme pemantauan berkala dan mekanisme alih bantuan/ binaan</b> dari individu/ keluarga yang telah mandiri kepada yang belum mandiri</li> <li>- Peran bantu dunia usaha</li> </ul>



### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 3.3. dibawah ini

Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi perencana pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima, sebagai institusi di daerah, melaksanakan program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Pusat, Sasaran yang telah ditetapkan oleh Pusat adalah:

- a. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- b. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya sinergitas program/kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh BAPPENAS dengan program/kegiatan Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima (DPP-PA) masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu:

- a. Masih terdapat Peraturan Perundang-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah;
- b. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima, hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah.

**Tabel 3.3**

**Permasalahan Pelayanan DPP dan PA Kota Bima berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Propinsi beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya**

NO	Sasaran jangka menengah renstra SKPD dan propinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas PP-PA Kota Bima	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan	Minus 1,70 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman seluruh stakeholder tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat kurang</li> <li>2. Kompetensi SDM pengelola program PP-PA masih kurang</li> <li>3. Dukungan anggaran operasional bagi program PP-PA masih kurang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi masyarakat untuk laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>2. Banyaknya media massa yang bersedia diajak bekerjasama</li> <li>3. Dukungan Walikota dan DPRD</li> </ol>
2.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan	Minus 1,70 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman seluruh stakeholder tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat kurang</li> <li>2. Kompetensi SDM pengelola program PP-PA masih kurang</li> <li>3. Dukungan anggaran operasional bagi program PP-PA masih kurang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi masyarakat untuk laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>2. anyaknya media massa yang bersedia diajak bekerjasama</li> <li>3. ukungan Walikota dan DPRD</li> </ol>
3.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih	Minus 1,50 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan kejadian yang terlambat</li> <li>2. Pelaporan kejadian yang tidak dilakukan karena kerahasiaan, kekhawatiran tentang biaya pelayanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarkes yang siap melayani korban</li> <li>2. Adanya P2TP2A yang siap mengkoordinasikan pelayanan</li> <li>3. Partisipasi masyarakat untuk laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ol>
4.	Cakupan layanan Rehab. Sosial oleh petugas Rehsos terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu	Minus 62,07 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya koordinasi dengan Dinsos</li> <li>2. Kurangnya sosialisasi oleh Dinsos tentang jenis pelayanan social bagi perempuan dan anak korban kekerasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Walikota Bima dan DPRD</li> <li>2. SKB 5 Menteri tentang SPM pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan</li> </ol>

NO	Sasaran jangka menengah renstra SKPD dan propinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas PP-PA Kota Bima	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
6.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Minus 4,50 %	Pelaporan kejadian yang tidak dilakukan karena kerahasiaan, kekhawatiran tentang biaya pelayanan, kekhawatiran tentang memburuknya hubungan korban/ keluarga dengan pihak lain	SKB 5 Menteri tentang SPM pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan  Kesiapan P2TP2A untuk meningkatkan sosialisasi tentang SPM
7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Minus 6,90 %	1. Pelaporan kejadian yang tidak dilakukan karena kerahasiaan, kekhawatiran tentang biaya pelayanan, kekhawatiran tentang memburuknya hubungan korban/ keluarga dengan pihak lain 2. Kurangnya dana pendukung	SKB 5 Menteri tentang SPM pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan  Kesiapan P2TP2A untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak pemberi bantuan hukum
8.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Minus 6,87 %	Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan SPM pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Akses komunikasi dan transportasi antara Kota Bima dengan daerah lain relative mudah
9.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Minus 62,07 %	Pemahaman seluruh stakeholder tentang Reintegrasi perempuan dan anak korban kekerasan masih sangat kurang	

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat dilihat pada tabel 3.4. dan 3.5 dibawah ini**

Pada prinsipnya, proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus dilakukan terintegrasi dengan proses perencanaan tata ruang. Kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bima adalah menggunakan KLHS dalam rangka pengayaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima, terutama untuk mengetahui masalah lingkungan hidup yang paling menonjol di Kota Bima, mengetahui penyebab terjadinya masalah lingkungan hidup di Kota Bima, mengetahui sudah terintegrasi tidaknya masalah lingkungan dalam kebijakan, rencana dan program serta merumuskan alternatif kebijakan rencana dan program yang dapat diusulkan dalam menangani masalah lingkungan tersebut.

Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh institusi Dinas PP dan PA Kota Bima dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Bima bersepakat akan memanfaatkan hasil KLHS sebagai bahan dan sarana pendukung pengambilan keputusan; mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas masalah-masalah yang ada di kota Bima; mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi; basis untuk tata pengaturan yang lebih baik dengan terbangunnya keterlibatan para pihak dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi serta memfasilitasi kerja sama lintas batas untuk mencegah konflik berbagai pemanfaatan sumber daya alam dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

Dokumen RTRW Kota Bima sendiri telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Bima Tahun 2011-2031. Dokumen ini memuat peruntukan ruang diwilayah Kota Bima, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, dengan tetap memperhatikan isu-isu lingkungan hidup.

**Tabel 3.4**

**Permasalahan Pelayanan DPP dan PA berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.**

No	Rencana tata ruang wilayah terkait tugas dan fungsi DPP dan PA Kota Bima	Permasalahan pelayanan DPP dan PA Kota Bima	Sebagai faktor	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	Jumlah Sumber daya aparatur di DPP dan PA Kota Bima perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan setiap bidang	Kurangnya sumberdaya aparatur di kantor DPP dan PA Kota Bima sebanyak 13 orang	Kompetensi tenaga kontrak yang ada di DPP dan PA Kota Bima tidak dapat mengkompensasi kekurangan tenaga yang dibutuhkan	Komitmen PNS yang ada untuk bekerja maksimal  Dukungan Walikota Bima
2	Dukungan kepada DPP dan PA Kota Bima untuk peningkatan kualitas perencanaan di semua bidang	Kinerja perencanaan di semua bidang masih 50 %	Persepsi bahwa perencanaan SKPD sepenuhnya menjadi tanggungjawab Subbag Program	Komitmen internal untuk meningkatkan kualitas perencanaan di semua bidang
3	Dukungan Anggaran terutama untuk program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rata- rata PAGU anggaran dalam 5 tahun terakhir 96 % dari usulan kebutuhan dalam Renja	Lemahnya kinerja advokasi tentang PP-PA	Apresiasi TAPD dan DPRD terhadap program prioritas pemerintah terkait PP-PA
4	Penataan sarana gedung kantor DPP dan PA Kota Bima	Pembatas antara ruang kerja bidang- bidang masih kurang Belum adanya garasi Belum adanya penataan halaman dan taman kantor	Kurangnya anggaran	Perencanaan anggaran menyeluruh tentang aspek fisik dan tata ruang

**Tabel 3.5**

**Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan analisa Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) terkait tugas dan fungsi DPP dan PA beserta faktor penghambat dan pendorong keberhaslilan penanganannya**

No	Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait tugas dan fungsi DPP-PA Kota Bima	Permasalahan pelayanan DPP-PA Kota Bima	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Aspek Pendanaan kegiatan wajib	Keterbatasan jumlah anggaran 10 % dari total PAGU	Kurangnya pemahaman Eksekutif dan legislative tentang tupoksi DPP dan PA Kota Bima yang memerlukan dukungan anggaran yang optimal	Adanya komitmen Walikota melalui Visi dan Misi yang didukung oleh DPRD Kota Bima
2.	Aspek kesetaraan gender dalam program Pemberdayaan Perempuan	Angka kekerasan yang masih meningkat	Kurangnya pembinaan terhadap nilai-nilai keagamaan	
3.	Aspek penguatan kelembagaan	terbentuknya beberapa produk hukum PP- PA  Belum sama komitmen penentu kebijakan terhadap penegakan peraturan dan perundang-undangan tentang PP-PA.	Pemahaman seluruh stakeholder tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih sangat kurang  Dukungan anggaran operasional bagi program PP-PA masih kurang.	1. Banyaknya media massa yang bersedia diajak bekerjasama 2. Komitmen Walikota dan DPRD
4.	Aspek Rencana Aksi Daerah yang terkait dengan PP-PA	Aktifitas beberapa lembaga yang sudah terbentuk belum terlihat	Kurangnya komitmen bersama Kurangnya dukungan anggaran	Jarak tempuh antara SKPD terkait relative pendek Akses komunikasi mudah
5.	Aspek peran serta masyarakat dalam PP-PA	Kurangnya jangkauan dan kualitas sosialisasi tentang program PP-PA ke masyarakat	Kurang proaktifnya masyarakat  Kurangnya input sosialisasi PP-PA	Adanya kerjasama dengan media massa  Adanya dukungan provinsi untuk supply media KIE

No	Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait tugas dan fungsi DPP-PA Kota Bima	Permasalahan pelayanan DPP-PA Kota Bima	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
6.	Aspek ketersediaan databasis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tidak adanya data dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan aktif kejadian oleh masyarakat masih kurang</li> <li>2. Kurangnya informasi dari LSM PP- PA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya sarkes yang siap bekerjasama</li> <li>2. Adanya P2TP2A</li> <li>3. Partisipasi masyarakat untuk laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>4. SKB 5 Menteri tentang SPM pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan</li> <li>5. NSPK PP-PA sudah tersusun</li> </ol>
7.	Aspek pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Masih kurangnya kualitas pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Kurangnya koordinasi lintas sector dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan SPM yang terkait PP-PA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Walikota Bima dan DPRD</li> <li>2. SKB 5 Menteri tentang SPM pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan</li> <li>3. Kemudahan transportasi, telekomunikasi</li> <li>4. SOP</li> </ol>

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

**Isu Strategis Pembangunan Kota Bima yang tertuang di dalam BAB IV RPJMD Kota Bima tahun 2013- 2018**

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, memerlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup internasional, nasional, regional termasuk isu daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok adalah

1. Perencanaan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
2. Peningkatan Kualitas pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
3. Peningkatan Kemitraan Dengan Lintas Sektor dan Pemerintah Daerah
4. Peningkatan Advokasi, KIE pengarusutamaan gender dan perlindungan anak meskipun belum optimal
5. Pengembangan P2TP2A
6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
7. Pengintegrasian pengarusutamaan gender ke dalam program penanggulangan bencana. memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima, beberapa isu strategis yang dihadapi, antara lain sebagai berikut :

- Masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring kegiatan.
- Masih belum ada atau lemahnya sistem pendataan/informasi/data kekerasan perempuan dan data kekerasan Anak.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal.
- Belum adanya sistem dan prosedur kerja yang memadai.

Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah, terutama dalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan.



Dalam kurun waktu dua tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Dalam rangka mewujudkan target, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dilakukan analisis berbagai faktor yang mendorong maupun yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima. Hasil analisis lingkungan strategis yang berdasarkan dari hasil perumusan dan pembahasan, maka dapat disampaikan gambaran analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas

**Isu Isu strategis dan hasil penentuan Isu strategis pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bima, melalui renstra tahun rencana adalah :**

1. Penguatan kelembagaan
  - Penataan organisasi : Terbentuknya DPP dan PA, dan masih Kurangnya SDM
  - Ada beberapa produk hukum Daerah terkait dengan pemberdayaan perempuan dan hak anak
2. Kurangnya kuantitas, jangkauan dan kualitas KIE
3. Kualitas dan pemanfaatan data mikro Kekerasan untuk perencanaan di berbagai SKPD
4. Data dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum tersedia
5. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu PP dan perlindungan anak
6. Reformasi birokrasi.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat serta perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima yang memiliki tugas pokok dan fungsi merencanakan Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak

baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek dituntut harus mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat sehingga eksistensi organisasi dapat terjaga baik kredibilitas maupun akuntabilitasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima Tahun 2013-2018 adalah :

**Visi : “Terwujudnya Kesetaraan Gender, Kesejahteraan Perlindungan Anak”.**

Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima berkewajiban menyusun rencana pembangunan dengan selalu mempertimbangkan pengalaman empiris masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijaksanaan perencanaan untuk masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi

#### **Misi**

1. Meningkatkan Kualitas hidup Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Gender.
3. Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Kekerasan Berbasis Data Mikro.

Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bima periode 2013-2018 , mendukung misi Pemerintah Kota Bima , adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
2. Penyerasian kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang ditekankan pada :
  - a) Penyusunan produk hukum daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Undang- undang nomor 52 tahun 2009
  - b) Kerjasama lintas sector Pemberdayaan perempuan yang serasi dan efektif.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan hak anak
4. Penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak
5. Fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak
6. Penyediaan sistem Pendataan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menyeluruh, dengan menekankan koordinasi lintas sector dan partisipasi masyarakat dan menuju penggunaan sistem pendataan perempuan dan anak berbasis Teknologi Informatika.
7. Meningkatkan kualitas manajemen sesuai dengan kebijakan Reformasi Birokrasi
8. Pelatihan, penelitian, dan pengembangan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak;
9. Peningkatan kualitas manajemen program

**Tabel 4.1**

**Pernyataan Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD selanjutnya disusun dalam Tabel berikut dibawah ini.**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke ( % )					Bidang Penanggung jawab
						2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	60,00%	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	.....	.....	.....	52,74%	60,00%	Pemberdayaan Perempuan dan Gender
					persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	.....	.....	.....	49,63%	40,00%	Pemberdayaan Perempuan dan Gender
					persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	.....	.....	.....	12,%	30 %	Pemberdayaan Perempuan dan Gender
		Persentase penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	100.00%	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	.....	.....	.....	64.74%	100%	Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindung Khusus Anak
2	Mewujudkan Kota Layak Anak	Prosentase ketersediaan Fasilitas Layak Anak	100%	Meningkatnya capaian kriteria Kota Layak anak	Prosentase Capaian kriteria Kota Layak anak	.....	.....	.....	100%	100%	Pemenuhan Hak Anak

## **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima.**

### **2.2.1 Tujuan :**

Untuk mendukung tercapainya misi maka telah ditentukan tujuan untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai dalam waktu 2 (dua) tahun, maka telah ditetapkan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima.

1. Meningkatnya program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan Gender
2. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

### **4.2.2. Sasaran :**

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah maka telah dirumuskan sasaran strategis untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima.

- Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
  1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
  2. Persentase Partisipasi perempuan dilembaga swasta
  3. Persentase partisipasi perempuan dilembaga legislatif
- Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
  1. Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu
  2. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
  3. Rasio KDRT \*
  4. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
- Terwujudnya Bima Kota Layak Anak
  1. Porsentase (%) Kelompok Forum anak yang aktif

## **4.3. Strategi Dan Kebijakan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak.**

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi. Di dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima,

#### 4.3.1. **strategi** ditempuh dengan yaitu :

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas informasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
2. Mendorong terwujudnya pembangunan berwawasan gender dan berwawasan perlindungan anak.
3. Mendorong peningkatan jumlah, pemerataan dan kompetensi SDM program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Mendorong peningkatan jumlah dan efisiensi dan efektifitas anggaran program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Mendorong peningkatan jumlah dan efisiensi dan efektifitas anggaran program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6. Meningkatkan jangkauan dan kualitas informasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

#### 4.3.4. **Kebijakan**

1. Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk pengintegrasian perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh SKPD.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, melalui:
3. Penyusunan dan harmonisasi kelembagaan terkait perlindungan anak;
  - a. Peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak;
  - b. Peningkatan penyediaan data dan informasi gender dan perlindungan anak;
  - c. Peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak



## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan maupun program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima. yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima. yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kota Bima yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut.

Dalam rangka mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima.

dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima, maka ditetapkan sejumlah program dan kegiatan sebagai berikut :

Adapun untuk uraian yang lebih detil mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2013 – 2018 dirumuskan berbagai program dan kegiatan yang bersifat strategis sebagai program dan kegiatan pilihan, Indikator Kinerja serta kelompok sasaran yang memiliki prioritas tinggi. **dapat dilihat pada tabel 5.1. dibawah ini**



Tabel 5.1

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2	2.02.01	18										88.24 %	200.865.000,-	100 %	307.271.000,-	100 %	307.271.000,-	Dinas PP dan PA	Kota Bima
		persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2	2.02.01	18	01	Pembinaan organisasi perempuan	laporan pelaksanaan kegiatan								42.783.000		120.324.500		120.324.500	Dinas PP dan PA	Kota Bima
		persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	2	2.02.01	15	03	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender PP	Jumlah data Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)								5.851.000		14.375500		14.375500	Dinas PP dan PA	Kota Bima
		persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	2	2.02.01	15	05	Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	Jumlah Perda Perlindungan Anak dan Perwali PA								152.231.000		172.571.000		172.571.000	Dinas PP dan PA	Kota Bima

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah KDRT	...	...	...	...	...	...	...	79.540.500		116.975.500		116.975.500	Dinas PP dan PA	Kota Bima
					Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan hak Anak di daerah		...	...	...	...	...	...	...	20.353.000		23.751.000		23.751.000	Dinas PP dan PA	Kota Bima
					Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan		...	...	...	...	...	...	...	17.607.500		21.849.000		21.849.000	Dinas PP dan PA	Kota Bima
					Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT PP dan PA		...	...	...	...	...	...	...	31.470.000		33.772.000		33.772.000	Dinas PP dan PA	Kota Bima
					Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan		...	...	...	...	...	...	...	10.110.000		37.603.500		37.603.500		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							2014		2015		2016		2017		2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	Persentase Imbaga perempuan yang dibina								100 %	168.4247.500	100 %	130.536.500,-	130.536.500,-		Dinas PP dan PA	Kota Bima
			2.2.02.01.150	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan			...	...	...	...	...	...	...	5.730.000		21.767.500	21.767.500		Dinas PP dan PA	Kota Bima
			2.2.02.01.150	Fasilitasi pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2A			...	...	...	...	...	...	...	24.107.500		35.708.000	35.708.000		Dinas PP dan PA	Kota Bima
				Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan			...	...	...	...	...	...	...	108.628.000		14.688.000	14.688.000		Dinas PP dan PA	Kota Bima
				Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak			...	...	...	...	...	...	...	18.030.500	—	32.608.500	32.608.500	—	Dinas PP dan PA	Kota Bima
				Evaluasi pelaksanaan PUG			...	...	...	...	...	...	...	26.966.000	—	25.764.500	25.764.500	—	Dinas PP dan PA	Kota Bima

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							2014		2015		2016		2017		2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Mewujudkan Kota Layak Anak	Meningkatnya capaian kriteria Kota Layak anak	Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif			<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>									73.912.500,-		258.932.000		258.932.000	Dinas PP dan PA	Kota Bima
			2	2.02.01	16	10 - Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	jumlah forum anak dan remaja		...	...	...	...	...	...	73.912.500,-	74.626.000		74.626.000	Dinas PP dan PA	Kota Bima
						Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.			...	...	...	...	...	...		32.608.500		32.608.500	Dinas PP dan PA	Kota Bima
						Penguatan Kelompok Forum Anak			...	...	...	...	...	...		57.961.500		57.961.500	Dinas PP dan PA	Kota Bima
						Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak			...	...	...	...	...	...		53.476.000		53.476.000	Dinas PP dan PA	Kota Bima
						Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak			...	...	...	...	...	...		40.260.000		40.260.000	Dinas PP dan PA	Kota Bima

## INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Kode rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Thn 0) 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab	
				Tahun 1 (2014)		Tahun 2 (2015)		Tahun 3 (2016)		Tahun 4 (2017)		Tahun 5 (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	02										1.508.719.913		1.596.155.908		6.807.616.571		
2	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya kebutuhan administrasi perkantoran	100%						100%	436.214.363	100%	458.025.081	100%	2.047.900.193	DPP PA
2	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur	100%						100%	734.246.100	100%	770.958.405	100%	279.568.505	DPP PA
2	02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan latihan	4 Orang						7 Orang	31.972.500	0 Orang	33.571.125	0 Orang	129.448.625	DPP PA
2	02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	% SKPD dengan indeks SAKIP baik	45%						88,24%	106.879.500	100%	112.223.475	100%	440.911.975	DPP PA

Kode rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Thn 0) 2013	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab			
				Tahun 1 (2014)		Tahun 2 (2015)		Tahun 3 (2016)		Tahun 4 (2017)		Tahun 5 (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2	02	15	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio KDRT	0,65%						0,56%	60.000.000	0,55%	75.000.000	0,55%	237.799.500	DPP PA		
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu melaksanakan KTPA dan PPT/PKT di RS	88,30%								100,00 %		100,00%		100,00%		
				Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	58,13%									68,96%		67,60%		67,60%	
2	02	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Pembinaan Terhadap Organisasi Perempuan	70,83							78%	57.913.275	80%	60.808.939	80%	336.535.714	DPP PA	

Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangu n	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Thn 0) 2013	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penan ggung jawab
			Tahun (2014)		Tahun (2015)		Tahun (2016)		Tahun (2017)		Tahun (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak	Rasio KDRT	0,65%							0,56%	30.467.850	0,55%	31.991.243	0,55%	122.552.093	DPP PA
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	45,00%							49,00%	51.026.325	50,00%	53.577.641	50,00%	212.899.966	DPP PA

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indicator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan . Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam rentang lima tahun (2018-2023) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima.

**Tabel Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 :**



**TABEL 6.1**

INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018
			Tahun 0 (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	-	-	-	-	52,74%	60,00%	60,00%
		Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	-	-	-	-	49,63%	40,00%	40,00%
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	-	-	-	-	12,00%	12,00 %	12,00 %
2	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Peremp.dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%
3	Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak					100%	100%	100%



## BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2013-2018 ini adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD, yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima ini dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2017-2018 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima setiap tahunnya. Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima akan menjadi acuan/pedoman dalam penentuan-penentuan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima).

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan Dinas PP dan PA Kota Bima dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan hak Anak Tumbuh Seimbang 2020 serta berkeadilan Gender.



Raba Bima, Pebruari 2017  
Kepala DP dan PA

**Drs. M. Nur.H. Amajid. MH.**

Pembina Utama Muda/ IV.c

Nip. 19650213 199203 1 011



**DATA INFORMASI CAPAIAN DARI SETIAP INDIKATOR KINERJA RPJMD 2013-2018  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK  
KOTA BIMA TAHUN 2017**

Aspek/fokus/bidang uusan/indikator kinerja penbagunan daerah	Kondisi Kinerja awal pada periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Realisasi capaian Setiap Tahun		
	Tahun 0 (2013)	2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rasio KDRT	0,56	0,52	0,74	0,43	0,39	0,35	0,35	0,52	0,38	0,46
Cakupan Pembinaan terhadap Organisasi	70,83 %	72,66%	74,49%	76,32%	78,16%	80,00%	80,00%	83,33%	87,096%	84,375%
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu melaksanakan KTPA dan PPT/PKT di RS	88,30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,00%	63,00%
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	58,13%	75%	69%	66,84%	68,96%	67,60%	67,60%	0	0	0
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	45,00%	45,%5	46%	47,00%	49,00%	50,00%	50,00%	48,04%	49,00%	51,030%



Raba-Bima, 23 Maret 2017

Kepala DPP dan PA

**Dr. M. Nur.H. Amajid. MH.**

Pembina Utama Muda/ IV.c

Nip. 19650213 199203 1 011

**DOKUMEN**  
**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**TAHUN 2018**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLIDUNGAN ANAK**  
**KOTA BIMA**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala Rahmatnya, sehingga penyusunan Rencana kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.


Penyusunan Rencana Kerja (Renja) satuan kerja Perangkat Daerah renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja adalah merupakan acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima selama periode satu (1) tahun, yaitu tahun 2018 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kota Bima.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2018 telah tersusun melalui beberapa tahapan yang cukup panjang dan rumit.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajian untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja ini untuk masa mendatang.

Raba-Bima, 5 Februari 2018  
Kepala DPP - PA  
DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
**Drs. M. Nur. H. Amajid, MH.**  
Nip. 19650213 199203 1 011



## DAFTAR ISI

Halaman	
judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar belakang.....	1
2. Dasar Hukum.....	4
3. Maksud dan Tujuan penyusunan Renja.....	6
4. Sistematika penulisan.....	6
BAB.II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja mengacu pada APBD .....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	12
2.3. Isu – isu Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.....	13
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	14
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan.....	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	28
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan provinsi.....	28
3.2. Tujuan dan Sasaran.....	29
3.3. Program dan kegiatan.....	29
BAB IV PENUTUP.....	35



# BAB I.

## PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

Pemberdayaan Perempuan adalah upaya kemampuan untuk memperoleh akses dan kendali terhadap sumberdaya ekonomi, politik, social, budaya, agar Perempuan dan Anak dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah dirinya dan lingkungan.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan & diskriminasi (UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 2 )

Hak Anak (UU 23/2002 Pasal 4-13 ) :

1. Kelangsungan hidup;
2. Tumbuh dan berkembang;
3. Partisipasi;
4. Perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi;
5. Hak sipil dan kebebasan

## **Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima**

Terwujudnya Kesetaraan Gender, Kesejahteraan Perlindungan Anak.

### **MISI.**

1. Meningkatkan Kualitas hidup Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Gender.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
4. Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi kekerasan Berbasis Data Mikro.

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima merupakan suatu proses penyusunan rencana secara bottom up melalui tahapan dan siklus. Tahapan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima 2018 adalah ;

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
4. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
5. Perumusan tujuan dan sasaran;
6. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
7. Perumusan kegiatan prioritas;
8. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
9. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
10. Pembahasan forum SKPD; dan
11. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di atas akan dicapai melalui penerapan Strategi dan Kebijakan sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana strategis tahun 2017- 2018.

Misi	Strategi	Kebijakan
<p>Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas informasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.</li> <li>2. Mendorong terwujudnya pembangunan berwawasan gender dan berwawasan perlindungan anak</li> <li>3. Mendorong peningkatan jumlah, pemerataan dan kompetensi SDM program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>4. Mendorong peningkatan jumlah dan efisiensi dan efektifitas anggaran program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>5. Mendorong peningkatan jumlah dan efisiensi dan efektifitas anggaran program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>6. Meningkatkan jangkauan dan kualitas informasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk pengintegrasian perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh SKPD.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, melalui:</li> <li>3. Penyusunan dan harmonisasi kelembagaan terkait perlindungan anak;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak;</li> <li>b. peningkatan penyediaan data dan informasi gender dan perlindungan anak;</li> <li>c. peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak</li> </ol> </li> </ol>

## 2 . Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT
5. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013;
6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) , dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Untuk uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan;
9. Peratuaran meteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak;
10. Peratuaran meteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 11 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak;
11. Peratuaran meteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Evaluasi Kota Layak Anak;
12. Peratuaran meteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 03 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perlindungan Anak

13. Peraturan meteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 04 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Kota Layak Anak
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota:
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bima:
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima.
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 184);
18. Peraturan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 322).

### **3 Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PP dan PA Kota Bima Tahun 2018 .**

#### **Maksud adalah :**

- a. Himpunan usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Bima di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Sebagai informasi tentang kebutuhan Dinas PP dan PA Kota Bima dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2018
- c. Sebagai upaya perbaikan akuntabilitas kinerja perencanaan pada Dinas PP dan PA Kota Bima

#### **Tujuan adalah :**

untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Kota Bima Tahun 2018

### **4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana kerja Dinas PP dan PA Kota Bima 2018 sbb :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

1. Latar belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan penyusunan Renja
4. Sistematika penulisan

#### **BAB.II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja mengacu pada APBD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – isu Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan provinsi.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran
- 3.3. Program dan kegiatan

#### **BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPP-PA TAHUN LALU.

Proses penyusunan perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi Rencana Strategis Dinas PP-PA Kota Bima tahun 2017-2018 yang memuat Indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, tetapi Dinas PP-PA baru terbentuk pada tahun 2017 maka Renstra DPP-PA Kota Bima bukan 5 (lima) tetapi kurun waktu 2 tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja mengacu pada APBD**

- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PP dan PA Kota Bima tahun sebelumnya belum ada dan capaian Renstra belum ada dan Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja pada APBD tahun 2017 juga belum ada, hanya pelaksanaan Renja tahun 2017.
- b. Adapun alokasi anggaran, program dan kegiatan tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran 1 ( **terlampir** ).

Lampiran 1 Program Kegiatan dan Anggaran sebagai berikut :

NO				PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN	PROSENTA SE (%)
1				2	3	4	5	6
KODE REKENING								
2.02	2.02.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		313.778.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	01	01		Penyediaan jasa surat menyurat	30.780.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	01	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.560.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	01	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)	10.950.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	01	07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	30.600.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	01	08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.762.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	01	10		Penyediaan alat tulis kantor	18.236.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	01	11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.640.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	01	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.300.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	01	13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	01	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	01	17		Penyediaan makanan dan minuman	12.350.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	01	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	141.000.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	01	19		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	9.000.000	0.00	0.00%



NO				PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALIS ASI ANGGA RAN KEGIAT AN	PROS ENTA SE (%)
1				2	3	4	5	6
KODE REKENING								
2.02	2.02.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		147.014.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	02	05		Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasinal	-	-	-
2.02	2.02.01	02	07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	76.384.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	02	10		Pengadaan mebelair	38.250.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	02	22		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor			
2.02	2.02.01	02	24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	24.030.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	02	26		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8.350.000		
2.02	2.02.01	02	28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	03		Program Peningkatan disiplin Aparatur		10.500.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	03	02		Pengadaan Olahraga	0	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	03	05		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	10.500.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0		
2.02	2.02.01	05	04		Konsultasi dan Studi Banding	0	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	06		Program Peningkatan dan Pengemb. Sistik Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan		37.200.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	06	01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kenarja SKPD	0		
2.02	2.02.01	06	02		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	9.600.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	06	04		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	9.600.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	06	05		Penyusunan Rencana Kerja Tahunan RKA/DPA /DPPA SKPD	34.800.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	06	06		Penyusunan LAKIP. LPJ dan LPPD	19.200.000	0.00	0.00%

NO				PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARA N	REALI SASI ANGG ARAN KEGIA TAN	PROS ENTA SE (%)
1				2	3	4	5	6
KODE REKENING								
2.02	2.02.01	06	07		Penyusunan Laporan Keuangan Per Triwulan	0	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	06	08		Penyusunan Laporan Gaji berkala, Impasing dan KP4	0	0.00	0.00%
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>15</b>		<b>Program Keserasian kebijakan peningk. kualitas Anak &amp;Per.</b>		<b>168.424.500.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
2.02	2.02.01	15	03		Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraann gender PP dan perlindungan anak	7.218.500	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	15	03		Penyusunan dan Penertiban prodak hukum Daerah di bidang perlindungan Perempuan dan Anak	162.573.500	0.00	0.00%
<b>2.02</b>	<b>2.02.01</b>	<b>16</b>		<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>		<b>153.061.500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
2.02	2.02.01	16	01		Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	5.730.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	16	02		Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A.	28.707.500	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	16	06		Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	5.730.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	16	07		Evaluasi Pelaksanaan PUG	18.030.500		
2.02	2.02.01	16	08		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	11.726.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	16	10		Pengembangan kota sebagai Kota Layak Anak	83.173.500	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	16	11		Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di Luar Sekolah.	0	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	16	12		Penguatan Kelompok Forum anak dan Remaja	0	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	16	13		Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak	0	0.00	0.00%

NO				PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN	PROSE NTASE (%)
1				2	3	4	5	6
KODE REKENING								
2.02	2.02.01	17		<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>		<b>115.965.500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
2.02	2.02.01	17	01		Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di Daerah	20.353.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	17	02		Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	0	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	17	03		Panenyusunan sistim perlindungan bagi perempuan	17.607.500	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	17	05		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	0	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	17	06		Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	37.070.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	17	08		Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	10.110.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	17	10		Pembinaan dan Lomba kecamatan sayang ibu (KSI) dan rumah sakit sayang ibu (RSSI)	30.425.000	0.00	0.00%
2.02	2.02.01	18		<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>		<b>42.783.000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
2.02	2.02.01	18	01		Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	42.783.000	0.00	0.00%
<b>JUMLAH</b>						<b>1.042.726.500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

Dari tabel diatas, pelaksanaan program dan kegiatan belanja langsung menghasilkan keluaran (output)

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.**

Berdasarkan sasaran/target Rencana (RENSTRA) Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk urusan wajib serta Indikator Kinerja Pelayanan. Kinerja Pelayanan digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan.

Dengan melihat kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dapat mensinergiskan proses perencanaan baik di tingkat Pusat,Provinsi maupun tingkat Kota Bima dalam rangka :

- a. Perencanaan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
- b. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
- c. Peningkatan Kemitraan Dengan Lintas Sektor dan Pemerintah Daerah
- d. Peningkatan Advokasi, KIE Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak meskipun belum optimal
- e. Pengembangan P2TP2A
- f. Pengintegrasian pengarusutamaan gender ke dalam program penanggulangan bencana
- g. Menoptimalkan partisipasi Masyarakat

### 2.3. Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang di singkat DPP-PA Kota Bima di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah Kota Bima dan Peraturan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima.

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima

Yang merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penjang pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah Kota Bima.

Yang menjadi isu penting pelayanan tugas dan fungsi Dinas PP-PA Kota Bima dengan uraian sebagai berikut :

- a. Penguatan kelembagaan
  - Penataan organisasi : Terbentuknya DPP dan PA Kota Bima, dan masih Kurangnya SDM
  - Ada beberapa produk hukum Daerah terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan hak Anak
- b. Kurangnya kuantitas, jangkauan dan kualitas KIE
- c. Kualitas dan pemanfaatan data mikro Kekerasan untuk perencanaan di berbagai SKPD
- d. Data dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum tersedia
- e. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- f. Reformasi birokrasi.
- g. Pengembangan program Dinas PP dan PA Kota Bima diarahkan untuk meningkatkan kinerja program untuk mempercepat terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
- h. Memaksimalkan akses dan kualitas kesetaraan dan keadilan Gender. Meningkatkan jangkauan dan kualitas informasi.

- i. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga, pola asuh dan tumbuh kembang anak, serta kualitas lingkungan keluarga dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- j. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan program, termasuk peningkatan kinerja, kualitas SDM dan pengembangan sistem manajemen.
- k. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dan lembaga-lembaga yang berbasis masyarakat dalam bidang PP dan PA.
- l. Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

#### **2.4. Reviw terhadap Rancangan awal RKPD**

Rencana Kerja (Renja) bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perenanaan yang baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif,efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan terdiri dari Renstra SKPD Renja SKPD.

Dokumen Perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya rencana kerja (Renja) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2018. Program dan kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai dengan rancangan awal RKPD kota Bima tahun 2017 agar terwujudnya dokumen perencanaan mulai dari RPJMD dengan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan oleh Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima. ***Dapat dilihat dalam tabel Reviw terhadap Rancangan awal RKPD di bawah ini.***

### Reviw terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2017

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Ket.
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>541.681.500</b>	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Bima	Terlaksananya Kegtn. Surat Menyurat	12 Bulan	31.320.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Bima	Terlaksananya Kegtn. Surat Menyurat	12 Bulan	31.320.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	Terlaksananya Akses terhadap telepon,air,listrik Teknologi Informatika (Internet) berjalan lancar	12 Bulan	24.500.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	Terlaksananya Akses terhadap telepon,air,listrik Teknologi Informatika (Internet) berjalan lancar	12 Bulan	24.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)	Kota Bima	Tersedianya jasa pemeliharaan Kendaraan dan terbayarnya operasianal supir	12 Bulan	15.560.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)	Kota Bima	Tersedianya jasa pemeliharaan Kendaraan dan terbayarnya operasianal supir	12 Bulan	15.560.000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Bima	Terlaksananya pembayaran Jasa Administrasi Keuangan dan Honorarium Tim Pengumpul Data dan Penyusun Data Naskah/Dokumen ASET yang tertib	12 Bulan	72.500.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Bima	Terlaksananya pembayaran Jasa Administrasi Keuangan dan Honorarium Tim Pengumpul Data dan Penyusun Data Naskah/Dokumen ASET yang tertib	12 Bulan	72.500.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Bima	Tersedianya Jasa tenaga Kebersihan (Clening Servise) dan keamanan Kantor	12 Bulan	21.962.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Bima	Tersedianya Jasa tenaga Kebersihan (Clening Servise) dan keamanan Kantor	12 Bulan	21.962.000	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket.
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	Adanya Alat Tulis Kantor yang memadai	12 Bulan	40.247.000	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	Adanya Alat Tulis Kantor yang memadai	12 Bulan	40.247.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bima	Tersedianya Barang Cetak untuk dokumen Dinas	12 Bulan	21.072.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bima	Tersedianya Barang Cetak untuk dokumen Dinas	12 Bulan	21.072.500	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	Tersedianya komponen alat Listrik kantor yang memadai	12 Bulan	4.175.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	Tersedianya komponen alat Listrik kantor yang memadai	12 Bulan	4.175.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor (Televisi)	2 Unit	10.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor (Televisi)	2 Unit	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima	Tersedianya Kebutuhan Pemberitaan dari Jasa Media Cetak	12 Bulan	4.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima	Tersedianya Kebutuhan Pemberitaan dari Jasa Media Cetak	12 Bulan	4.800.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Tersedianya Makan Minum Pegawai yang cukup Memadai	12 Bulan	25.200.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Tersedianya Makan Minum Pegawai yang cukup Memadai	12 Bulan	25.200.000	



No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Ket
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Bima	Terselenggaranya Fungsi Koordinasi dengan Lintas Sektor dinas luar daerah	12 Bulan	250.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Bima	Terselenggaranya Fungsi Koordinasi dengan Lintas Sektor dinas luar daerah	12 Bulan	250.000.000	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Kota Bima	Terselenggaranya Fungsi Koordinasi dengan Lintas Sektor /dinas dalam daerah	12 Bulan	30.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Kota Bima	Terselenggaranya Fungsi Koordinasi dengan Lintas Sektor /dinas dalam daerah	12 Bulan	30.000.000	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Ket
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>					<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>221.290.000</b>	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	Adanya pengadaan Desktop Personal Computer Lengkap dengan Printer (PC) yang memadai	4 Paket	76.384.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	Adanya pengadaan Desktop Personal Computer Lengkap dengan Printer (PC) yang memadai	4 Paket	74.440.000	
	Pengadaan mebelair	Kota Bima	Tersedianya meubeler yang memadai	1 Paket	38.250.000	Pengadaan mebelair	Kota Bima	Tersedianya meubeler yang memadai	1 Paket	44.650.000	
	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	Kota Bima	Terpeliharanya kegiatan Pengecatan dan perbaikan	1 Paket	9.500.000	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	Kota Bima	Terpeliharanya kegiatan Pengecatan dan perbaikan	1 Paket	9.500.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Terlaksananya servis,Penggantian suku cadang, bahan bakar minyak, oli kendaraan operasional dinas	1 Tahun.	24.030.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Terlaksananya servis,Penggantian suku cadang, bahan bakar minyak, oli kendaraan operasional dinas	1 Tahun.	71.650.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	Terlaksananya kegiatan jasa pemeliharaan perlengkapan kantor	1 Paket	9.500.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	Terlaksananya kegiatan jasa pemeliharaan perlengkapan kantor	1 Paket	9.500.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Bima	Terlaksananya jasa pemeliharaan peralatan Komputer kantor	20 Unit	20.350.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Bima	Terlaksananya jasa pemeliharaan peralatan Komputer kantor	20 Unit	20.350.000	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>					<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>				<b>23.435.000</b>	
	Pengadaan Pakaian OlahRaga	Kota Bima	Terlaksananya pengadaan Pakeian Olahraga	31 Stel	10.500.000	Pengadaan Pakaian OlahRaga	Kota Bima	Terlaksananya pengadaan Pakeian Olahraga	31 Stel	10.500.000	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Bima	Belanja pakaian adat daerah	31 Lbr	12.935.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Bima	Belanja pakaian adat daerah	31 Lbr	12.935.000	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					
	Konsultasi dan Studi Banding	Kab. Lombok Tengah	Konsultasi dan Studi Banding	1 kali	37.200.000	Konsultasi dan Studi Banding	Kab. Lombok Tengah	Konsultasi dan Studi Banding	1 kali	37.200.000	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	<b>PROGRAM PENINGK. PENGEMB.SISTIM PELAPOR CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.</b>					<b>PROGRAM PENINGK. PENGEMB.SISTIM PELAPOR CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.</b>				<b>159.880.000</b>	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kenarja SKPD	Kota Bima	Terlaksananya kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	2 Lap.	37.280.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kenarja SKPD	Kota Bima	Terlaksananya kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	2 Lap.	37.280.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kota Bima	Terlaksananya penyusunan laporan Keuangan Semester dan Prognosis	1 Lap.	11.971.000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kota Bima	Terlaksananya penyusunan laporan Keuangan Semester dan Prognosis	1 Lap.	11.200.000	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Bima	Terlaksananya penyusunan dokumen laporan Keuangan akhir tahun	3 Lap.	10.342.750	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Bima	Terlaksananya penyusunan dokumen laporan Keuangan akhir tahun	3 Lap.	11.200.000	
	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan RKA/DPA /DPPA SKPD	Kota Bima	Terlaksananya penyusunan dokumen RKA, DPA, DPPA.	4 Dok.	36.402.250	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan RKA/DPA /DPPA SKPD	Kota Bima	Terlaksananya penyusunan dokumen RKA, DPA, DPPA.	4 Dok.	39.400.000	
	Penyusunan LAKIP. LPJ dan LPPD	Kota Bima	Tersusunya Laporan LAKIP, LPPD, dan terlaksananya Bimbingan teknis LAKIP (Pelayanan Prima)	2 Dok.	19.869.000	Penyusunan LAKIP. LPJ dan LPPD	Kota Bima	Tersusunya Laporan LAKIP, LPPD, dan terlaksananya Bimbingan teknis LAKIP (Pelayanan Prima)	2 Dok.	22.400.000	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Penyusunan Laporan Keuangan Per Triwulan	Kota Bima	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Per Triwulan	4 Triwulan	19.650.000	Penyusunan Laporan Keuangan Per Triwulan	Kota Bima	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Per Triwulan	4 Triwulan	19.200.000	
	Penyusunan Laporan Gaji berkala, Impasing dan KP4	Kota Bima	Tersusunnya Laporan Laporan Gaji berkala, Impasing dan KP4	3 laporan	8.845.000	Penyusunan Laporan Gaji berkala, Impasing dan KP4	Kota Bima	Tersusunnya Laporan Laporan Gaji berkala, Impasing dan KP4	3 laporan	19.200.000	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Kota Bima	Terlaksananya kegiatan Konsultasi dan Studi Banding Dinas PP dan PA sebanyak 20 Orang Pegawai di kab. Sumbawa besar	1 kali	30.000.000	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Kota Bima	Terlaksananya kegiatan Konsultasi dan Studi Banding Dinas PP dan PA sebanyak 20 Orang Pegawai di kab. Sumbawa besar	1 kali	30.000.000	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Ket
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	<b>Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak &amp; Perempuan</b>		Terlaksananya Penyusunan Laporan Gaji berkala, Impasins dan KP4			<b>Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak &amp; Perempuan</b>					
	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender PP dan perlindungan anak	Kota Bima	Meningkatnya pemahaman peserta terhadap kesetaraan gender Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	40 Orang	5.851.000	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender PP dan perlindungan anak	Kota Bima	Meningkatnya pemahaman peserta terhadap kesetaraan gender Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	40 Orang	5.851.000	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Ket
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>8</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>					<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>				<b>181.624.500</b>	
	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	Kota Bima	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta (Organisasi Perempuan) tentang PUG.	40 Organisa.	8.154.000	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	Kota Bima	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta (Organisasi Perempuan) tentang PUG.	40 Organisa.	8.154.000	
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A.	Kota Bima	Terbinanya kelompok P2TP2A pada 5 Kecamatan	27 Kelompok	33.146.000	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A.	Kota Bima	Terbinanya kelompok P2TP2A pada 5 Kecamatan	27 Kelompok	33.146.000	
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Kota Bima	Terbinanya kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan EX TKI	40 Orang	11.626.500	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Kota Bima	Terbinanya kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan EX TKI	40 Orang	11.626.500	
	Evaluasi Pelaksanaan PUG	Kota Bima	Tersedianya data terpilah kegiatan yang responsif gender	5 Kecamatan	21.845.000	Evaluasi Pelaksanaan PUG	Kota Bima	Tersedianya data terpilah kegiatan yang responsif gender	5 Kecamatan	21.845.000	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Ket
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak	Kota Bima	Terkumpulnya Data Kekerasan Anak di 5 kecamatan	5 kecamatan	20.495.000	Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak	Kota Bima	Terkumpulnya Data Kekerasan Anak di 5 kecamatan	5 kecamatan	20.495.000	
	Pengembangan kota sebagai Kota Layak Anak	Kota Bima	Adanya capaian 31 Indikator KLA, rincian Pembagian Gugus Tugas KLA Tingkat Kecamatan, Data Bases terpilah KLA, profil anak dan remaja pada masing-masing gugus Tugas, Pemahaman dan pengetahuan anak tentang kelangsungan hidup anak serta partisipasi anak dalam KLA	7 Kegiatan	90.605.000	Pengembangan kota sebagai Kota Layak Anak	Kota Bima	Adanya capaian 31 Indikator KLA, rincian Pembagian Gugus Tugas KLA Tingkat Kecamatan, Data Bases terpilah KLA, profil anak dan remaja pada masing-masing gugus Tugas, Pemahaman dan pengetahuan anak tentang kelangsungan hidup anak serta partisipasi anak dalam KLA	7 Kegiatan	90.605.000	



No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Ket
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pemetaan Potensi Partisipasi Anak Kota Bima yang berperan dlm Perlindungan Anak dan Remaja	Kota Bima	Adanya Pemetaan Potensi Partisipasi Anak Kota Bima yang berperan dlm Perlindungan Anak dan Remaja	5 kecamatan	21.087.000	Pemetaan Potensi Partisipasi Anak Kota Bima yang berperan dlm Perlindungan Anak dan Remaja	Kota Bima	Adanya Pemetaan Potensi Partisipasi Anak Kota Bima yang berperan dlm Perlindungan Anak dan Remaja	5 kecamatan	21.087.000	
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Remaja (P2TPAR)	Kota Bima	Terfasilitasinya pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Remaja (P2TPAR)	5 kecamatan	27.952.000	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Remaja (P2TPAR)	Kota Bima	Terfasilitasinya pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Remaja (P2TPAR)	5 kecamatan	27.952.000	
	Penguatan Kelompok Forum anak dan Remaja	Kota Bima	Adanya Peningkatan keberadaan kelompok forum anak dan ramaja	5 kecamatan	20.611.000	Penguatan Kelompok Forum anak dan Remaja	Kota Bima	Adanya Peningkatan keberadaan kelompok forum anak dan ramaja	5 kecamatan	20.611.000	
	Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di Luar Sekolah.	Kota Bima	Terlaksananya Pendataan dan Informasi Kelompok Anak di luar Sekolah	5 kecamatan	15.430.000	Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di Luar Sekolah.	Kota Bima	Terlaksananya Pendataan dan Informasi Kelompok Anak di luar Sekolah	5 kecamatan	15.430.000	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>					<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>				<b>151.386.000</b>	
	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di Daerah	Kota Bima	Adanya Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Hak-Hak Anak	25 Orang	21.240.000	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di Daerah	Kota Bima	Adanya Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Hak-Hak Anak	25 Orang	21.240.000	
	Panenyusunan sistim perlindungan bagi perempuan	Kota Bima	Terkumpulnya Data Potensi organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistim perlindungan anak pada 5 Kecamatan	5 Kecamatan	20.950.000	Panenyusunan sistim perlindungan bagi perempuan	Kota Bima	Terkumpulnya Data Potensi organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistim perlindungan anak pada 5 Kecamatan	5 Kecamatan	20.950.000	
	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Kota Bima	Adanya laporan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara Oneline.	12 Kali Lap.	49.070.000	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Kota Bima	Adanya laporan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara Oneline.	12 Kali Lap.	49.070.000	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Kota Bima	Tertanganinya upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	40 Orang	35.820.000	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Kota Bima	Tertanganinya upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	40 Orang	35.820.000	
	Pembinaan dan Lomba kecamatan sayang ibu (KSI) dan rumah sakit sayang ibu (RSSI)	Kota Bima	Tepilihnya Kecamatan sayang Ibu (KSI) dan Rumah Sakit Sayang Ibu (RSSI) terbaik Tingkat Kota Bima	1 kecamatan	40.275.000	Pembinaan dan Lomba kecamatan sayang ibu (KSI) dan rumah sakit sayang ibu (RSSI)	Kota Bima	Tepilihnya Kecamatan sayang Ibu (KSI) dan Rumah Sakit Sayang Ibu (RSSI) terbaik Tingkat Kota Bima	1 kecamatan	40.275.000	
<b>10</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>					<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>				<b>53.069.500</b>	
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Kota Bima	Terbinanya Organisasi Perempuan dan Terlaksananya Peringatan Hari Ibu Tk. Kota Bima	2 Kegiatan	53.069.500	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Kota Bima	Terbinanya Organisasi Perempuan dan Terlaksananya Peringatan Hari Ibu Tk. Kota Bima	2 Kegiatan	53.069.500	

## **2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018 merupakan Rencana Kerja tahun Pertama Penjabaran dari pelaksanaan Pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2017-2018 rencana kerja ini disusun dengan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2018

Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018 didasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2017-2018 dengan tetap memperhatikan program prioritas, agar didalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan provinsi.**

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima tertuang pada Peraturan Walikota Bima Nomor 46 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 46 Tahun 2016, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Kantor dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan dan tugas dekosentrasi.

Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bima periode 2017-2018, mendukung misi Pemerintah Kota Bima, adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Penyerasian kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditekankan pada :
  - Penyusunan produk hukum daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Undang-undang nomor 52 tahun 2009
  - Kerjasama lintas sector Pemberdayaan perempuan yang serasi dan efektif.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan pemberdayaan Perempuan dan pengarusutamaan hak Anak .
  - Penyediaan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
  - Fasilitasi pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
  - Penyediaan sistem Pendataan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menyeluruh, dengan menekankan koordinasi lintas sector dan partisipasi masyarakat dan menuju penggunaan sistem pendataan perempuan dan anak berbasis Teknologi Informatika.
  - Meningkatkan kualitas manajemen sesuai dengan kebijakan Reformasi Birokrasi
  - Pelatihan, penelitian, dan pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

### **3.2. Tujuan dan Sasaran renja SKPD.**

Tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan koordinasi dengan semua stekholder;
2. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi dan kualitas perencanaan dan pelaporan;
3. Tersedianya data mikro kekerasan perempuan dan Anak untuk kebutuhan perencanaan
4. Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan Anak di Kota Bima
5. Meningkatnya aktifitas kelompok/ lembaga ekonomi perempuan;

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah maka telah dirumuskan sasaran strategis untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima.

- Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
  1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
  2. Persentase Partisipasi perempuan dilembaga swasta
  3. Persentase partisipasi perempuan dilembaga legislati
- Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
  1. Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Peremp.dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu
  - 2 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
  - 3 Rasio KDRT \*
  - 4 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
- Terwujudnya Bima Kota Layak Anak
  1. Porsentase (%) Kelompok Forum anak yang aktif

### **3.3. Program dan kegiatan.**

#### **3.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima tahun 2017-2018 serta Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas PP-PA Kota Bima 2017-2018.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas PP-PA Kota Bima  
**Dapat dilihat IKU di bawah ini :**

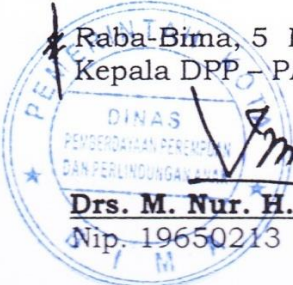
### Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PP-PA Kota Bima

SKPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Dinas PEMBERDAYAA PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN Anak	Meningkatnya program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah } 21.35 \text{ Org}}{\text{Jumlah pekerja di lembaga pemerintah } 4.048 \text{ Org}} \times 100\% = 52,74\%$	Dinas Tenaga Kerja dan BKD	Kep. DPP dan PA
		Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga swasta } 2.297 \text{ Orang}}{\text{Jumlah pekerja dilembaga swasta } 4.628 \text{ Orang}} \times 100\% = 49,63\%$	Dinas Tenaga Kerja	Kep. DPP dan PA
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga lagislati	%	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga legislatif } 3 \text{ Orang}}{\text{Jumlah pekerja legislatif } 25 \text{ Orang}} \times 100\% = 12,00\%$	Dinas Tenaga Kerja	Kep. DPP dan PA
		Persentase perempuan yang menjabat eselon II, III, IV	%	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang menjabat eselon II, III, IV } 239}{\text{Jumlah jabatan } 755} \times 100\% = 31,66\%$	BKD	Kep. DPP dan PA
	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	<p>Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam tahun 2016 sebanyak 36 kasus terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekerasan seksual = 25 Kasus</li> <li>2. Kekerasan Fisikl = 10 kasus</li> <li>3. Lain lainnya = 1 kasus</li> <li>4. Kasus yang telah tertangani 22 kasus</li> </ol> $\frac{36}{22} \times 100\% = 163,64\%$	Unit PPA Sat Reskrim Polres Bima Kota	Kep. DPP dan PA



	Rasio KDRT -	%	Jumlah KDRT $\frac{21}{32.668} \times 100\% = 0,06\%$ Jumlah rumah tangga 32.668	Unit PPA Sat Reskrim Polres Bima Kota	Kep. DPP dan PA
	Penyelesaian pengaduan perind. Peremp.dan anak dari tindakan kekerasan	%	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu $\frac{31}{21} \times 100\% = 147,11\%$ Jumlah pengaduan / laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu 21	Unit PPA Sat Reskrim Polres Bima Kota	Kep. DPP dan PA
Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai LKIP	Nilai	Nilai BB		Kep. DPP dan PA
	Persentase temua Internal/External	%	Jumlah temuan $\frac{0}{12} \times 100\% = 0\%$ Jumlah kegiatan 12	Internal/External	Kep. DPP dan PA
	Tindak Lanjut Temuan		Jumlah temuan yang diselesaikan $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ Temuan 0	Internal/External	Kep. DPP dan PA

Raba-Bima, 5 Februari 2018  
Kepala DPP - PA



**Drs. M. Nur. H. Amajid, MH.**  
Nip. 19650213 199203 1 011

Dari uraian tujuan, sasaran renja Dinas PP-PA Kota Bima tersebut diatas dapat dilihat pada rincian rumusan program kegiatan adalah sebagai berikut :

#### **I. PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

#### **II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

1. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

**III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**

1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2. Pengadaan Pakaian Olah Raga

**IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

1. Konsultasi dan Studi Banding

**V. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**

1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA / DPA, DPPA SKPD
4. Penyusunan LAKIP. LPJ dan LPPD
5. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan
6. Penyusunan Laporan Gaji berkala, Impasing dan KP4

**VI. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN**

1. Pelaksanaan sosialisasi yang berkaitan dengan kesetaraan gender PP dan perlindungan anak
2. Sosialisasi Perda No 1 Tahun 2016 dan Perwali Perlindungan Anak dan Perwali Perlindungan Perempuan Tahun 2018

**VII. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK**

1. Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan
2. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A.
3. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
4. Evaluasi Pelaksanaan PUG
5. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
6. Pengembangan Kota sebagai Kota Layak anak
7. Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.

8. Penguatan Kelompok Forum anak
9. Pemetaan Anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak
10. Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak anak

#### **VIII. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan anak di Daerah
2. Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT
3. Panenyusunan sistim perlindungan bagi perempuan
4. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
5. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
6. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

#### **IX. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN**

1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
2. Pelatihan Pendidikan Kebangsaan berspektif Gender
3. Pembentukan keompok dan pelatihan fasilitator pendidikan untuk perempuan

#### **X. PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS**

1. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV / AIDS.

Dari uraian program kegiatan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Dengan memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada, maka pencapaian indicator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dapat dicapai 9 Progran dan 48 kegiatan.
2. Kegiatan yang tersebar ke berbagai kawasan adalah pendataan kekerasan perempuan dan pendataan kekerasan anak di kota Bima dalam hal KDRT.
3. Total kebutuhan dan/pagu indukaif yang dirinci menurut sumberpendanaannya.  
**(Lihat pada Matrik pagu indukaif) lampiran 2.**

## BAB IV PENUTUP

Dengan selesainya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PP dan PA Kota Bima ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas PP dan PA Kota Bima tahun 2018 mendatang dapat mencapai hasil yang optimal dan efisien.

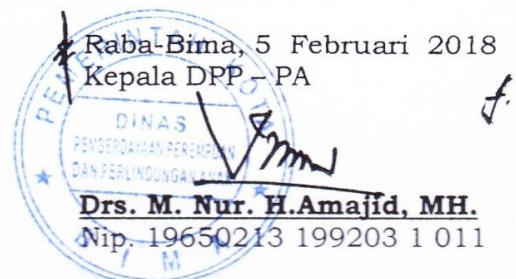
Harapan dari tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah semakin kuat dan profesionalnya aparatur Dinas PP dan PA Kota Bima dalam memberikan layanan perencanaan serta semakin tersedia dan lengkapnya dokumen pendukung sebagai referensi perencanaan sehingga output perencanaan yang dihasilkan oleh Dinas PP dan PA Kota Bima akan semakin integratif dan komprehensif.

Dari uraian pada bab-bab diatas, maka dapat diambil beberapa catatan :

1. Dengan memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada, maka pencapaian indicator kinerja DPP-PA Kota Bima dapat dicapai.
2. Anggaran pada Dinas PP-PA Kota Bima Tahun Anggaran 2018 perlu di tambahkan lagi.
3. Perlu ada Laporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara menyeluruh.

Demikian penyusunan Renca Kerja yang kami buat, kepada Tuhan jualah kita berserah diri seraya memohon bimbingan-nya semoga apa yang direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, Amin.

Raba-Bima, 5 Februari 2018  
Kepala DPP - PA



**Drs. M. Nur. H. Amajid, MH.**  
Nip. 19650213 199203 1 011

Lampiran 2.

PAGU INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU  
BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

MATRIKS RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KODE SKPD BIDANG PP-PA : 2.02

KODE KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KMINERJA						PAGU INDIKATIF (RP) DAN SUMBER DANA			LOKASI	KET				
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD II	APBD PROV.	DAK						
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	02	2.02.01	01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal	12 Bulan							539,681,500	-	-	DPP - PA	
2	02	2.02.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		12 bulan	Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat dan adanya operasional jas Non Pegawai	12 bulan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan adanya operasional jas Non Pegawai	12 bulan		31,320,000	-	-	DPP - PA	
					* Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Materai 6.000	420 Lbr/bln	Materai 6.000	420 Lbr/bln	Materai 6.000	420 Lbr/bln		2,520,000				
						Materai 3.000	300 Lbr/bln	Materai 3.000	300 Lbr/bln	Materai 3.000	300 Lbr/bln		900,000				
					*Jasa Non Pegawai	Tanaga Operator Komputer (S1)	2 Org/bln	Tanaga Operator Komputer (S1)	2 Org/bln	Tanaga Operator Komputer (S1)	2 Org/bln		19,200,000				
						Tenaga Administrasi (SMA)	1 Org/bln	Tenaga Administrasi (SMA)	1 Org/bln	Tenaga Administrasi (SMA)	1 Org/bln		8,700,000				
2	02	2.02.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bln	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan		12,500,000			DPP - PA	
					- Jasa Internet (IT)		12 Bln		12 Bln		12 Bln		12,000,000				
					- Jasa TV Kabel		12 Bln		12 Bln		12 Bln		500,000				
2	02	2.02.01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)			Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan kendaraan	12 Bulan	Tersedianya jasa pemeliharaan Kendaraan dan terbayarnya tenaga operasional supir			15,200,000	-	-	DPP - PA	
					- Jasa Non Pegawai	Tenaga Supir	12 Bulan	Tenaga Supir	12 Bulan	Tenaga Supir	12 Bulan		8,700,000				
					- Kendaraan Roda dua	STNK	10 Unit	STNK	10 Unit	STNK	10 Unit		5,000,000				
					- Kendaraan Roda Empat Mobil Operasional (EA. 30 S)	STNK	1 Unit	STNK	1 Unit	STNK	1 Unit		1,500,000				
2	02	2.02.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Terlaksananya Kegiatan AdministrasiKeuangan yang tertib		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan yang tertib			72,500,000	-	-	DPP - PA	
					Tim Pengumpul Data dan Penyens. Data Naskah/Dokumen ASET	Rekon Aset 2017	2 Semester	Rekon Aset 2017	2 Semester	Rekon Aset 2017	2 Semester		32,500,000				
					- Pejabat Penatausahaan Keuangan	1 Orang	12 Bln	1 Orang	12 Bln	1 Orang	12 Bln		9,000,000				
					- Bendhar.Pengeluaran	1 Orang	12 Bln	1 Orang	12 Bln	1 Orang	12 Bln		7,200,000				
					- Bendahara Pembantu Pengelu. (Gaji)	1 Orang	12 Bln	1 Orang	12 Bln	1 Orang	12 Bln		6,600,000				
					- Bendahara (Gaji)	1 Orang	12 Bln	1 Orang	12 Bln	1 Orang	12 Bln		6,600,000				
					- Bendahara. Umum Barang ( Gudang)	1 Orang	12 Bln	1 Orang	12 Bln	1 Orang	12 Bln		6,600,000				
					Makan Minum Tim Pengumpul Data (Inventarisasi ASSET)	13 Orang	12 Bln	13 Orang	12 Bln	13 Orang	12 Bln		4,000,000				
2	02	2.02.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan	Terlaksananya pengadaan alat kebersihan kantor dan Terbayarnya tanaga kebersihan kantor	12 bulan	Tersedianya alat kebersihan kantor dan Terbayarnya tanaga kebersihan (Clening Servise) kantor			21,962,000	-	-	DPP - PA	
					Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih												
						Sapu Lidi	8 bh	Sapu Lidi	8 bh	Sapu Lidi	8 bh		96,000				
						Sapu Lantai	8 bh	Sapu Lantai	8 bh	Sapu Lantai	8 bh		200,000				
						Kain Pel Lantai	8 br	Kain Pel Lantai	8 br	Kain Pel Lantai	8 br		120,000				
						Bak Sampah Plastik	8 bh	Bak Sampah Plastik	8 bh	Bak Sampah Plastik	8 bh		200,000				
						Kain Lap	8 lbr	Kain Lap	8 lbr	Kain Lap	8 lbr		120,000				

KODE KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KMINERJA						PAGU INDIKATIF (RP) DAN SUMBER DANA			LOKASI	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD II	APBD PROV.	DAK		
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pembersih Kaca	5 botol	Pembersih Kaca	5 botol	Pembersih Kaca	5 botol	75,000				
			Cairan Pembersih Lantai	5 botol	Cairan Pembersih Lantai	5 botol	Cairan Pembersih Lantai	5 botol	100,000				
			Cairan Pembersih WC	5 botol	Cairan Pembersih WC	5 botol	Cairan Pembersih WC	5 botol	75,000				
			Pengharum Ruangan (parfum)	5 botol	Pengharum Ruangan (parfum)	5 botol	Pengharum Ruangan (parfum)	5 botol	110,000				
			Alat Pel	3 bh	Alat Pel	3 bh	Alat Pel	3 bh	120,000				
			Sikat Lantai Biasa	5vbh	Sikat Lantai Biasa	5vbh	Sikat Lantai Biasa	5vbh	75,000				
			Sikat Kloset	5 bh	Sikat Kloset	5 bh	Sikat Kloset	5 bh	50,000				
			Keset	5 bh	Keset	5 bh	Keset	5 bh	75,000				
			Taplak Meja	2 lbr	Taplak Meja	2 lbr	Taplak Meja	2 lbr	100,000				
			Kantung Plastik sampah	2 pak	Kantung Plastik sampah	2 pak	Kantung Plastik sampah	2 pak	14,000				
			Bulu Ayam	5 bh	Bulu Ayam	5 bh	Bulu Ayam	5 bh	95,000				
			Slang Plastik	10 meter	Slang Plastik	10 meter	Slang Plastik	10 meter	120,000				
			Gunting Rumput	2 bh	Gunting Rumput	2 bh	Gunting Rumput	2 bh	217,000				
			Kran Air	5 bh	Kran Air	5 bh	Kran Air	5 bh	200,000				
		Jasa perawatan halaman Kantor	Retrebusi Kebrshn'	12 Bulan	Retrebusi Kebrshn'	12 Bulan	Retrebusi Kebrshn'	12 Bulan	1,200,000				
		Jasa Perawatan hal.Ktr.	Jasa Perawatan hal.Ktr.	12 Bulan	Jasa Perawatan hal.Ktr.	12 Bulan	Jasa Perawatan hal.Ktr.	12 Bulan	1,200,000				
		Jasa Non Pegawai	Pnjaga Malam	12 Bulan	Pnjaga Malam	12 Bulan	Pnjaga Malam	12 Bulan	8,700,000				
			Tenaga (Cleaning servise) (S1)	12 Bulan	Tenaga (Cleaning servise) (S1)	12 Bulan	Tenaga (Cleaning servise) (S1)	12 Bulan	8,700,000	-	-		
2	02	2.02.01	01	10	Penyediaan Alat Tulis kantor								DPP - PA
					alat tulis kantor	Atk	12 Bulan	Atk	12 Bulan		-	-	
							12 Bulan	Tersedianya Alat tulis kantor	12 Bulan	40,247,000			
							12 Bulan	Tersedianya Barang Cetakan untuk dokumen Dinas	12 Bulan	21,027,500	-	-	DPP - PA
					Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho	Spanduk	5 bh	Spanduk	5 bh	1,250,000			
						Baliho	3 bh	Baliho	3 bh	12,000,000			
						Umbul-umbul Biasa	10 lbr	Umbul-umbul Biasa	10 lbr	2,250,000			
						Bendera Mehah Putih	2 lbr	Bendera Mehah Putih	2 lbr	500,000			
						Cetak Undangan besar (Hari Besar Nasional)	50 lbr	Cetak Undangan besar (Hari Besar Nasional)	50 lbr	200,000			
						Cetak Undangan Kecil	50 lbr	Cetak Undangan Kecil	50 lbr	250,000			
						Cetak Piagam (Sertifikat)	30 lbr	Cetak Piagam (Sertifikat)	30 lbr	12,500			
						Cetak Makalah dan cetak Materi Kegiatan	50 lbr	Cetak Makalah dan cetak Materi Kegiatan	50 lbr	300,000			
						Blangko Kwitansi	24 blok	Blangko Kwitansi	24 blok	360,000			
						Blangko Faktur	24 blok	Blangko Faktur	24 blok	360,000			
						Blangko Faktur Pajak (SSP)	12 blok	Blangko Faktur Pajak (SSP)	12 blok	320,000			
						Foto Copy Dokumen	30000 lbr	Foto Copy Dokumen	30000 lbr	825,000			
						Penjidan Dokumen	120 jilid	Penjidan Dokumen	120 jilid	2,400,000			
2	02	2.02.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor								DPP - PA
					Pengadaan komponen listrik	- Bola Lampu Listrik (Lampu pijar, dan Neon)	30 Buah	- Bola Lampu Listrik (Lampu pijar, dan Neon)	30 Buah	1,300,000			
						- Fiting Lampu	30 Buah	- Fiting Lampu	30 Buah	200,000			
						- Saklar Lampu	10 Buah	- Saklar Lampu	10 Buah	200,000			
						- Stop Kontak	10 Buah	- Stop Kontak	10 Buah	200,000			
						- Cok Listrik	10 Buah	- Cok Listrik	10 Buah	175,000			
						- Kabel Listrik	2 Rol	- Kabel Listrik	2 Rol	350,000			

KODE KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KMINERJA						PAGU INDIKATIF (RP) DAN SUMBER DANA			LOKASI	KET			
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD II	APBD PROV.	DAK					
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			- Lampu Hias /Kelap kelip	5 Buah	- Lampu Hias /Kelap kelip	5 Buah	- Lampu Hias /Kelap kelip	5Buah	1,500,000							
			- Kabel Gulungan	2 Buah	- Kabel Gulungan	2 Buah	- Kabel Gulungan	10 Meter	250,000							
2	02	2.02.01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan Televivi		Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor		Adanya perlatan perlengkapan Kantor televisi	2 Unit	10,000,000	-	-	DPP - PA	
						Televisi	2 Unit	Televisi	2 Unit	Televisi	2 Unit	10,000,000				
2	02	2.02.01	01	15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jasa surat kabar ( 4 buah media cetak)	12 Bulan	Terlaksananya kegiatan jasa media cetak	12 Bulan	Adanya Jasa Media Cetak	12 Bulan	4,800,000	-	-	DPP - PA	
2	02	2.02.01	'01	17	Penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	Terlaksananya kegiatan makan minum Pegawai	12 Bulan	Terlaksananya kegiatan makan minum Pegawai yang cukup	12 Bulan	25,200,000	-	-	DPP - PA	
						Makan dan minum Harian pegawai 1 Kali Snack 4 Kali	34 Orang		11 Bulan		136 Orang	4,800,000				
						Makan dan minum Hari-hari besar Nasional dan Daerah 1 Kali snack x 1 kali Makan	350 Orang		3 Kali		350 Orang	4,800,000				
						Makan dan minum rapat koordinasi bulanan pegawai 1 Kali Snack	40 Orang		6 Bulan		240 Orang	4,800,000				
						Makan dan Minum Tamu pusat dan provinsi (1 x makan x 1 Kali Snack)					150 org	6,000,000				
						Makan dan minum Tamu 1 Kali Snack	50 Oarng		50 Kotak		50 Oarng	4,800,000				
2	02	2.02.01	01	18	Perjalanan Dinas Luar Daerah			Terlaksananya Fungsi Koordinasi dengan Lintas Sektor Dinas	12 Bulan	Terselenggaranya fungsi koordinasi dengan lintas sektor dinas luar daerah		250,750,000	-	-		
2	02	2.02.01	01	19	Perjalanan Dinas dalam Daerah			Terlaksananya Fungsi Koordinasi dengan Lintas Sektor Dinas	12 Bulan	Terselenggaranya fungsi koordinasi dengan lintas sektor dinas dalam Daerah		30,000,000	-	-	DPP - PA	
2	02	2.02.01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terselenggaranya Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kantor	6 kegiatan					229,840,000	-	-	DPP - PA	
1	11	1.11.01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		1 Paket	Tersedianya kendaraan Dinas roda dua yang memadai	1 Paket	Adanya kendaraan Dinas roda dua yang memadai	1 Paket	-			DPP - PA	
2	02	2.02.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Terlaksananya Pengadaan Desktop Personal Computer (PC) yang memadai	2 Paket	Adannya Pengadaan Desktop Personal Computer (PC) yang memadai	2 Paket	74,440,000	-		DPP - PA	
						Belanja modal Pengadaan Desktop Personal Computer (PC)										
						Pengadaan Personal Computer	PC	1 Unit		1 Unit		15,500,000				
						Pengadaan Laptop	Laptop	2 Unit		2 Unit		20,000,000				
						Honorarium Panitia Penerima Hasil Barang Jasa	25 Org/Paket	5 Paket	25 Org/Paket	5 Paket	25 Org/Paket	15,480,000				
						Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1 Org/bln	5 bln	1 Org/bln	5 bln	1 Org/bln	2,250,000				
						Kuasa Pengguna Anggaran (PA)	1 Org/bln	5 bln	1 Org/bln	5 bln	1 Org/bln	4,000,000				
						Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	4 Org/bln	5 bln	4 Org/bln	5 bln	4 Org/bln	10,810,000				
						Pengadaan Printer	Printer	3 unit	Printer	3 unit	Printer	6,400,000				
2	02	2.02.01	02	10	Pengadaan Meubelair			Terlaksananya kegiatan pengadaan meubeler	1 Paket	Tersedianya mebeler yang memadai		44,650,000			DPP - PA	
						Pengadaan Meja Kerja	Meja kerja	10 bh	Meja kerja	10 bh	Meja kerja	24,000,000				
						Pengadaan Kursi kerja	Kursi Kerja	10 bh	Kursi Kerja	10 bh	Kursi Kerja	14,250,000				
						Pengadaan Lemari Arsip 4 Laci 2 Pintu	Lemari	2 unit	Lemari	2 unit	Lemari	6,400,000				
2	02	2.02.01	02	22	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	Pencatan Kantor		Terpeliharanya kegiatan Pencetakan dan perbaikan		Adanya kegiatan Pencetakan dan perbaikan		9,500,000			DPP - PA	
							Cat Tembok dan Lisplank	1 Paket	Cat Tembok dan Lisplank	1 Paket	Cat Tembok dan Lisplank	9,500,000				
2	02	2.02.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa Service		Terlaksananya Operasional kendaraan dinas	3 Keg	Terlaksananya Penggantian suku cadang, bahan bakar minyak, oli kendaraan operasional dinas	3 Keg	71,650,000	-	-	DPP - PA	



KODE KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KMINERJA						PAGU INDIKATIF (RP) DAN SUMBER DANA			LOKASI	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD II	APBD PROV.	DAK				
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor		1 Tahun		10 Unit		10 Unit	10,000,000						
		Kendaraan Roda 4		1 Tahun		1 Unit		1 Unit	5,000,000						
		<b>Suku Cadang</b>													
		Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor				10 Unit		10 Unit	5,000,000						
		Kendaraan Roda 4		1 Tahun		1 Unit		1 Unit	8,750,000						
		<b>Bahan Bakar Permium dan Solar</b>													
		Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor		1 Tahun		10 Unit		10 Unit	5,100,000						
		Kendaraan Roda 4		1 Tahun		1 Unit		1800 Liter	28,800,000						
		<b>Bahan Pelumas OLI</b>													
		Kendaraan Roda 2		1 Tahun		10 Unit		120 Liter	600,000						
		Kendaraan Roda 4		1 Tahun		1 Unit		12 Gaon	8,400,000						
2	02	2.02.01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Terlaksananya kegiatan jasa pemeliharaan perlengkapan kantor	2 Paket	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	2 Paket	9,250,000	-	-	DPP - PA
2	02	2.02.01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Terlaksananya jasa pemeliharaan peralatan Komputer kantor	30 Unit	Tersedianya peralatan Komputer kantor yang memadai	30 Unit	20,350,000	-	-	DPP - PA
					Jasa Perawatan AC		5 unit		5 unit		5 unit	1,500,000			
					<b>Jasa Perawatan Komputer</b>										
					- Komputer		5 Unit		5 Unit		5 Unit	1,750,000			
					- Laptop		10 Unit		10 Unit	350,000	10 Unit	5,500,000			
					- Printer		5 Unit		5 Unit	10,850,000	5 Unit	1,750,000			
					- Sound Sistem		2 Unit		2 Unit	11,935,000	2 Unit	2,000,000			
					- VCD Player		2 Unit		2 Unit		2 Unit	5,000,000			
					- Mesin Ketik		1 Unit		1 Unit		1 Unit	100,000			
					- Stavol (Penyimpan arus)		5 Buah		5 Buah		5 Buah	2,750,000			
2	02	2.02.01	03		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>			Terwujudnya pengadaan barang jasa yang memadai				23,435,000			DPP - PA
2	02	2.02.01	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Belanja pakaian adat daerah		Terpenuhinya pengadaan pakaian adat daerah sebanyak 31 Lembar yang memadai	31 Stel	Adanya pengadaan pakaian adat daerah sebanyak 31 Lembar yang memadai	31 Stel	12,935,000	-	-	DPP - PA
2	02	2.02.01	03	06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Belanja Pakaian Olahraga		Terpenuhinya pengadaan pakaian Olahraga sebanyak 31 Stel yang memadai	31 Stel	Adanya pengadaan pakaian Keki sebanyak Olahraga sebanyak 31 Stel yang memadai	31 Stel	10,500,000	-	-	DPP - PA
2	02	2.02.01	05		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>			Terwujudnya Kunjungan kerja atau Konsultasi Studi Banding Dinas PP dan PA sebanyak 12				94,600,000			DPP - PA
2	02	2.02.01	03	04	Konsultasi dan Studi Banding	Konsultasi dan Studi Banding		Terlaksananya kegiatan Konsultasi dan Studi Banding Dinas PP dan PA sebanyak 20 Orang Pegawai di Jogjakarta	3 Hari	Terselesainya kegiatan Konsultasi dan Studi Banding Dinas PP dan PA sebanyak 20 Orang Pegawai di Jogjakarta	3 Hari	94,600,000			DPP - PA
2	02	2.02.01	06		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Itihisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Kegiatan 8 Laporan 3 Dokumen			159,880,000	-	-	DPP - PA
2	02	2.02.01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itihisar Realisasi Kinerja SKPD			Terlaksananya kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	2 Laporan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan itihisar realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	37,280,000			DPP - PA
					Honorarium Tim Pengumpul data dan penyusunan naskah/dokumen penelitian				11	6	40,000	2,640,000			
					Honorarium Tim Penyusun Renja				11 Orang	11 Orang	6 hari	16,000,000			
					Honorarium Tim Penyusun Renstra				11 Orang	11 Orang	6 hari	16,000,000			
					Belanja makanan dan minuman/harian/Pegawai										

KODE KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KMINERJA						PAGU INDIKATIF (RP) DAN SUMBER DANA			LOKASI	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD II	APBD PROV.	DAK				
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Honorarium Tim Penyusun Renja		10 Orang		10 Orang		10 Orang	2,640,000						
		Honorarium Tim Penyusun Renstra		8 Orang		8 Orang		8 Orang	2,640,000						
2	02	2.02.01	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		1 Laporan	Terlaksananya kegiatan penyusunan Laporan keuangan semester	1 Laporan	Tersusunnya laporan Administrasi Keuangan semesteran	1 Laporan	11,200,000	-	-	DPP - PA
		Honorarium Tim Pengumpul data dan penyusunan naskah/dokumen penelitian													
		Honorarium Tim Penyusun dokumen laporan Semester													
		Laporan keuangan Semester dan Prognosis (1 kali Makan 1 kali Snack)		8 org		8 org		1 Lapoan	9,600,000						
		Belanja makanan dan minuman harian/Pegawai		8 org		8 org		5 Hari	1,600,000						
2	02	2.02.01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 kali Lap.	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan akhir Tahun	1 kali Lap.	Tersusunnya Jasa Administrasi Keuangan akhir Tahun		11,200,000	-	-	DPP - PA
		Honorarium Tim Pengumpul data dan penyusunan naskah/dokumen penelitian													
		Honorarium Laporan keuangan Akhir		8 Orang		6 Hari		1 Tahun	9,600,000						
		Belanja Makanan dan Minuman													
		Belanja makanan dan minuman harian/Pegawai													
		Laporan keuangan Akhir 1 x makan x 1 kali Snack		8 Orang		8 Orang		6 Hari	1,600,000						
2	02	2.02.01	06	05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA / DPA, DPPA SKPD		3 Dokumen	Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana kerja Anggaran Tahunan	3 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Anggaran Tahunan, RKA/DPA/DPPA		39,400,000	-	-	DPP - PA
		Honorarium PNS													
		Honorarium Tim Pengumpul Data dan Penyusunan Naskah/Dokumen Penelitian													
		Honorarium Tim Penyusun RKA-SKPD		13 org		13 org		1 Laporan	14,400,000						
		Honorarium Tim Penyusun DPA-SKPD		8 org		8 org		1 Laporan	9,600,000						
		Honorarium Tim Penyusun DPPA-SKPD		8 org		8 org		1 Laporan	9,600,000						
		Belanja Makanan dan Minuman													
		Belanja makanan dan minuman harian/Pegawai													
		Penyus. RKA 1 x makan x 1 x Snack		13 org		13 org		6 Hari	2,600,000						
		Penyus. DPA 1 x makan x 1 x Snack		8 org		8 org		6 Hari	1,600,000						
		Penyus. DPPA 1 x makan x 1 x Snack		8 org		8 org		6 Hari	1,600,000						
2	02	2.02.01	06	06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD		2 Lap.	Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPJ, LPJ, LPPD.	2 Lap.	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja LAKIP		22,400,000	-	-	DPP - PA
		Honorarium PNS													
		Honorarium Tim Pengumpul Data dan Penyusunan Naskah/Dokumen Penelitian													
		Honorarium Tim Penyusun LAKIP		8 org		8 org		1 Laporan	9,600,000						
		Honorarium Tim Penyusun LPPD		8 org		8 org		1 Laporan	9,600,000						
		Belanja Makanan dan Minuman													
		Belanja makanan dan minuman harian/Pegawai													
		Penyus. LAKIP 1 x Makan x 1 x Snack		8 org		8 org		6 Hari	1,600,000						
		Penyus. LPPD 1 x makan x 1 x Snack		8 org		8 org		6 Hari	1,600,000						
2	02	2.02.01	06	07	Penyusunan Laporan Keuangan Per Triwulan			Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Per Triwulan				19,200,000			DPP - PA
		Honorarium PNS													
		Tim Pengumpul Data dan Penyusunan Naskah/Dokumen Pelatihan													
		Tim Pengumpul/Penyusun Laporan Keuangan Per Triwulan		8 org		8 org		4 Laporan	16,000,000						
		Belanja Makanan dan Minuman													
		Belanja makanan dan minuman harian/Pegawai													
		Tim Pengumpul/Penyusun Laporan Keuangan Per Triwulan		8 org		8 org		8 Hari	3,200,000						



KODE KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KMINERJA						PAGU INDIKATIF (RP) DAN SUMBER DANA			LOKASI	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD II	APBD PROV.	DAK				
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	02	2.02.01	16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Terwujudnya program kegiatan penguatan pengarusutamaan agender dan Anak	9 Kegiatan					318,171,000	-	-	DPP - PA	
2	02	2.02.01	16	01 Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan.		1 Keg.	Terlaksananya Pertemuan Adfokasi dan PUG Bagi Organisasi Perempuan	1 Keg.	Meningkatnya Pemahaman tentang Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan		9,802,500	-	-	DPP - PA	
				Honorarium PNS Panitia Pelaksana Kegiatan		7 Orang		7 Orang		1 keg	3,000,000	-	-		
				Alat tulis kantor							500,000				
				Pembuatan Spanduk		1 keg		1 keg		1 keg	250,000				
				Foto Copy Kegiatan		1 keg		1 keg		1 keg	37,500				
				Sewa Kursi Plastik		1 keg		1 keg		1 keg	50,000				
				Sewa gedung		1 keg		1 keg		1 keg	750,000				
				Sewa sound sistim		1 keg		1 keg		1 keg	750,000				
				Makan minum rapat kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan		1 keg		1 keg		1 keg	940,000				
				Uang saku peserta rapat kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan		40 Orang		40 Orang		1 keg	3,000,000				
				Honorarium Non PNS tenaga ahli (Narasumber)		1 Orang		1 Orang		1 keg	525,000				
2	02	2.02.01	16	02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A		1 Keg.	Terlaksananya Pertemuan pertemuan Kegiatan P2TP2A	1 Keg.	Terkoordinasinya kelompok P2TP2A pada 5 Kecamatan se-Kota Bima		47,650,500	-	-	DPP - PA	
				Honorarium PNS Panitia Pelaksana Kegiatan		7 Orang		10 Orang		10 Orang	3,000,000				
				Jasa non Pegawai (Tenaga Operator Komputer dan Pengantar Surat )		12 Bulan		12 Bulan		1 keg	9,600,000				
				Alat tulis kantor							500,000				
				Pembuatan Spanduk P2TP2A		1 keg		1 keg		1 keg	250,000				
				Cetak Blangko Pembinaan P2TP2A		1 keg		1 keg		1 keg	75,000				
				Foto Copy Kegiatan P2TP2A		1 keg		1 keg		1 keg	37,500				
				Sewa Kursi Plastik		1 keg		1 keg		1 keg	50,000				
				Sewa gedung		1 keg		1 keg		1 keg	750,000				
				Sewa sound sistim		1 keg		1 keg		1 keg	750,000				
				Makan Minum		1 keg		1 keg		1 keg	888,000				
				Perjalanan Dinas dalam daerah		2 Kali Perjalanan Dinas		1 Tahun		3 Hari	6,500,000				
				Perjalanan Dinas Luar daerah		1 kali		2 Orang		3 Hari	17,500,000				
				Uang Saku Keg. Rapat Pembinaan P2TP2A		50 Orang		50 Orang		1 keg	7,750,000				
2	02	2.02.01	16	06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan		1 Keg.	Terlaksananya Pertemuan Adfokasi peningkatan dan memperluas jaringan kelembagaan Perempuan	1 Keg.	Meningkatnya Kapasitas dan memperluas jaringan kelompok usaha Perempuan		17,976,500	-	-	DPP - PA	
				Honorarium PNS Panitia Pelaksana Kegiatan		8 Orang		8 Orang		1 keg	3,000,000				
				Alat tulis kantor							500,000				
				Pembuatan Spanduk		1 keg		1 keg		1 keg	250,000				
				Foto Copy Kegiatan		1 keg		1 keg		1 keg	37,500				
				Sewa gedung		1 keg		1 keg		1 keg	750,000				
				Sewa Kursi Plastik		1 keg		1 keg		1 keg	100,000				
				Sewa sound Sistim		1 keg		1 keg		1 keg	750,000				
				Perjalanan Dinas dalam daerah		2 Kali Perjalanan Dinas		1 Tahun		3 Hari	8,500,000				
				Makan minum kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan		47 Orang		47 Orang		1 keg	564,000				

KODE KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KMINERJA						PAGU INDIKATIF (RP) DAN SUMBER DANA			LOKASI	KET			
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD II	APBD PROV.	DAK					
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Uang saku peserta rapat kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan		40 Orang		40 Orang		1 keg	3,000,000							
		Honorarium Non PNS tenaga ahli (Narasumber)		1 Orang		1 Orang		1 keg	525,000							
2	02	2.02.01	16	07	Evaluasi pelaksanaan PUG			Terlaksananya evaluasi Kelompok Fokal Point PUG Pada SKPD Lingkup Kota Bima		Tersedianya data terpilah kegiatan yang responsif gender			DPP - PA			
					Panitia Rapat teknis Kelompok Fokal Point PUG								3,000,000			
					Belanja Alat Tulis Kantor								550,000			
					Belanja Spanduk, Umbul-Umbul, Bendera/ Baliho								500,000			
					Belanja Penggandaan								50,000			
					Penjilidan Laporan Hasil Pelaksanaan								15,000			
					Sewa gedung	1 keg		1 keg		1 keg			750,000			
					Sewa Kursi Plastik	1 keg		1 keg		1 keg			100,000			
					Sewa sound Sistem	1 keg		1 keg		1 keg			750,000			
					Belanja makanan dan minuman rapat								1,780,000			
					Belanja perjalanan dinas Luar daerah	1 kali Dinas Luar daerah		1 Orang		3 Hari			7,500,000			
					Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka evaluasi Kelompok Fokal Point PUG	2 Kali Perjalanan Dinas		1 Tahun		3 Hari			8,500,000			
					Uang Saku Peserta Rapat teknis Kelompok Fokal Point PUG Pada SKPD Kota Bima								1,350,000			
					Peserta Kegiatan Pendataan Kekerasan Perempuan								1,350,000			
2	02	2.02.01	16	08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak			1 Keg.	Terlaksananya Pendataan gender dan Anak	1 Keg.	Tersedianya Data terpilah gender dan Anak Se Kota Bima		25,645,000	-	-	DPP - PA
					Panitia Kegiatan pendataan Kekerasan Anak								3,000,000	-	-	
					Belanja Alat Tulis Kantor								550,000			
					Belanja Spanduk, Umbul-Umbul, Bendera/ Baliho								500,000			
					Belanja Penggandaan								50,000			
					Penjilidan Laporan Hasil Pelaksanaan								15,000			
					Sewa gedung	1 keg		1 keg		1 keg			750,000			
					Sewa Kursi Plastik	1 keg		1 keg		1 keg			100,000			
					Sewa sound Sistem	1 keg		1 keg		1 keg			750,000			
					Belanja makanan dan minuman rapat								1,780,000			
					Belanja perjalanan dinas Luar daerah	1 kali Dinas Luar daerah		1 Orang		3 Hari			7,500,000			
					Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam (Ke Kecamatan se Kota Bima) Kegiatan peserta Pendataan Kekerasan anak	2 Kali Perjalanan Dinas		1 Tahun		3 Hari			8,500,000			
					Uang Saku Pelatihan, sosialisasi bintek dan lainnya								1,350,000			
					Peserta Rapat teknis Kegiatan Sosialisasi pencegahan dan pemulihan korban Kekerasan								1,350,000			
					Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber kegiatan	1 kali Kegiatan		2 Orang		2 Orang			800,000			
2	02	2.02.01	16	10	Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)			4 Keg.	Terlaksananya Keg. Pertemuan Evaluasi Kota Layak Anak Tk. Kota, Gugus Tugas Tk. Kec. Tk. Kota,	4 Keg.	Adanya capaian 31 indikator KLA, rincian Pembagian Gugus Tugas KLA Tingkat Kecamatan, Data Bases terpilah KLA, profil anak dan remaja pada masing-masing gugus Tugas,		79,955,000	-	-	DPP - PA
					Panitia Rapat teknis Kegiatan Kota Layak Anak Tk. Kota								7,260,000			
					- Tenaga Operator Komputer dan Pengantar Surat								8,700,000			

KODE KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KMINERJA						PAGU INDIKATIF (RP) DAN SUMBER DANA			LOKASI	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD II	APBD PROV.	DAK			
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Belanja Alat Tulis Kantor								2,500,000				
		Belanja Spanduk, Umbul-Umbul, Bendera/ Balho								1,250,000				
		Belanja Penggandaan								800,000				
		Penjilidan Laporan Hasil Pelaksanaan								250,000				
		Sewa gedung								3,000,000				
		Sewa Kursi Plastik								800,000				
		Sewa sound Sistim		4 keg		4 keg		4 keg		3,000,000				
		Belanja makanan dan minuman Rapat												
		- Peserta Rapat tehnis penyusunan kegiatan pengembangan Kota Layak Anak Tk. Kec.								600,000				
		- Peserta Rapat tehnis penyusunan kegiatan pengembangan Kota Layak Anak Tk. Kelurahan.								600,000				
		- peserta Rapat tehnis kegiatan Pembentukan Gugus Tugas KLA Tk. Kec.								600,000				
		- peserta Rapat tehnis kegiatan Pembentukan Gugus Tugas KLA Tk. Kelurahan.								495,000				
5	2	2	15											
		Belanja Perjalanan Dinas												
5	2	2	15	02	Dalam Provinsi (Mataram dan sekitarnya)/dan di luar daerah provinsi (Forum anak dan Remaja dim rangka hari anak nasional)	2 kali Dinas Luar daerah		10 Orang Siswa		3 Hari				
5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2 Kali Perjalanan Dinas		1 Tahun		5 Hari				
		Uang Saku Pelatihan, sosialisasi bintek dan lainnya												
		- Peserta Rapat tehnis penyusunan kegiatan pengembangan Kota Layak Anak Tk. Kec.								3,000,000				
		- Peserta Rapat tehnis penyusunan kegiatan pengembangan Kota Layak Anak Tk. Kelurahan.								3,000,000				
		- peserta Rapat tehnis kegiatan Pembentukan Gugus Tugas KLA Tk. Kec.								3,000,000				
		-peserta Rapat tehnis kegiatan Pembentukan Gugus Tugas KLA Tk. Kelurahan.								3,000,000				
		Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber								2,100,000				
2	02	2.02.01	16	11	<b>Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di Luar Sekolah.</b>	<b>Meningkatnya pemahaman tentang Pengembangan Sistem Informasi Pendataan Kelompok anak di luar sekolah</b>		<b>Terlaksananya Pendataan dan Informasi Kelompok Anak di luar Sekolah</b>		<b>Adanya data dan informasi Kelompok anak di luar sekolah</b>				DPP - PA
					Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di luar Sekolah	1 Kegiatan		7 Orang		7 Orang				
					Belanja Bahan Habis Pakai ATK	1 Kali Kegiatan					900,000			
					Pembuatan Spanduk	1 Buah					250,000			
					Penggandaan/Foto copy	1 kali Kegiatan		700 Lembar		700 Lembar	140,000			
					Penjilidan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan		5 Expl		5 Expl	25,000			
					Cetak foto	1 kali Kegiatan		30 Lembar		30 Lembar	50,000			
					Sewa Ruang rapat/gedung Pertemuan	1 kali Kegiatan		1 kali Kegiatan		1 kali Kegiatan	750,000			
					Sewa sound Sistim	1 keg		1 keg		1 keg	750,000			
					Makan minum dalam rangka kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pendataan Kelompok Anak di luar Sekolah	1 Kali makan dan Snack		10 Orang		10 Orang	280,000			
					Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	2 Kali Perjalanan Dinas		1 Tahun		3 Hari	6,930,000			
					Perjalan DinasLuar Daerah dalam rangka Pengembangan Sistem Informasi Pendataan Kelompok Anak di luar Sekolah	1 kali Dinas Luar daerah		2 Orang		3 Hari	8,500,000			
					Uang saku/transport peserta rapat	1 kali Kegiatan		50 Orang		50 Orang	3,000,000			
					Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber kegiatan	1 kali Kegiatan		2 Orang		2 Orang	800,000			

KODE KEGIATAN					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KMINERJA						PAGU INDIKATIF (RP) DAN SUMBER DANA			LOKASI	KET
							CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD II	APBD PROV.	DAK		
							TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	02	2.02.01	16	12	Penguatan Kelompok Forum anak dan Remaja	Adanya Peningkatan keberadaan kelompok forum anak dan remaja		Terlaksananya Penguatan Kelompok Forum Anak dan Remaja		Meningkatnya Penguatan Kelompok Forum Anak dan Remaja			21,811,000	-	-	DPP - PA	
					Honorarium Panitia kegiatan Penguatan Kelompok Forum anak dan Remaja		1 kali Kegiatan		5 Orang		5 Orang		5,500,000				
					Belanja Bahan Habis Pakai ATK		1 kali Kegiatan						450,000				
					Pembuatan Spanduk		1 Buah						250,000				
					Penggandaan/Foto copy		1 kali Kegiatan		700 Lembar		700 Lembar		140,000				
					Penjilitan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan		1 Laporan		5 Expl		5 Expl		25,000				
					Cetak foto		1 kali Kegiatan		30 Lembar		30 Lembar		50,000				
					Sewa Ruang rapat/gedung Pertemuan		1 kali Kegiatan		1 kali Kegiatan		1 kali Kegiatan		750,000				
					Sewa sound Sistim		1 keg		1 keg		1 keg		750,000				
					Makan minum rapat kegiatan Penguatan Kelompok Forum anak dan Remaja		1 Kali Makan dan Snack		57 Orang		57 Orang		1,596,000				
					Perjalanan DinasLuar Daerah		1 kali Dinas Luar daerah		2 Orang		3 Hari		8,500,000				
					Uang saku/transport peserta rapat		1 kali Kegiatan		50 Orang		50 Orang		3,000,000				
					Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber kegiatan		1 kali Kegiatan		2 Orang		2 Orang		800,000				
2	02	2.02.01	16	13	Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak			Terlaksananya Pembuatan Profil perlindungan anak Kota Bima		Adanya Profil perlindungan anak Kota Bima			63,760,500			DPP - PA	
					Honorarium (Tim penyusun Profil perlindungan anak Kota Bima		1 kali Keg.		21 Orang/bln		21 Orang/bln		24,200,000				
					Honor tim pokja penyusunan Profil Perlindungan Anak		1 kali Keg.		10 Orang/bln		10 Orang/bln		5,000,000				
					Honorarium Tim Pengumpul Data dan Penyusunan Naskah/Dokumen Penelitian		1 kali Keg.		15 Orang/bln		15 Orang/bln		15,000,000				
					Belanja Bahan Habis Pakai ATK		1 kali Keg.		1 kali Keg.		1 kali Keg.		2,398,000				
					Cetak dokumen profil Perlindungan Anak		38 Buah		38 Buah		38 Buah		1,900,000				
					Foto Copy Laporan Pengolahan data Profil Perlindungan Anak		15.500 Lbr		15.500 Lbr		15.500 Lbr		4,262,500				
					Penjilitan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan		1 Laporan		38 Expl		38 Expl		500,000				
					Sewa Ruang rapat/gedung Pertemuan		6 kali Keg.		6 kali Keg.		6 kali Keg.		4,500,000				
					Makan minum *Tim penyusun Profil perlindungan anak Kota Bima		1 Kali Makan dan Snack		150 Org/Hr/keg		150 Org/Hr/keg		6,000,000				
2	02	2.02.01	16	14	Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak			Terlaksananya Pembuatan Profil perlindungan anak Kota Bima		Adanya Profil perlindungan anak Kota Bima			88,060,500			DPP - PA	
					Honorarium Panitia kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak		2.Keg.		12 Orang/bln		12 Orang/bln		24,200,000				
					Belanja Bahan Habis Pakai ATK		2.Keg.		10 Orang/bln		10 Orang/bln		5,000,000				
					Pembuatan Spanduk		1 kali Keg.		15 Orang/bln		15 Orang/bln		15,000,000				
					Penggandaan/Foto copy		1 kali Keg.		1 kali Keg.		1 kali Keg.		2,398,000				
					Penjilitan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan		38 Buah		38 Buah		38 Buah		1,900,000				
					Cetak foto		15.500 Lbr		15.500 Lbr		15.500 Lbr		4,262,500				
					Sewa Ruang rapat/gedung Pertemuan		1 Laporan		38 Expl		38 Expl		500,000				
					Sewa sound Sistim		6 kali Keg.		6 kali Keg.		6 kali Keg.		4,500,000				

KODE KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KMINERJA						PAGU INDIKATIF (RP) DAN SUMBER DANA			LOKASI	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD II	APBD PROV.	DAK			
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Makan minum rapat kegiatan Penguatan Kelompok Forum anak dan Remaja		1 Kali Makan dan Snack		150 Org/Hr/keg		150 Org/Hr/keg	6,000,000					
		Perjalan DinasLuar Daerah		2 kali Dinas Luar daerah		2 Orang		3 Hari	20,500,000					
		Uang saku/transport peserta rapat		1 kali Kegiatan		50 Orang		50 Orang	3,000,000					
		Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber kegiatan		1 kali Kegiatan		2 Orang		2 Orang	800,000					
2	02	2.02.01	17	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Terwujudnya Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan	3 Kegiatan			<b>191,848,500</b>	-	-		DPP - PA	
2	02	2.02.01	17	01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak perempuan dan Anak di daerah		Meningkatnya Kualitas Anak serta kecerdasan tumbuh kembang anak	Adanya Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Hak-Hak Anak	<b>28,990,000</b>				DPP - PA	
					Panitia Rapat tehnis kegiatan sosialisasi Hak Tumbuh Kembang Anak (TKA)				3,000,000					
					Belanja Alat Tulis Kantor				550,000					
					Belanja Spanduk, Umbul-Umbul, Bendera/ Baliho				500,000					
					Belanja Penggandaan				50,000					
					Penjilidan Laporan Hasil Pelaksanaan				15,000					
					Sewa gedung	1 keg	1 keg	1 keg	350,000					
					Sewa Kursi Plastik	1 keg	1 keg	1 keg	100,000					
					Belanja makanan dan minuman kegiatan Rapat tehnis kegiatan sosialisasi Hak Tumbuh Kembang Anak	48 orang	48 orang	1 keg	1,525,000					
					Sewa sound Sistim	1 keg	1 keg	1 keg	750,000					
					Belanja perjalanan dinas Luar daerah	1 Kali Dinas Luar	2 orang	3 Hari	10,000,000					
					Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kunjungan Rumah)	2 Kali Dinas Dim Daerah	1 Orang Tkt B, 3 Orang Tkt C, 6 Orang Tkt D	3 Hari	4,625,000					
					Peserta Rapat tehnis kegiatan sosialisasi Hak Tumbuh Kembang Anak (TKA)	40 orang	40 orang	1 keg	3,525,000					
					Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2 orang	2 orang	1 keg	4,000,000					
2	02	2.02.01	17	02	<b>Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT</b>		Terlaksananya Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan terhadap pelayanan oleh pelatih pendampingan korban KDRT	Adanya pemahaman pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	<b>32,426,000</b>	-	-		DPP - PA	
					honorarium panitia pelaksana kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT)	7 orang	7 orang	1 keg	3,000,000					
					Belanja Alat Tulis Kantor				550,000					
					Belanja Spanduk, Umbul-Umbul, Bendera/ Baliho				500,000					
					Belanja Penggandaan				50,000					
					Penjilidan Laporan Hasil Pelaksanaan				5,000					
					Sewa gedung	1 keg	1 keg	1 keg	1,500,000					
					Sewa Kursi Plastik	1 keg	1 keg	1 keg	100,000					
					Sewa sound Sistim	1 keg	1 keg	1 keg	750,000					
					belanja makanan dan minuman	48 orang	48 orang	1 keg	576,000					



KODE KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KMINERJA						PAGU INDIKATIF (RP) DAN SUMBER DANA			LOKASI	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD II	APBD PROV.	DAK			
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah		2 Kali Perjalanan Dinas		1 Tahun		3 Hari	6,930,000					
		perjalanan dinas luar daerah ( dalam Propinsi NTB) mataram sekitarnya dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT		1 Kali Dinas Luar Daerah		2 Orang		6 Hari	10,940,000					
		uang saku /transport peserta		48 orang		48 orang		1 keg	3,525,000					
		Honorarium Non PNS		2 orang		2 orang		1 keg	4,000,000					
2	02	2.02.01	17	03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan			Terseleenggaranya Fungsi Koordinasi dengan Lintas Sektor dalam sistim perlindungan anak pada 5 Kecamatan						DPP - PA
					Panitia Rapat tehnis kegiatan sosialisasi sistim perlindungan Perempuan		8 orang	8 orang	1 keg	3,000,000				
					Belanja Alat Tulis Kantor					550,000				
					Belanja Spanduk, Umbul-Umbul, Bendera/ Baliho					500,000				
					Belanja Penggandaan					50,000				
					Penjilidan Laporan Hasil Pelaksanaan					15,000				
					Sewa gedung		1 keg	1 keg	1 keg	1,500,000				
					Sewa Kursi Plastik		1 keg	1 keg	1 keg	100,000				
					Sewa sound Sistim		1 keg	1 keg	1 keg	750,000				
					belanja makanan dan minuman					1,360,000				
					Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah (Dalam rangka Pendataan Kekerasan Perempuan)		2 Kali Perjalanan Dinas	1 Tahun	3 Hari	6,930,000				
					perjalanan dinas luar daerah					10,000,000				
					uang saku /transport peserta					1,875,000				
					Honorarium Non PNS					525,000				
2	02	2.02.01	17	05	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Terwujudnya sosialisasi dan Advokasi kebijakan Perlindungan Ketenagaan Keja Perempuan		Meningkatkan pemahaman dan Keterampilan Masyarakat tentang sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan ketenaga kerja bagi perempuan						DPP-PA
					Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan		1 keg	10 org	10 org	3,000,000				
					Belanja Bahan Habis Pakai ATK		1 keg	1 keg	1 keg	500,000				
					Pembuatan Spanduk		1 keg	1 keg	1 keg	250,000				
					Penggandaan Cetak Materi Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan		1 keg	150 lbr	150 lbr	37,500				
					Penjilidan Laporan Hasil Kegiatan		1 keg	5 exp	5 exp	100,000				
					Cetak Foto		1 keg	30 lebr	30 lebr	150,000				
					Sewa Ruang Rapat/Gedung Pertemuan		1 keg	1 kl keg	1 kl keg	1,500,000				
					Sewa Kursi		1 keg			300,000				
					Sewa Sound Sistem		1 keg			750,000				
					Makan Minum Peserta Rapat Tehnis Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan		1 kl makan dan snack	50 org	50 org	2,000,000				
					Uang Saku/Transport Peserta Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan		1 keg	40 org	40 org	3,000,000				
					Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan		1 keg	2 org	2 org	1,050,000				

KODE KEGIATAN					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KMINERJA						PAGU INDIKATIF (RP) DAN SUMBER DANA			LOKASI	KET
							CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD II	APBD PROV.	DAK		
							TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	02	2.02.01	17	06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT		1 Keg.	Terlaksananya sistim pencatatan dan pelaporan KDRT	1 Keg.	Terkumpulnya data KDRT dan sistim pencatatan pelaporan		50,970,000	-	-	DPP - PA		
					Panitia Rapat Tehnis Sosialisasi sistem pencatatan dan pelprn. KDRT (PP&PA)		8 orang		8 orang		1 keg	3,300,000					
					Belanja Alat Tulis Kantor							550,000					
					Belanja Spanduk, Umbul-Umbul, Bendera/ Baliho							500,000					
					Belanja Penggandaan							50,000					
					Penjilidan Laporan Hasil Pelaksanaan							50,000					
					Sewa gedung		1 keg		1 keg		1 keg	1,500,000					
					Sewa Kursi Plastik		1 keg		1 keg		1 keg	100,000					
					Sewa Sound Sistem		1 keg					750,000					
					belanja makanan dan minuman							9,690,000					
					Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah (Dalam rangka Pendataan Kekerasan Perempuan)		2 Kali Perjalanan Dinas		1 Tahun		3 Hari	6,930,000					
					perjalanan dinas luar daerah							10,000,000					
					uang saku /transport peserta							15,450,000					
					Honorarium Non PNS							2,100,000					
2	02	2.02.01	17	08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan		1 Keg.	Terfasilitasinya penyelenggara layanan terpadu dalam upaya memfasilitasi perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	1 Keg.	Terorganismya fasilitasi upaya penanganan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan		39,670,000	-	-	DPP - PA		

KODE KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KMINERJA						PAGU INDIKATIF (RP) DAN SUMBER DANA			LOKASI	KET					
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD II	APBD PROV.	DAK							
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
5	2	1	01	01		Honorarium Panitia Rapat teknis Pertemuan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan		10 orang		10 orang		10 orang	3,300,000					
						Belanja Alat Tulis Kantor							550,000					
						Belanja Spanduk,							250,000					
						Belanja Penggandaan							50,000					
						Penjilidan Laporan Hasil Pelaksanaan							50,000					
						Sewa gedung	1 keg		1 keg		1 keg		1,500,000					
						Sewa Kursi Plastik	1 keg		1 keg		1 keg		300,000					
						Sewa Sound Sistem	1 keg		1 keg		1 keg		750,000					
						belanja makanan dan minuman							9,690,000					
						Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah		2 Kali Perjalanan Dinas		1 Tahun		3 Hari	6,930,000					
						perjalanan dinas luar daerah							10,000,000					
						uang saku /transport Peserta Rapat teknis Pertemuan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan							3,300,000					
						Honorarium Non PNS							3,000,000					
2	02	2.02.01	18		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>Meningkatnya peran serta perempuan dalam sektor pembangunan</b>		3 Kegiatan					389,154,500	-	-		DPP - PA	
2	02	2.02.01	18	01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan				Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap organisasi perempuan dan Peringatan Hari Ibu		Adanya pemahaman terhadap peningkatan peran dan kualitas Organisasi Perempuan dan Peringatan Hari Ibu		264,081,500	-	-		DPP - PA	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sosialisasi organisasi Perempuan		17 Orang		17 Orang		1 keg	13,250,000	-	-		DPP - PA	
						Kegiatan (Pembinaan dan Lomba P2WKSS)							188,637,000					
						Panitia Rapat Taehins Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Perempuan		7 Orang		7 Orang		1 keg	1,485,000					
						Belanja Alat Tulis Kantor		1 keg		1 keg		1 keg	506,500					
						Belanja Spanduk, Umbul-Umbul, Bendera/ Baliho		1 keg		1 keg		1 keg	500,000					
						Belanja Cetak		1 keg		1 keg		1 keg	2,375,000					
						Belanja Penggandaan		1 keg		1 keg		1 keg	150,000					
						Belanja Penjilidan		1 keg		1 keg		1 keg	40,000					

KODE KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KMINERJA						PAGU INDIKATIF (RP) DAN SUMBER DANA			LOKASI	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD II	APBD PROV.	DAK			
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		sewa gedung								10,000,000				
		Belanja sewa meja kursi		1 keg		1 keg		1 keg		5,049,000				
		Belanja sewa tenda Keg. Peringatan Hari IBU (Pameran Mini)		1 keg		1 keg		1 keg		600,000				
		Belanja sewa sound sistem ( Latihan Paduan Suara dan Hari Ha)		1 keg		1 keg		1 keg		2,674,000				
		Belanja sewa tanaman hias/Dekorasi Taman		1 keg		1 keg		1 keg		1,100,000				
		Belanja makanan dan minuman harian pegawai/kegiatan		1 keg		1 keg		1 keg		6,420,000				
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah		2 Kali Perjalanan Dinas		1 Tahun		3 Hari		8,500,000				
		Belanja perjalanan dinas luar daerah		1 kali		1 kali		1 kali		14,470,000				
		Honorarium Peserta Kegiatan Pengganti Uang Transport /Akomodasi/Konsumsi		111 Orang		111 Orang		1 keg		8,325,000				
2	2	2.02.01	18	03	Pembentukan keompok dan pelatihan fasilitator pendidikan untuk perempuan		Terlaksananya kegiatan pembentukan dan pelatihan terhadap organisasi perempuan		Adanya pemahaman terhadap peningkatan peran dan kualitas Organisasi Perempuan	62,046,500	-	-	DPP - PA	
					Honorarium Panitia Kegiatan pembentukan kelompok fasilitator			2 keg	17 Orang	1 keg	13,250,000	-	-	DPP - PA
					Belanja Alat Tulis Kantor			2 keg	2 keg	2 keg	506,500			
					Belanja Spanduk, Umbul-Umbul, Bendera/ Baliho			2 keg	2 bh	2 keg	500,000			
					Belanja Cetak			2 keg	2 keg	2 keg	2,375,000			
					Belanja Penggandaan			2 keg	2 keg	2 keg	150,000			
					Belanja Penjilitan			2 keg	2 keg	2 keg	150,000			
					sewa gedung			2 keg	2 keg	2 keg	750,000			
					Belanja sewa meja kursi			2 keg	2 keg	2 keg	750,000			
					Belanja sewa sound sistem			2 keg	2 keg	2 keg	750,000			
					Belanja makanan dan minuman harian pegawai/kegiatan			2 keg	80 Org	2 keg	8,420,000			
					Belanja perjalanan dinas dalam daerah			2 Kali Perjalanan Dinas	1 Tahun	6 Hari	8,500,000			
					Belanja perjalanan dinas luar daerah			1 kali	1 kali	1 kali	14,470,000			
					Honorarium Peserta Kegiatan Pengganti Uang Transport /Akomodasi/Konsumsi :									
					Kegiatan pembentukan kelompok fasilitator			1 keg.	50 Orang	1 keg	3,750,000			
					Kegiatan Pelatihan kelompok fasilitator			2 Angkatan	75 Orang	75 Orang	5,625,000			
					Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Kegiatan pembentukan kelompok fasilitator			2 keg	4 org	4 org	2,100,000			
2	2	2.02.01	18	04	Pelatihan Pendidikan Kebangsaan berspektif Gender		Terlaksananya kegiatan pelatihan terhadap organisasi perempuan (perempuan aktivis,Ormas,LSM,Kelompok Pemilih-Pemula disabilitas.		Adanya pemahaman terhadap peningkatan peran dan kualitas Organisasi Perempuan	63,026,500	-	-	DPP - PA	
					Honorarium Panitia tehnik Pelatihan Pendidikan Kebangsaan berspektif Gender			1 keg	15 Orang	1 keg	12,250,000	-	-	DPP - PA
					Belanja Alat Tulis Kantor			1 keg	1 keg	1 keg	506,500			
					Belanja Spanduk, Umbul-Umbul, Bendera/ Baliho			1 keg	2 bh	12 bh	500,000			
					Belanja Cetak			1 keg	1 keg	1 keg	2,375,000			
					Belanja Penggandaan			1 keg	1 keg	1 keg	150,000			
					Belanja Penjilitan			1 keg	1 keg	1 keg	150,000			
					sewa gedung			1 keg	1 keg	1 keg	1,500,000			

KODE KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KMINERJA						PAGU INDIKATIF (RP) DAN SUMBER DANA			LOKASI	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD II	APBD PROV.	DAK			
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Belanja sewa meja kursi		1 keg		1 keg		1 keg	1,300,000					
		Belanja sewa sound sistem		1 keg		1 keg		1 keg	750,000					
		Belanja makanan dan minuman harian pegawai/kegiatan		1 keg		80 Org		1 keg	6,420,000					
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah		2 Kali Perjalanan Dinas		1 Tahun		3 Hari	6,500,000					
		Belanja perjalanan dinas luar daerah		1 kali		1 kali		1 kali	15,000,000					
		Honorarium Peserta Kegiatan Pengganti Uang Transport /Akomodasi/Konsumsi :												
		Pelatihan Pendidikan Kebangsaan berspektif Gender		2 Angkatan		75 Orang		75 Orang	5,625,000					
		Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Pelatihan Pendidikan Kebangsaan berspektif Gender dari Provinsi		1 keg		4 org		4 org	10,000,000					
2	02	1.11.01	19	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/ AIDS</b>	<b>Terwujudnya kegiatan Sosialisasi Anak Usia Sekolah Diluar Sekolah terhadap bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS</b>	<b>2 Keg.</b>			<b>33,334,000</b>	-	-	BPP-KB		
2	02	2.02.01	19	01 Sosialisasi Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV / AIDS	Tersosialisasinya Anak Usia Sekolah Diluar Sekolah terhadap bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	5 Kec.	Terlaksananya Sosialisasi Anak Usia Sekolah Diluar Sekolah terhadap bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	5 Kec.	Meningkatnya kesadaran Anak Usia Sekolah Diluar Sekolah terhadap bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	5 Kec.			BPP-KB	
					Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penyuluhan dan penanggulangan Narkoba,PMS, HIV AIDS	11 Orang		11 Orang	3,650,000					
					Bahan Habis Pakai ATK				633,500					
					Pembuatan Sapanduk	1 Buah		1 Buah	250,000					
					Penggandaan Foto Copy Bahan materi	200 Lembar		200 Lembar	40,000					
					penggandaan / Cetak Foto	15 lembar		15 lembar	37,500					
					Sewa Ruang/gedung Pertemuan	1 kali Keg.		1 kali Kegiatan	250,000					
					Makan Minum Peserta Rapat kegiatan Penyuluhan dan penanggulangan Narkoba,PMS, HIV AIDS	1 kali Keg.		1 Kali snack	1,528,000					
					Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2 Kali Perjalanan Dinas		1 Tahun	6,500,000					
					Belanja perjalanan dinas luar daerah	1 kali		1 kali	15,470,000					
					Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber dari Dinas kesehatan Kota Bima	3 Orang		3 Orang	1,575,000					
					Uang Saku Peserta Rapat kegiatan Penyuluhan dan penanggulangan Narkoba,PMS, HIV AIDS	50 orang		50 orang	3,400,000					
<b>Jumlah</b>									<b>2,071,418,000</b>					

**Keterangan :**

**1 Keterangan KODE REKENING :**

- Kolom 1 : Kode Urusan (1 WAJIB/2 PILIHAN )
- Kolom 2 : Kode Urusan Pemerintahan Daerah
- Kolom 3 : Kode Organisasi (Dinas/Badan/Kantor/Instansi)
- Kolom 4 : Kode Program
- Kolom 5 : Kode Kegiatan

**2 PHLN : PINJAMAN HIBAH LUAR NEGERI**

